



**SISTEM  
KESATUAN  
HIDUP  
SETEMPAT  
DAERAH  
PROPINSI  
DAERAH  
ISTIMEWA  
ACEH**



Direktorat  
dayaan

1

4/1989

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Milik Dep. P dan K  
Tidak diperdagangkan**

**SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Editor : Drs. Yunus Melalatoa  
Rifai Abu**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH**

**1980 / 1981**

**SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT  
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT SEJARAH &  
NILAI TRADISIONAL**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH**

**1980 / 1981**

PERPUSTAKAAN  
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

Nomor Induk : 741/1109  
Tanggal terima :  
Tanggal catat : 0-3-89  
Deli/hadiah dari : DKO Aceh  
Nomor buku : 307.0959011 Sis  
Kopi ke : 2

EDITOR : Drs. Yunus Melalatoa.  
Rifai Abu.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. P DAN K**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

---

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Dep. P dan K. dalam tahun anggaran 1980/1981 telah berhasil menyusun beberapa naskah kebudayaan yaitu : Pola Pemukiman Daerah, Sistem Kesatuan Hidup Setempat, Sejarah Pendidikan Daerah, Cerita Rakyat Daerah dan Permainan Rakyat Daerah. Dalam tahun anggaran 1981/1982 Proyek IDKD. Pusat setelah melalui revisi telah memberi persetujuan kepada Proyek IDKD. Daerah Istimewa Aceh untuk menerbitkan dua diantara kelima naskah daerah ini, masing-masing yaitu : "Pola Pemukiman Daerah" dan "Sistem Kesatuan Hidup Setempat".

Selesainya naskah-naskah ini disebabkan karena adanya jalinan kerja sama dari semua pihak, baik di Pusat maupun di Daerah terutama dari Pihak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDKD. Pusat/Team evaluasi, Universitas Syiah Kuala, IAIN, Lembaga Pemerintah dan Swasta yang ada hubungannya.

Suatu kenyataan yang sama-sama kita sadari, bahwa Tanah Air kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau dan didiami pula oleh bermacam-macam Suku Bangsa dengan memiliki aneka ragam kebudayaan daerah sangat penting artinya, terutama dalam rangka pembinaan Kebudayaan Nasional dan penggalian identitas suatu bangsa. Penggalian nilai-nilai budaya daerah dengan penuh kejujuran merupakan usaha kearah penyatuan pengertian tentang dinamika daerah dan masyarakatnya.

Naskah yang akan diterbitkan ini masih banyak kekurangan dari kesempurnaan, oleh karena itu hendaklah menjadi bahan perbandingan bagi para peneliti dan penulisan naskah untuk masa-masa yang akan datang dengan tidak melupakan, bahwa kita sekarang berada dalam zaman Orde Baru dan masa pembangunan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan material kepada pemimpin Proyek IDKD. dan team peneliti yang telah bersusah payah dengan penuh dedikasi dalam penyusunan naskah ini kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 - 2 - 1982.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. P DAN K.  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

( DRS. ATHAILLAH )

NIP. 130433286.-

## P R A K A T A

Atas dasar kepercayaan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Pusat/Jakarta kepada Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Daerah Istimewa Aceh, maka dalam tahun anggaran 1980/1981 kami telah melaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi penelitian dan pencatatan terhadap aspek-aspek kebudayaan daerah, yaitu :

Sistem Kesatuan Hidup Setempat, Sejarah Pendidikan Daerah, Pola pemukiman Daerah Cerita Rakyat Daerah (Mite dan Legende) dan Permainan Rakyat Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Proyek IDKD. Daerah Istimewa Aceh ini dibagi atas dua, yaitu :

Kegiatan di Pusat meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah Kegiatan di Daerah meliputi :

Survei lapangan dan perpustakaan sampai dengan penyusunan naskah.

Sebagai hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan dalam tahun 1980 / 1981 oleh Tim Peneliti dan Penulisan Sistem Kesatuan Hidup Setempat telah dapat menyusun suatu naskah daerah yang disetujui oleh Pemimpin Proyek IDKD Pusat untuk diterbitkan oleh Proyek IDKD Daerah Istimewa Aceh.

Berhasilnya penyusunan dan penerbitan naskah ini adalah berkat kerja sama dengan berbagai instansi/jawatan pemerintah dan swasta-swasta serta badan-badan lainnya.

Bantuan telah kami terima dari berbagai pihak, terutama dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemimpin bersama staf Proyek IDKD Pusat, Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Universitas Syiah Kuala, Institut Agama Islam Negeri Jamiah Ar Raniri, Kepala Bidang PSK, Direktur Museum Negeri Banda Aceh, Kepala Perpustakaan Wilayah dan handai tolan yang telah memberikan pengalaman mereka dalam bidang penelitian dan penulisan. Kepada Ketua Tim Peneliti/Penulis, Kon-

sultan dan para anggota yang telah bersusah payah dalam menyelesaikan naskah ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kami aturkan terima kasih.

Akhirulkalimat kami merasa sangat berbahagia dapat menyelesaikan tugas ini sebagai pertanggung jawaban Proyek IDKD Daerah Istimewa Aceh kepada Proyek IDKD Pusat di Jakarta. Semoga naskah yang belum sempurna ini masih diharapkan perbaikannya dari pihak yang berminat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti serta penulisan selanjutnya dan memberi manfaat bagi khalayak umum yang memerlukannya.

Banda Aceh, 8 Pebruari 1982.

Proyek IDKD. Daerah Istimewa Aceh  
Pemimpin,

( Drs. Razali Umar )  
NIP. 130186326

## PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam Naskah Kebudayaan Daerah diantaranya ialah Naskah : Sistem Kesatuan Hidup Setempat Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa Naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wialyah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan Tenaga Ahli perorangan di Daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya Naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada Tim penulis Naskah ini di Daerah yang terdiri dari : Prof. A. Hasyimy (Konsultan), Drs. T. Syamsuddin (Ketua/Penanggung Jawab), sebagai anggota masing-masing Drs. T.A. Hasan Husin, Drs. M. Isa Sulaiman, Drs. Razali Umar, Muhammad Saidi SH dan Tim penyempurna Naskah di Pusat yang terdiri dari : Drs. M. Yunus Melalatoa dan Rivai Abu.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 28 Januari 1982

Pemimpin Proyek

( Drs. Bambang Suwondo )

NIP. 130117589

# DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
B A B.	
I. PENDAHULUAN .....	1
1. Masalah Penelitian .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	3
3. Ruang Lingkup Penelitian .....	3
4. Lokasi Penelitian .....	4
5. Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian ..	5
II. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA ACEH BA- GIAN BARAT ACEH.	
BAGIAN PERTAMA .....	9
1. Lokasi .....	9
2. Penduduk .....	14
3. Latar Belakang Sosial Budaya .....	18
BAGIAN KEDUA .....	25
BENTUK KOMONITAS .....	25
1. Ciri-ciri Sebuah komonitas Kecil .....	25
2. Struktur Komonitas Kecil .....	26
3. Pemerintahan Dalam Komonitas Kecil .....	26
4. Lembaga-lembaga Sosial Dalam Komonitas Ke- cil. ....	28
BAGIAN KETIGA .....	30
SISTIM PELAPISAN SOSIAL .....	30
1. Pelapisan Sosial Masa yang lalu .....	30
2. Pelayanan Sosial masa Kini .....	34
BAGIAN KEEMPAT .....	37
PIMPINAN MASYARAKAT .....	37
1. Gambaran Umum .....	37
2. Pimpinan Tradisional .....	39
3. Pimpinan masa Kini .....	41

BAGIAN KELIMA .....	42
SISTIM PENGENDALIAN SOSIAL .....	42
1. Mempertebal Keyakinan .....	42
2. Memberi Imbalan .....	45
3. Mengembangkan Rasa Malu .....	46
4. Mengembangkan Rasa Takut .....	47
BAGIAN KEENAM .....	48
BEBERAPA ANALISA .....	48
<b>III. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA ANEUK JAMEE.</b>	
BAGIAN PERTAMA .....	50
IDENTIFIKASI .....	50
1. L o k a s i .....	50
2. Penduduk .....	54
3. Latar Belakang Sosial Budaya .....	55
BAGIAN KEDUA .....	59
BENTUK KOMONITAS .....	59
1. Ciri-ciri Komonitas Kecil .....	59
2. Struktur Komonitas Kecil .....	60
3. Pemerintahan Dalam Komonitas Kecil .....	61
4. Lembaga-lembaga Sosial Dalam Komonitas Kecil .....	63
BAGIAN KETIGA .....	63
SISTEM PELAPISAN SOSIAL .....	63
1. Pelapisan Sosial Masa yang lalu .....	63
2. Pelapisan Sosial Masa Kini .....	65
BAGIAN KEEMPAT .....	66
PIMPINAN MASYARAKAT .....	66
1. Gambaran Umum .....	66
2. Pimpinan Tradisional .....	66
BAGIAN KELIMA .....	69
SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL .....	69
1. Mempertebal Keyakinan .....	90

2. Memberi Imbalan .....	71
3. Mengembangkan Rasa Malu .....	72
4. Mengembangkan Rasa Takut .....	73
BAGIAN KEENAM .....	74
BEBERAPA ANALISA .....	74
<b>IV. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KLUET.</b>	
BAGIAN PERTAMA .....	77
IDENTIFIKASI .....	77
1. L o k a s i .....	77
2. Penduduk .....	80
3. Latar Belakang Sosial Budaya .....	84
BAGIAN KEDUA .....	88
BENTUK KOMONITAS .....	88
1. Ciri-ciri Sebuah Komonitas Kecil .....	88
2. Struktur Komunitas Kecil .....	89
3. Pemerintahan Dalam Komunitas Kecil .....	90
BAGIAN KETIGA .....	93
SISTEM PELAPISAN SOSIAL .....	93
1. Pelapisan Sosial Masa yang lalu .....	93
2. Pelapisan Sosial Masa Kini .....	94]
BAGIAN KEEMPAT .....	95
PIMPINAN MASYARAKAT .....	95
1. Gambaran Umum .....	96
2. Pimpinan Tradisional .....	96
BAGIAN KELIMA .....	98
SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL .....	98
1. Mempertebal Keyakinan .....	99
2. Memberi Imbalan .....	100
3. Mengembangkan Rasa Malu .....	101
4. Mengembangkan Rasa Takut .....	102
BAGIAN KEENAM .....	103
BEBERAPA ANALISA .....	103
DAFTAR INDEKS .....	106
CATATAN KAKI .....	109
DAFTAR BACAAN .....	110
DAFTAR INFORMAN .....	112

## BAB PERTAMA PENDAHULUAN

### MASALAH PENELITIAN.

Kesatuan hidup setempat sering juga disebut dengan Community, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan komunitas saja. Bentuk kesatuan hidup setempat ini merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak pertama-tama ada karena ikatan kekerabatan, tetapi karena ikatan tempat kehidupan sosial.

Dasar pangkal yang menjadi kesatuan hidup atau kelompok disini adalah wilayah, cinta wilayah, dan kepribadian kelompok. Suatu komunitas dapat berbentuk komunitas besar dan dapat pula berbentuk komunitas kecil. Salah satu bentuk komunitas kecil adalah seperti desa atau gampong di Aceh. Begitu juga dengan komunitas yang lebih besar terujud dalam suatu suku bangsa seperti suku-bangsa Aceh, suku-bangsa Gayo, suku-bangsa Aneuk Jamee, suku-bangsa Alas, suku bangsa Tamiang, suku bangsa Simeulu, suku bangsa Kluet, dan suku bangsa Singkil.

Perbedaan suatu komunitas dengan komunitas lain dapat dilihat dari ciri-ciri struktur, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Dari segi ciri-ciri ini terlihat pula dengan jelas akan batas-batas suatu komunitas, legitimasi, atribut-atribut dan ciri-ciri khusus lainnya.

Struktur suatu komunitas memberi bentuk tertentu. Komunitas kecil mungkin bagian dari suatu komunitas yang lebih besar, dan mungkin juga merupakan induk dari beberapa komunitas yang lebih kecil lagi. Ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat struktural dari komunitas yang lebih besar ataupun komunitas yang lebih kecil.

Kegiatan pemerintahan sudah barang tentu merupakan suatu perangkat yang ada di dalam suatu komunitas untuk mengatur,

mengembangkan, dan mengawasi masyarakat. Maka kegiatan pemerintahan sudah barang tentu pula berbeda antara satu sama lain komunitas.

Suatu bentuk lain yang mewarnai bentuk suatu komunitas adalah lembaga-lembaga sosial yang terdapat didalamnya. Lembaga-lembaga sosial tersebut terujud dalam bidang ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan sistem religi.

Sistem pelapisan sosial sudah barang tentu ada pada setiap suku bangsa atau komunitas. Pelapisan sosial ini tampaknya ada yang tajam dan ada pula yang tidak begitu tajam. Sistem pelapisan sosial yang tajam sering disebut dengan pelapisan sosial yang resmi. Dan sistem pelapisan sosial yang tidak begitu tajam disebut dengan pelapisan sosial yang samar.

Pada setiap pelapisan sosial akan kita temui sejarah masa yang lalu, masa kini, dan kemungkinan masa yang akan datang. Tentu di dalamnya terdapat pula bentuk hubungan antar lapisan, perubahan lapisan, dan lain-lain lagi.

Pimpinan masyarakat merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam suatu komunitas. Kadang-kadang unsur pimpinan masa yang lalu (tradisional) masih berlangsung pada masa kini. Tetapi tidak sedikit pula pengalihan unsur pimpinan masyarakat kepada pimpinan yang lahir dan pada masa sekarang.

Sistem pengendalian sosial selalu ada dalam suatu komunitas, agar setiap warga dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dalam komunitasnya. Untuk pengendalian itu ada beberapa cara yang ditempuh seperti dengan cara mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu, dan mengembangkan rasa takut.

Dari semua ciri komunitas seperti diatas tidak mengalami keadaan yang tetap terus-menerus, ia akan turut berproses sesuai dengan perkembangan warga komunitas atau masyarakat. Proses dominan kearah perkembangan yang dialami sekarang adalah akibat proses pembangunan yang sedang giat-giat dilakukan di Indonesia. Proses seperti ini terdapat pula pada suku-suku bangsa di Aceh, khususnya pada suku bangsa yang diteliti dalam penelitian ini yaitu suku bangsa Aceh di bagian Barat daerah Aceh, suku bangsa Aneuk Jamee, dan suku bangsa Kluet.

Akibat proses pembangunan banyak ujud kebudayaan suku bangsa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi hampir pada setiap ciri komunitas, baik sebagai komunitas besar maupun sebagai komunitas kecil seperti komunitas *gampong* di Aceh. Ujud kebudayaan yang mengalami perubahan ini tampak pada letak dan keadaan geografis, pola *gampong* penduduk, latar belakang sosial budaya, bentuk komunitas, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat, dan sistem pengendalian sosial.

### TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pada penelitian tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat adalah :

1. Agar pusat penelitian Sejarah dan Budaya mempunyai informasi dan dokumentasi tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat di Daerah bagian Barat Aceh. Dalam penelitian ini informasi mencakup tentang bentuk komunitas kecil, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat, dan sistem pengendalian sosial.
2. Dengan penelitian ini diharapkan kemungkinan dapat menentukan kebijaksanaan nasional untuk membina kesatuan kebudayaan dan memperkuat sistem ketahanan nasional.
3. Untuk dapat melihat sejauh mana telah terjadi perubahan wujud-wujud kebudayaan dalam Sistem Kesatuan Hidup Setempat. Karena diduga dari seperangkat wujud kebudayaan sudah mengalami pergeseran ataupun musnah sama sekali ditelan oleh masa, terutama akibat proses pembangunan yang sedang giat-giat dilaksanakan dalam segala bidang dewasa ini termasuk tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat.

### RUANG LINGKUP PENELITIAN.

Sebagai landasan yang menjadi ruang lingkup penelitian tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat di bagian Barat Aceh adalah pembatasan tentang pengertian Kesatuan Hidup Setempat. Kesatuan Hidup setempat sering juga disebut dengan *Community* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Komunitas saja. Pengertian bagian Barat disini menunjukkan daerah penelitian yang dilakukan terhadap suku-suku bangsa bagian Barat Aceh, yang pada kesempatan ini dapat diteliti terhadap suku bangsa Aceh bagian Barat,

suku bangsa Aneuk Jamee, dan suku bangsa Kluet. Karena semua suku bangsa yang ada di Aceh seperti suku bangsa Aceh di Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat, suku bangsa Gayo di Aceh Tengah, suku bangsa Aneuk Jamee di Aceh Selatan dan sebagian di Aceh Barat, sukubangsa Alas di Aceh Tenggara, sukubangsa Tamiang di Aceh Timur, sukubangsa Simeulu di pulau Simeulu Aceh Barat, sukubangsa Kluet di Aceh Selatan, dan sukubangsa Singkil di sebagian Aceh Selatan, pada kesempatan ini tidak mungkin diteliti semua mengingat keterbatasan akan tenaga, waktu, dan dana (biaya) yang tersedia.

Untuk memenuhi kemungkinan tercapai sasaran penelitian ini, maka telah dipilih tiga suku bangsa saja yaitu :

- a. Sukubangsa Aceh di bagian Barat di Aceh Barat .
- b. Sukubangsa Aneuk Jamee di Aceh Selatan.
- c. Sukubangsa Kluet di Aceh Selatan.

Ketiga daerah sukubangsa ini terletak di daerah bagian Barat Aceh. Oleh karena itu penelitian ini diberi nama (judul) dengan "*Sistem Kesatuan Hidup Setempat di bagian Barat Aceh*".

Adapun alasan yang mendorong penelitian terhadap ketiga sukubangsa tersebut di bagian Barat Aceh adalah :

- a. Ketiga sukubangsa itu belum pernah diteliti secara mendalam terutama tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat.
- b. Ketiga sukubangsa tersebut mempunyai pendukung yang besar di daerah bagian Barat Aceh.
- c. Pengaruh dari Kebudayaan ketiga sukubangsa itu dirasa sangat besar dikalangan masyarakat bagian Barat Aceh khususnya dan masyarakat Aceh umumnya.

#### LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk sukubangsa Aceh di bagian Barat dipilih daerah Kecamatan Jaya Lamno, Aceh Barat.
2. Untuk sukubangsa Aneuk Jamee dipilih daerah Kecamatan Samadua, Aceh Selatan.
3. Untuk sukubangsa Kluet dipilih daerah Kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan, Aceh Selatan.

Didalam ketiga lokasi itu penelitian dapat mengamati dan menja-

jagi beberapa komunitas kecil yang disebut dengan *gampong*. Hal ini disebabkan komunitas-komunitas kecil yang terdapat pada ketiga lokasi tersebut dianggap dapat mewakili ketiga sukubangsa tadi.

## PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB PENELITIAN.

### *Aspek Penelitian.*

Penelitian tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat bagian Barat Aceh, merupakan penelitian tematis. Penelitian ini dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari Konsultan, Penanggung jawab, Sekretaris, dan beberapa anggota peneliti. Tim penelitian ini terdiri dari tenaga-tenaga pengajar pada Universitas Syiah Kuala, dan tenaga dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tenaga-tenaga peneliti tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial seperti disiplin Antropologi, Sejarah, Pendidikan Civic dan Hukum, serta disiplin ilmu Hukum. Organisasi tim penelitian ini adalah :

Konsultan	: Prof. A. Hasymi
Penanggung jawab/Ketua pelaksana	: Drs. T. Syamsuddin
Sekretaris	: Drs. T. A. Hasan Husin
Anggota	: Drs M. Isa Sulaiman Drs Razali Umar Muhammad Saidi, SH

Penelitian tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat ini menggunakan beberapa metoda untuk mengumpulkan informasi dan data-data. Sebelum peneliti ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat selektif. Artinya peneliti mengumpulkan data-data kepustakaan sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan konsep-konsep tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat.

Untuk memperoleh data-data di lapangan peneliti mempergunakan metoda deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, partisipasi, dan wawancara. Wawancara diadakan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para cerdik pandai dalam masyarakat serta mempunyai pengetahuan tentang masalah Sistem Kesatuan Hidup Setempat. Foto-foto diambil sekitar yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Lokasi penelitian ini diambil tiga suku bangsa bagian Barat Aceh yaitu suku-bangsa Aceh bagian Barat Aceh, suku-bangsa Aneuk Jamee, dan suku bangsa Kluet. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan seperti yang tersebut pada halaman 5 dan halaman 6 diatas. Peneliti akan berpindah-pindah dari suatu komunitas *gampong* ke komunitas *gampong* yang lain untuk memperoleh data-data.

Waktu yang dipergunakan untuk meneliti tentang Sistem Kesatuan Hidup setempat dipergunakan selama enam bulan. Kegiatannya berlangsung kedalam ;

- a. Masa persiapan 30 hari
- b. Masa pengumpulan data di lapangan selama 60 hari
- c. Masa pengolahan dan penyusunan data selama 30 hari
- d. Masa penyusunan laporan dan seminar kecil selama 30 hari
- e. Masa penulisan akhir/reproduksi hasil selama 30 hari.

Waktu yang 30 hari untuk masa persiapan sudah dipergunakan untuk membekali para peneliti dengan penjelasan-penjelasan tentang pegangan kerja dan bentuk laporan yang diharapkan. Disamping itu para peneliti mempersiapkan diri mengenai kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Masa pengumpulan data di lapangan sudah berlangsung selama dua bulan. Peneliti memusatkan perhatiannya pada Sistem Kesatuan Hidup Setempat dalam komunitas *Gampong*. Mereka menjajagi data yang dibutuhkan pada setiap komunitas *Gampong*.

Pengolahan data dilakukan oleh masing-masing peneliti. Kemudian data-data yang sudah diolah itu disusun sebagai draft pertama. Dan hasilnya diseminarkan selama enam hari. Dalam seminar kecil ini dihadiri beberapa orang yang mempunyai pengetahuan tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat terutama bagi orang-orang yang berasal dari ketiga suku-suku diatas tadi.

Penulisan akhir merupakan penulisan draft terakhir yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjaga sistematika laporan baik dilihat dari segi organisasi maupun dari segi bahasa.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan para peneliti sedikit mengalami hambatan-hambatan. Hambatan ini merupakan hambatan yang umum dialami oleh para peneliti. Hambatan yang dimak-

sudkan adalah masalah hubungan antara para peneliti dengan informan. Kebanyakan informan mempunyai tugas-tugas yang sangat beraneka ragam, tidak sedikit pula mereka mempunyai tugas rangkap. Dengan demikian waktu bagi mereka sudah banyak disita oleh tugas-tugas mereka sendiri, sehingga untuk melayani peneliti waktunya sangat terbatas. Peneliti selalu mengejar-ngejar informan mencari waktu yang terluang untuk diadakan wawancara.

Hambatan lain yang dihadapi oleh peneliti di lapangan adalah masalah komunikasi antara suatu daerah penelitian dengan daerah yang lain atau antara suatu *gampong* dengan *gampong* yang lain. Kadang-kadang peneliti terpaksa menelusuri dengan jalan kaki, karena dengan kendaraan bermotor tidak dapat dilalui. Hambatan ini tidak begitu prinsipil bagi peneliti.

Selain dari hambatan diatas, masih ada suatu hambatan lagi. Saat dilakukan penelitian ini kebetulan sedang musim penghujan. Dengan demikian peneliti sedikit terhambat untuk melakukan tugasnya.

#### *Aspek penulisan laporan*

Sistematika penulisan laporan penelitian tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat dilaksanakan menurut petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pola kerangka laporan dan petunjuk pelaksanaan. Sistematika tersebut adalah, Bab Pertama mengenai Pendahuluan mengandung isi tentang masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan pertanggung jawaban penelitian.

Dalam Bab Kedua mengenai Komunitas Kecil Suku Bangsa Aceh bagian Barat Aceh. Isinya terdiri dari identifikasi, bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat, sistem pengendalian sosial, dan beberapa analisa. Dalam Bab Ketiga mengenai Komunitas Kecil suku-bangsa Aneuk Jamee. Isinya sama dengan isi pokok-pokok bahasan yang terdapat didalam Komunitas Kecil suku-bangsa Aceh pada Bab Kedua tadi. Dan dalam Bab keempat mengenai Komunitas Kecil suku-bangsa Kluet. Isinya sama dengan pokok-pokok bahasan yang terdapat didalam Bab Kedua dan Ketiga diatas tadi.

#### *Aspek hasil akhir*

Penelitian tentang Sistem Kesatuan Hidup Setempat ini meru-

pakan suatu topik yang sangat umum, dan mempunyai jangkauan yang sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak sub-sub topik yang sangat luas pula jangkauannya. Seharusnya sub topik itu merupakan suatu judul penelitian. Tiap-tiap sub topik itu banyak pula masalah yang harus dijangkau, sehingga waktu yang tersedia merupakan waktu yang terlalu sempit untuk mengembangkan semua konsep-konsep yang terdapat dalam judul mengenai Sistem Kesatuan Hidup Setempat.

Mengingat waktu yang tersedia seharusnya sub-sub topik itu diangkat menjadi topik atau judul penelitian. Seperti salah satu sub topik mengenai pelapisan sosial. Dengan demikian setiap judul itu dapat dikembangkan dengan cermat dan lebih sempurna.

Untuk masa-masa yang akan datang agar setiap judul harus diperhatikan supaya jangkauannya tidak meluas, tetapi diusahakan supaya mendalam. Dengan demikian judul itu akan dapat dicerna secara mendalam dan cermat.

**BAB. KEDUA**  
**KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA**  
**ACEH DI BAGIAN BARAT ACEH**  
**BAGIAN I. IDENTIFIKASI**

**L O K A S I**

*Letak dan Keadaan Geografis.*

Suku-bangsa Aceh sebagian besar mendiami daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu di Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat, dan sebagian di Aceh Timur, serta Aceh Selatan. Suku bangsa Aceh di Aceh Barat merupakan penduduk asli yang mendiami 19 buah Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jaya, Lageun, Lhok Kruet, Samponit, Krung Sabee, Teunom, Sama Tiga, Wayla, Seunagan, Beutong, Darul Makmur Johan Pahlawan, Sungai Mas, Kaway XVI, Kuala, Simeulu Barat, Simeulu Timur, Salang, dan Teupah Selatan.

Dari 19 Kecamatan diatas yang mayoritas terdapat suku-bangsa Aceh adalah di Kecamatan Jaya Lamno, Lageun, Samponit, Lhok Kruet, Krung Sabee, Teunom, Sama Tiga, Wayla, Sungai Mas, Darul Makmur, dan sebagian di Seunagan.

Sebagai penduduk asli ia merupakan penduduk yang mayoritas, bila dibandingkan dengan penduduk pendatang. Penduduk pendatang ini terdiri dari suku bangsa Aneuk Jamee, dan beberapa pendatang Aceh lainnya, transmigrasi Jawa, dan orang-orang Cina yang berpusat di ibu kota Kabupaten Meulaboh. Orang-orang Jawa kebanyakan di perkebunan-perkebunan seperti di perkebunan Semanyam, dan perkebunan Senagan.

Suku-bangsa Aceh bagian Barat ini dilihat dari segi budaya mendapat pengaruh dari suku-bangsa Aneuk Jamee. Hal ini disebabkan suku Aneuk Jamee disamping mayoritas terdapat di Aceh selatan sebagai daerah perbatasan, terdapat pula di Aceh Barat yaitu di Kecamatan Johan Pahlawan. Kaway XVI dan Kecamatan Kuala. Oleh karena itu terjadilah akulturasi antara kedua kebudayaan tersebut.

Lokasi penelitian terhadap suku bangsa Aceh bagian Barat ini dipusatkan di Kecamatan Jaya Lamno. Disini peneliti dapat menjanggi beberapa komunitas kecil *gampong* (desa). Kecamatan Jaya Lamno terletak dilembah gunung Gerutee, merupakan daerah pantai. Sebelah Barat berbatas dengan gunung Gerutee sebagai batas antara Aceh Barat dengan Aceh Besar. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Lageun. Sebelah Utara berbatas dengan lautan Hindia, dan sebelah Selatan terdapat daerah Hutan.

Daerah yang didiami oleh suku-bangsa Aceh ini merupakan Daerah Pantai. Hanya sebagian kecil saja mereka berada di daerah pedalaman. Keadaan suhu udara sedang. Musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Keadaan ini adalah sama pada ketiga suku bangsa dalam penelitian ini khususnya dan untuk daerah Aceh umumnya. Pada bulan-bulan ini masyarakat mulai *tron ublang* (turun kesawah) untuk menanam padi, karena bulan-bulan ini persiapan air di sawah sudah mencukupi. Sebab umumnya daerah Kabupaten Aceh Barat jarang terdapat irigasi yang dapat mengairi air ke sawah-sawah.

Kecamatan Jaya Lamno sebagai lokasi penelitian ini hawanya agak dingin dimalam hari, karena letaknya diapit oleh gunung-gunung. Letak demikian menyebabkan daerah ini menjadi daerah lembah, sangat subur untuk persawahan, walaupun belum mempunyai irigasi. Persiapan air memadai yang dapat diairi dari gunung-gunung.

Alam fauna menggambarkan keadaan yang sama pada suku bangsa Aceh bagian Barat ini. Binatang ternak terdiri dari kerbau, lembu, kambing, itik, dan ayam. Diantaranya masyarakat banyak memelihara kerbau untuk menarik bajak di sawah dan keperluan daging.

Binatang-binatang buas terdapat di hutan seperti harimau, mawas, dan beruang. Diantaranya hanya harimau dan beruang yang sangat mengganggu ketenteraman manusia. Kadang-kadang harimau menerkam binatang ternak, bahkan manusia. Beruang sering mengganggu tanaman-tanaman.

Alam flora yang erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat, tentunya alam tumbuh-tumbuhan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup. Hampir sepanjang pantai barat

Aceh penuh dengan tanaman kelapa. Daerah gunung banyak ditanami dengan pohon cengkeh dan kopi. Pada dataran-dataran rendah dijadikan lokasi penanaman karet. Penanaman sayur-sayuran tidak banyak mempengaruhi pendapatan, bahkan untuk konsumsi sendiripun hampir tidak mencukupi.

Pada waktu musim tron ublang semua masyarakat menanam padi. Selesai padi dipanen kadang-kadang mereka menanam tanaman muda seperti kacang, jagung dan lain-lain. Pada waktu-waktu tertentu ditanam pula sejenis tanaman yang menghasilkan minyak. Minyak ini disebut dengan minyak nilam yang sangat mahal harganya. Pada musim ini kadang-kadang masyarakat meninggalkan kampung berbulan-bulan lamanya untuk pergi ke ladang-ladang nilam. Setelah nilam dapat dipungut hasilnya barulah mereka kembali lagi ke kampungnya.

#### *Pola Perkampungan*

Pola perkampungan pada suku-bangsa Aceh bagian Barat, sama halnya dengan pola perkampungan pada suku bangsa Aceh umumnya. Perkampungan penduduk umumnya mengelompok pada kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan ini membuat suatu *gampong* atau desa. Secara administratif sebuah Kabupaten terdiri atas Kecamatan-kecamatan. Tiap-tiap Kecamatan terdiri atas beberapa *kemukiman*. Dan tiap-tiap *kemukiman* terdiri pula atas beberapa *gampong*.

Proses terbentuknya perkampungan merupakan akibat penambahan warga *gampong*, maka dengan sendirinya bertambah juga jumlah rumah sebagai tempat mereka diami. Pertambahan jumlah rumah ini adakalanya mereka mendirikan perkampungan baru, karena perkampungan lama tidak muat lagi. Selain dari itu perluasan perkampungan ini terjadi pula karena ingin mencari lokasi baru atau tempat bercocok tanam sekeliling rumah agak luas. Hal ini disebabkan bahwa tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang sangat menentukan kehidupan mereka sebagai masyarakat tani.

Antara suatu rumah dengan rumah yang lain biasanya dibatasi oleh pagar-pegar yang masing-masing mengelilingi rumah. Dalam pagar kadang kita dapati selain rumah ada tanaman pisang, ke-

lapa dan beberapa jenis sayur-sayuran.

Letak *gampong* biasanya berbatasan satu sama lain. Batas teritorial biasanya menurut perjanjian, kadangkala dibatasi pula oleh bukit-bukit atau sungai-sungai. Tiap-tiap teritorial *gampong* paling sedikit terdapat sebuah *menasah*. Pada lembaga *menasah* ini dirumuskan semua kegiatan-kegiatan sosial *gampong*, disamping dipergunakan untuk tempat mengaji anak-anak.

Jenis bangunan yang terdapat pada lokasi penelitian, bila dilihat dari segi kegunaan dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu bangunan sebagai tempat tinggal yang disebut dengan *rumoh* (rumah). Dan bangunan tempat kegiatan-kegiatan sosial disebut dengan *menasah*, *balee* (balai) untuk orang perempuan. Bangunan ini terbuat dari kayu dan didirikan diatas tiang.

Bangunan *menasah* dan *balee* biasanya didirikan di tengah-tengah perkampungan, supaya mudah bagi warga *gampong* mendatanginya. *Menasah* atau *balee* dipergunakan juga untuk tempat sembahyang berjamaah, tempat mengaji bagi anak-anak, dan lain-lain.

Selain jenis bangunan yang terdapat diatas masih terdapat lagi bangunan yang berbentuk sekolah seperti pesantren yang disebut dengan *dayah*. Fungsinya terutama untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Pada lokasi penelitian ini terdapat sebuah pesantren yang diberi nama dengan *Dayah Budi*. Pesantren ini dipimpin oleh seorang ulama terkemuka di daerah ini. Para santri atau *ureung medagang* terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pelosok daerah Aceh. Tampaknya santri ini mendapat status sosial yang tertentu dari segi pandangan masyarakat. Tamatan *Dayah Budi* sudah banyak pergi melanjutkan ke tempat lain seperti ke IAIN Arraniry, UISU Medan dan beberapa orang sudah berhasil pergi ke Mesir.

Tempat-tempat tertentu di lokasi penelitian terdapat seperti lapangan olah raga, tempat upacara, tempat ibadah dan tempat perkuburan. Lapangan olah raga disebut dengan *padang-ban* (lapangan bola kaki). Permainan olah raga lain masih sangat jarang dilakukan.

Suatu olah raga yang spesifik sudah berkembang sejak dahulu

yaitu olah raga bela diri yang disebut dengan *silek*, hampir sama dengan olah raga *geudeu-geudeu* di daerah Pidie (1).

Tempat-tempat ibadah selain *menasah* terdapat juga mesjid. Biasanya tiap-tiap *kemukiman* ada sebuah mesjid, tempat warga *kemukiman* melakukan ibadah Jumat.

Tempat-tempat perkuburan biasanya terdapat pada tempat-tempat yang agak asing atau pinggiran kampung. Bentuk perkuburan ini sama dengan bentuk perkuburan Islam lainnya. Tempat perkuburan ini berkelompok-kelompok. Tiap-tiap kelompok merasa dirinya satu keturunan darah. Kelompok perkuburan semacam ini disebut dengan *saboh bhom* (satu tempat perkuburan).

Jalan-jalan yang terdapat didalam perkampungan ada yang dapat dilalui dengan mobil dan ada pula yang hanya dapat dilalui dengan sepeda motor. Cara mempergunakan jalan-jalan ini adalah sama dengan ditempat-tempat lain, masing-masing orang berkendaraan mempergunakan sebelah kiri.

Semua jalan-jalan dalam perkampungan dibuat oleh swadaya masyarakat setempat. Baru-baru ini dengan adanya subsidi desa banyak jalan-jalan yang mendapat bantuan, walaupun pembuatannya masih memakai tenaga masyarakat. Kegiatan membuat jalan-jalan perkampungan biasanya atas inisiatif pimpinan masyarakat. Jalan-jalan melalui sungai kita temui juga seperti *krung* Lambesoi dan lain-lain lagi. Alat-alat pengangkutan melalui sungai ini dipergunakan *jalo* (sampan).

Batas suatu perkampungan dengan perkampungan yang lain tidak begitu kentara dilihat dari tanda-tandanya. Hanya berdasarkan suatu perjanjian antara suatu desa dengan desa yang lain. Suatu perkampungan selalu ditandai dengan adanya lembaga *menasah* sebagai lembaga persekutuan hidup.

Dalam perkampungan kadang-kadang terdapat parit yang dipergunakan untuk membuang air ke tempat-tempat tertentu, agar tidak menggenang di dalam kampung. Di dalam kampung kadang-kadang juga terdapat tempat-tempat mandi untuk umum, biasanya terdapat pada tiap-tiap *menasah*. Tiap-tiap *menasah* biasanya selalu ada sumur atau pun dekat sungai.

Tempat-tempat permandian khusus, masing-masing terdapat

pada tiap-tiap rumah. Karena setiap rumah masing-masing ada sebuah sumur. Dan tempat-tempat permandian yang khusus dikelola oleh pemerintah pada saat ini belum ada baik pada lokasi penelitian maupun pada seluruh tempat yang didiami oleh suku bangsa Aceh ini.

## P E N D U D U K

*Gambaran Umum Suku-Bangsa.* Suku-bangsa Aceh bagian Barat Aceh belum diketahui dengan pasti berapa jumlahnya, karena pencatatan yang khusus mengenai itu belum ada. Secara keseluruhan penduduk Kabupaten Aceh Barat berjumlah 275.584 orang. Ini sudah termasuk penduduk pendatang seperti suku bangsa Aneuk Jamee, beberapa suku-bangsa lainnya transmigrasi Jawa, Cina dan lain-lain. Penduduk sebanyak itu tersebar kedalam 19 Kecamatan, 92 mukim, dan 762 *gampong*.

Tempat-tempat pemukiman suku-bangsa Aceh bagian Barat sebagian besar berada dalam Kecamatan Jaya Lamno, Laegun, Samponit, Lahok Kruet, Krung Sabec, Darul Makmur, Teunom, Sama Tiga, Woyla, Sungai Mas, dan Kecamatan Beutong. Dalam Kecamatan Johan Pahlawan, Kaway XVI, Seunagan, dan Kecamatan Kuala terdapat penduduk campuran antara suku-bangsa Aceh dengan pendatang seperti dengan suku bangsa Aneuk Jamee, Minang, dan beberapa suku-bangsa lainnya.

Di Pulau Simeulu masih termasuk Kabupaten Aceh Barat penduduknya mayoritas suku-bangsa Simeulu. Mereka mendiami Kecamatan Simeulu Barat, Simeulu Timur, Salang, dan Kecamatan Tepah Selatan. Pada Kecamatan-kecamatan ini pendatang hanya sebagai pedagang seperti orang Cina, Minangkabau, Pidie, dan orang-orang Aceh lainnya. Mengenai suku-bangsa Simeulu pada kesempatan ini tidak menjadi sample penelitian. Ini memerlukan penelitian tersendiri.

Mobilitas penduduk yang terjadi dalam suku bangsa Aceh, tidak mempunyai kadar yang tinggi, tidak seperti halnya dengan masyarakat Pidie yang dikenal sebagai orang yang suka merantau (2). Hal ini mungkin disebabkan tingkat pendidikan rata-rata pernah duduk di sekolah dasar. Lebih-lebih bagi masyarakat yang bermukim jauh di pedalaman. Bagi masyarakat pedalaman ini

lembaga-lembaga pendidikan formal jarang sekali, hanya beberapa tahun ini selama ada pendirian sekolah-sekolah Inpres lembaga-lembaga pendidikan hampir merata.

Bertani adalah salah satu mata pencaharian hidup yang paling utama bagi masyarakat suku-bangsa Aceh. Ini menentukan arah mobilitas mereka dengan mencari tempat-tempat yang cocok bagi pertanian. Daerah utama yang mereka tuju biasanya ke Aceh Tengah dan Pidie. Mereka jarang sekali menjadi pedagang.

*Gambaran Umum Penduduk pada Lokasi Penelitian.* Jumlah penduduk menurut umur dan kualifikasi pendidikan belum ada sensus. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada lokasi penelitian dapat dilihat pada angka-angka di bawah ini.

#### JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN JAYA MENURUT KEMUKIMAN

N a m a M u k i m	J u m l a h
L a m n o	3.275
L a m m e e	1.755
Keuluahg	2.097
Kuala Daya	1.658
Lambensoi	4.507
Kuala Unga	1.289
Pante Cermin	985
J u m l a h :	15.566

Sumber : Kantor Wilayah Kecamatan Jaya Lamno.

Jumlah penduduk yang terlihat pada tabel tadi merupakan jumlah penduduk asli ditambah dengan jumlah penduduk pendatang. Jumlah penduduk pendatang lebih kurang sebanyak 312 orang. Jadi jumlah penduduk asli sebanyak 15.254 orang. Penduduk asli sebanyak itu sebagian besar bermata pencaharian hidup sebagai petani sawah dan ladang. Kadang-kadang mereka juga

mempunyai kebun cengkeh. Tingkat pendidikan mereka kebanyakan pernah duduk tingkat sekolah dasar seperti pada gambaran umum pada suku-bangsa Aceh umumnya.

Anak-anak yang masih umur sekolah kebanyakan semuanya bersekolah. Lembaga pendidikan tingkat SLP terdapat dua buah, yaitu lembaga pendidikan umum dan agama. Sekolah SMP sudah didirikan sejak tahun 1973, tetapi baru dinegerikan pada tahun 1981. Sekolah SMA sudah didirikan pada tahun 1976, tetapi hingga ini masih swasta. Guru-guru tidak mencukupi, kadang-kadang pada saat-saat tertentu tidak sekolah. Sebaliknya jumlah murid mencukupi sarat sebagai sekolah menengah.

Anak-anak umur sekolah disamping melanjutkan sekolah pada sekolah-sekolah yang ada di daerahnya, ada juga yang pergi melanjutkan ke ibu kota Propinsi Banda Aceh. Dan sebagian besar ada juga yang masuk *Pesantren Budi*, sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang dibangun atas swadaya masyarakat.

Penduduk pendatang sebagaimana yang dikemukakan diatas tadi berjumlah 312 orang. Mereka ini kebanyakan orang-orang Jawa, sebagai tenaga upahan pada kebun-kebun cengkeh. Orang-orang Jawa ini tampaknya tidak ada kecenderungan untuk membuat kebun sendiri sebagai hak milik mereka. Sedangkan areal tanah masih luas untuk itu. Ini mungkin disebabkan modal untuk membangun suatu kebun masih sangat terbatas.

Selain suku-bangsa Jawa, masih ada beberapa suku-bangsa lagi seperti orang-orang Cina ada 4 keluarga dan guru-guru sekolah dasar Inpres yang berasal dari orang-orang Minangkabau dan Aceh Tengah. Sedangkan orang-orang dari Aceh lainnya kebanyakan tidak tinggal menetap disana, kadang-kadang mereka datang untuk berjualan pada *hari pekan* (hari pasar) yaitu pada setiap hari Sabtu.

Penduduk pendatang, datang kedaerah ini sebagai tenaga upahan pada kebun-kebun cengkeh kepunyaan rakyat. Cengkeh sebagai tanaman rakyat yang sedang banyak ditanaman pada saat ini. Selain orang-orang Jawa, mereka sebagai pedagang.

Sebagaimana telah digambarkan pada lokasi penelitian, bahwa penduduk pendatang tidak banyak. Maka pandangan pen-

duduk asli sama saja terhadap penduduk lainnya. Ia tidak menganggap rendah atau tinggi dalam pergaulan sehari-hari.

Suatu ciri yang baik dari perpaduan suku-bangsa ini dapat hormat-menghormati kebiasaan-kebiasaan mereka masing-masing. Disamping itu mereka dapat bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan perorangan seperti menolong tetangga bila dibutuhkan. Pekerjaan menolong seperti ini disebut dengan *meuseuraya*. Akan tetapi *meuseuraya* di ladang atau di sawah mereka sudah mempunyai group-group sendiri seperti group berdasarkan letak sawah yang berdekatan atau tempat tinggal mereka bertetangga.

Hubungan perkawinan antara mereka jarang terjadi. Hal ini disebabkan ada anggapan bila kawin dengan pendatang, status sosial agak menurun. Lebih-lebih bila kawin dengan Jawa atau Cina. Oleh karena itu paling jarang terjadi perkawinan antara mereka dengan pendatang. Dari sejumlah 312 pendatang, hanya baru dua pasang suami-isteri yang terjadi perkawinan antara penduduk asli dengan orang Jawa. Tampaknya orang Jawa yang telah kawin dengan penduduk asli ini merupakan *out group* dari kelompok sosial.

Hubungan pekerjaan antara penduduk asli dengan pendatang ini hanya dapat kita lihat dalam bentuk tolong-menolong baik dalam bidang kematian maupun dalam bidang ekonomi seperti pada *meurseuraya* tadi.

Setiap penduduk mempunyai pekerjaan masing-masing, misalnya dalam bersawah, berladang, berkebun masing-masing mempunyai tempat sendiri sebagai kepunyaannya. Tiap-tiap orang yang mempunyai sawah, ladang, dan kebun yang berdekatan, seakan-akan timbul perasaan harus tolong-menolong bila diantara mereka membutuhkan. Tolong-menolong ini terjadi pada saat membajak disawah, membersihkan sawah, ladang, kebun, menanam padi, menyangi rumput, panen padi dan sampai pada saat melepaskan padi pada tangkainya. Pekerjaan melepaskan padi pada tangkainya ini disebut dengan *ceumeulho*.

Partisipasi sosial penduduk pendatang ini agak besar. Mereka selalu kelihatan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan dalam bidang kemasyarakatan dan agama. Dalam bidang kema-

syarakatan terjadi seperti pada saat kematian, kecelakaan, perkawinan, dan lain-lain lagi. Dalam bidang kematian dan kecelakaan dapat dilihat pada saat ada tetangga yang meninggal mereka turut *keumunjong* (mengunjungi). Dan begitu juga pada saat-saat tetangga mendapat kecelakaan seperti kebakaran, mereka turut datang menunjukkan perasaan berduka cita.

Kedatangan beberapa suku-bangsa ke daerah ini tidak membawa pengaruh yang begitu besar terhadap sikap budaya penduduk asli. Hal ini disebabkan mereka sebagai golongan minoritas, kemudian ditambah lagi mereka tidak bertempat tinggal dalam kelompok-kelompok mereka sendiri, melainkan terpencar-pencar dimana mereka bekerja.

#### LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

*Latar Belakang Sejarah.* Suku-bangsa Aceh bagian Barat Aceh sebagian besar yang mendiami daerah-daerah yang disebutkan diatas tadi, tidak diketahui sejak kapan mereka mendiami daerah-daerah tersebut. Dari kawasan daerah yang mereka diami itu, dahulu sudah pernah berkembang dua negeri yang berpengaruh yaitu negeri Daya di Kecamatan Jaya sekarang, dan negeri Meulaboh di Kecamatan Johan Pahlawan sekarang. Kedua negeri ini mempunyai sejarah yang berlainan dan orang-orang yang mendiaminya mempunyai asal usul yang berbeda.

Menurut cerita, orang-orang daya berasal dari bangsa *Lanun* (3,203) yang datang dari Semenanjung Malaka atau Hindia Belakang. Kemudian bangsa *Lanun* bercampur dengan bangsa-bangsa pendatang seperti dari Aceh Besar, orang-orang Pasai (Kerajaan Islam Pasai). Orang-orang dari Aceh Besar datang kedaerah Daya yang pertama untuk membuka daerah ini menjadi kebun-kebun lada, yang pada saat itu sebagai barang dagangan yang sangat berharga. Kemudian peradaban orang-orang Daya ini berkembang menjadi peradaban Islam sampai sekarang.

Negeri Meulaboh zaman dahulu sering disebut dengan negeri *Pasir Karam*. Negeri ini berkembang dengan pesatnya setelah perang Paderi di Minangkabau. Karena banyak orang-orang Sumatera Barat menghindari diri dari mala petaka perang dengan menyingkir ke bagian Barat Aceh (negeri Pasir Karam). Kemudian

mereka membuka perkebunan lada.

Dari penanaman lada ini makin hari ke hari semakin mendapat perhatian orang dan dapat mengumpulkan migrasi dari Aceh Pidie dan Aceh Besar. Kedua suku-bangsa yang terakhir ini semakin berkembang, maka terciptalah suatu sosial budaya yang kita sebut sosial budaya suku bangsa Aceh bagian Barat. Namun demikian orang-orang yang berasal dari Minangkabau tadi terus pula berkembang. Mereka kebanyakan mendiami Kecamatan Johan Pahlawan, Kaway XVI, dan Kecamatan Kuala.

Latar belakang sejarah pada lokasi penelitian sebagaimana telah disinggung di atas tadi bahwa daerah Jaya Lamno dahulu termasuk negeri Daya. Masyarakatnya mempunyai sikap sosial budaya Islam, karena seluruhnya beragama Islam sebagaimana suku-bangsa Aceh umumnya.

Dilihat dari segi perkembangan sebagai suatu komunitas kecil, tidaklah terlalu maju baik dari segi sikap budaya maupun dari segi sosial lainnya. Hal ini disebabkan daerah ini agak tertutup bagi migrasi, karena lapangan kerja agak terbatas, hanya dari segi pertanian saja. Begitu juga bagi putra-putra daerah yang sudah pergi keluar, jarang sekali untuk pulang ke kampungnya. Oleh karena itu idee modernisasi selalu lamban dari segala bidang.

Dahulu permulaan Kemerdekaan tahun 1950 di daerah ini didirikan sebuah sekolah dasar yang terletak di kota Lamno sekarang. Anak-anak umur sekolah banyak tidak berkesempatan bersekolah, karena sekolahnya jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam beberapa tahun inilah masyarakat merasa sekolah-sekolah sudah mampu menampung anak-anak umur sekolah, dengan didirikannya beberapa buah sekolah.

Pada tahun 1973 sudah didirikan sekolah lanjutan pertama. Akan tetapi baru dinegerikan pada tahun 1978. Kemudian pada tahun 1976 didirikan pula sekolah menengah atas yang berstatus swasta sampai sekarang.

*Sistem Mata Pencaharian.* Uraian tentang mata pencaharian hidup suku bangsa Aceh adalah sama dengan mata pencaharian hidup yang terdapat pada lokasi penelitian. Maka uraian khusus tentang hal itu pada lokasi penelitian tidak diuraikan lagi.

Suku-bangsa Aceh bagian Barat ini umumnya berpencaharian sebagai petani, yaitu petani sawah, ladang, dan kebun. Daerah bagian Barat Aceh ini merupakan daerah dataran rendah, sedikit sekali gunung-gunung. Oleh sebab itu daerah ini baik sekali dijadikan daerah persawahan untuk menanam padi. Padi ditanam setahun sekali. Umumnya belum mempunyai irigasi yang baik. Hanya menurut kemampuan pengairan alam saja.

Tani ladang hanya sedikit sekali yang terdapat di daerah-daerah hutan dan daerah gunung. Hutan-hutan ditebas terlebih dahulu, kemudian dibakar dan baru ditanam padi. Biasanya tempat berpindah-pindah setiap musim tanam. Hal ini disebabkan bila tanah dipakai terus-menerus kesuburan padi akan berkurang dan hasilnya akan sedikit.

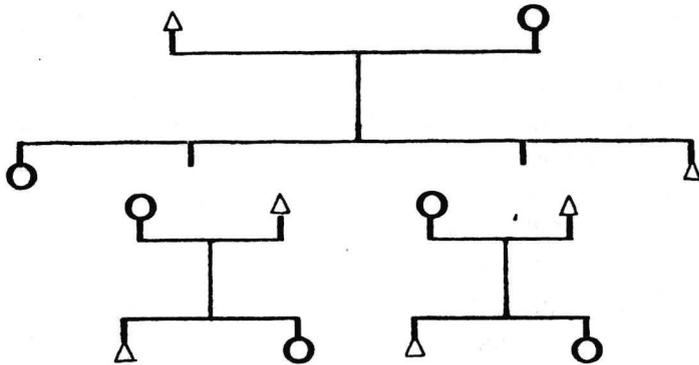
Tani kebun terdiri dari tani cengkeh, karet, dan kelapa. Tani cengkeh banyak terdapat di lokasi penelitian ini, yaitu di Kecamatan Jaya Lamno. Tani karet terdapat di daerah-daerah yang berdataran rendah. Tanaman karet ini merupakan tanaman yang paling banyak ditanami oleh masyarakat, sebagai mata pencaharian kedua setelah bersawah. Kelapa terdapat dipesisir Pantai mulai dari Kecamatan Jaya bagian pantai sampai pada perbatasan Kabupaten Aceh selatan.

*Sistem Kekerabatan.* Sebagaimana suku-bangsa Aceh umumnya, maka suku bangsa Aceh bagian Barat ini menganut pula sistem keluarga batih. Rumah tangga terdiri atas keluarga kecil yaitu ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin. Apabila seseorang anak sudah kawin ia akan mendirikan rumah tangga sendiri dan berdiri pula sebagai keluarga batih. Seseorang yang baru kawin, ia tidak berapa lama menetap dalam keluarga batih ayahnya. Ada yang menetap beberapa bulan saja atau sampai lahir seorang anak. Kemudian baru ia pindah tempat.

Suatu kegiatan dalam keluarga batih, merupakan tanggung jawab bersama maupun masing-masing. Seperti kegiatan pada saat *tron ublang* (turun ke sawah). Ayah sebagai keluarga batih, pergi *men'ublang* (membajak sawah), ibu pergi *bot bijeh* yaitu mencabut bibit di persemaian, dan anak-anak pergi *merapikan ateung* (pematang sawah). Kadang-kadang ada juga suatu peker-

jaan itu dilaksanakan bersama-sama seperti pada saat *seumula* (menanam padi). *Keumeukoh* (menuai padi), dan pada saat *ceumeulho* (melepaskan padi pada tangkai). Begitu pula kalau pergi bekerja di kebun mereka laksanakan bersama-sama. Hasil yang mereka peroleh menjadi hak bersama. Hasil tersebut tidak pernah mereka bagi-bagi. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban pula untuk memelihara semua kekayaan mereka secara bersama-sama pula. Apabila anak-anak mereka sudah kawin, seorang ayah akan memberi sebagian harta *peunulang* (pembelian) kepada anaknya, lebih-lebih untuk anak perempuan.

Suku bangsa Aceh bagian Barat ini mengenal juga keluarga luas dalam bentuk ultrolokal yaitu dalam suatu kelompok perumahan merupakan komplek rumah-rumah yang mempunyai tali keturunan yang sama. Komplek perumahan yang mempunyai tali keturunan yang sama dapat kita lihat seperti bagan dibawah ini :



Komplek perumahan semacam ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Jaya Lamno. Sedangkan ditempat-tempat lain yang didiami oleh suku bangsa Aceh hampir tidak dikenal lagi sistem ultrolokal ini. Antara suatu keluarga dengan keluarga lain merasa diri ada hubungan sebagai suatu keturunan. Hubungan ini dapat kita lihat bila mereka menghadapi masalah-masalah luar. Masalah tersebut secara bersama-sama mereka hadapi, seperti masalah perkawinan. Suatu perkawinan diputuskan oleh para kerabat mereka masing-masing. Begitu juga dengan masalah bencana lainnya.

Seorang kepala keluarga merasa dirinya bertanggung jawab terhadap keluarga batih masing-masing. Tanggung jawab ini tampak mulai dari memelihara anak-anaknya sampai pada memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan akan makan, kebutuhan akan pendidikan dan lain-lain. Karena dilihat dari sudut tanggung jawab ekonomi, sebenarnya terlepas dari ikatan suatu keluarga dengan keluarga lain.

*Sistem Religi.* Suku bangsa Aceh bagian Barat secara mutlak beragama Islam. Kecuali beberapa orang penduduk pendatang yang beragama Kristen yaitu mereka yang tinggal di ibu kota Kabupaten Meulaboh. Penganut agama Islam ini terkelompok ke dalam aliran *kaum tua* dan aliran *kaum muda*. Penggolongan ini bukanlah penggolongan menurut umur kalender, akan tetapi cara mereka mengamalkan ajaran-ajaran agama.

Pengertian secara sempit bahwa kaum muda adalah golongan orang Islam yang mementingkan suruhan-suruhan atau larangan-larangan yang bersifat wajib saja perlu dilakukan. Sedangkan masalah *ijtihad*, bukan satu-satunya *nash* yang harus dilaksanakan. Sedangkan pengertian *kaum tua* adalah golongan orang Islam yang mempunyai pendirian sebagai kebalikan dari *kaum muda*. Perbedaan yang lebih jelas lagi adalah dari sikap mereka terhadap mazhab. Golongan *kaum muda* tidak mau terikat pada salah satu mazhab, sedangkan pada golongan *kaum tua* dengan tegas menyatakan dirinya bermazhab Syafie (4, 8 – 13).

Agama Islam bagi masyarakat Aceh umumnya mendapat tempat yang paling tinggi dan paling mulia dari segala-galanya. Karena menurut pandangan masyarakat Aceh agama dapat mengantarkan manusia ke bahagian dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu anak-anak sejak umur 7 tahun sudah diwajibkan melakukan apa suruhan-suruhan dan larangan-larangan agama.

Dari sikap masyarakat Aceh seperti di atas mungkin salah satu faktor penyebab lahirnya penamaan untuk Aceh sebagai *serambi Mekkah*. Dan faktor ini pula sebagai salah satu ukuran untuk dijadikan daerah Aceh dengan *daerah Istimewa*.

Sikap kesetiaan kepada agama sangat dominan dikalangan masyarakat Aceh. Kadang-kadang kesetiaan yang dominan ini ti-

dak selalu berarti bahwa masyarakat Aceh selalu sebagai seorang *teungku* (kiyai), kadang-kadang mereka pernah tinggal sembahyang atau puasa pada bulan Ramadhan. Sikap kesetiaan ini mungkin pula salah satu alasan bila ada orang yang mengejek mereka dengan kata-kata *kamu kafir*, mereka akan spontan membacok dengan rencong orang yang mengejek mereka tadi. Perkataan *kafir* mempunyai arti diluar agama.

Sikap kesetiaan kepada agama ini tercermin pula dalam hubungan antara mereka. Bila berjumpa antara seorang dengan orang lain atau sejumlah orang, maka perkataan pertama didahului dengan *assalamualaikum*, sebagai alat untuk memperlancar komunikasi. Apabila seseorang tidak mengucapkan terlebih dahulu dengan *assalamualaikum*, maka agak sukar untuk berkomunikasi dengan mereka. Pada rapat-rapat tertentu atau resmi orang yang mengucapkan pidato selalu dimulai dengan *assalamualaikum*, yang mempunyai arti sejahteralah kamu.

Disamping mereka sangat setia kepada agama timbul pula kepercayaan kepada yang gaib dan kekuatan sakti dalam masyarakat. Seseorang ulama yang telah meninggal, seakan-akan mempunyai kekuatan untuk menyampaikan seluruh permintaan mereka kepada Tuhan. Maka banyaklah orang-orang *mekaoi* (bernazar) kepada ulama yang sudah meninggal itu. Pekerjaan ini selalu kita temui hampir pada setiap kuburan ulama, kadang-kadang pada hari-hari tertentu yang sudah diatur oleh orang yang menjaga kuburan.

Kepercayaan kepada yang gaib ini masih tampak pula dalam bentuk kegiatan *tulak bala* (menolak bahaya). Apabila suatu penyakit yang menyerang secara massal seperti penyakit wabah, maka masyarakat secara bersama-sama melakukan *tulak bala* pada tempat-tempat tertentu seperti pada *kuala krung* (muara sungai) atau dibawah pohon-pohon besar. Akan tetapi pekerjaan seperti ini sudah agak menipis. Dalam bentuk *kenduri blang* (kenduri sawan) dan *kenduri padee* (kenduri padi), mempunyai arti untuk menghormati roh padi agar panen baik. Hal ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat.

*Bahasa.* Dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi oleh suku bangsa Aceh ini adalah bahasa Aceh. Bahasa ini tidak mempunyai huruf tersendiri, ditulis dengan

memakai huruf Arab Jawoi (tulisan Arab berbunyi Melayu), huruf yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Dilihat dari sejumlah kata-kata dalam bahasa Aceh ini ada kaitannya dengan bahasa Arab Persi dan India, disamping merupakan rumpun Melayu Polynesia atau Austronesia.

Bahasa Aceh mempunyai logat yang berbeda-beda, atau sering juga disebut mempunyai dialek yang berbeda. Perbedaan dari segi dialek ini dapat kita bagi kedalam :

- a. Dialek yang terdapat di Kecamatan Jaya Lamno.
- b. Dialek yang terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan, Kaway XVI, dan Kecamatan Kuala. Dialek di daerah ini bercampur dengan dialek Minangkabau, namun pun ucapan dalam bahasa Aceh.
- c. Dialek selain dari a dan b diatas. Khususnya di Daya Kecamatan Jaya Lamno berkembang pula suatu bahasa lain yang disebut dengan bahasa Daya. Bahasa ini hanya didukung oleh sejumlah kecil orang saja yaitu dalam kampung Kuala Daya. Akan tetapi umumnya masyarakat Kecamatan Jaya Lano mengerti ucapan bahasa tersebut.

## BAGIAN II. BENTUK KOMUNITAS

### CIRI-CIRI SEBUAH KOMUNITAS KECIL.

Kehidupan suku-bangsa Aceh dalam suatu *gampong*, merupakan satu kesatuan sebagai suatu komunitas kecil. Maka komunitas kecil dalam suku-bangsa Aceh adalah *komunitas gampong* (desa). Batas suatu komunitas kecil dengan komunitas kecil lainnya adalah batas alamiah seperti sungai, gunung dan lain-lain. Disamping itu masih ada lagi batas menurut perjanjian dahulu antara suatu komunitas dengan komunitas lain yang berbatasan. Batas-batas menurut perangkat adat hampir tidak dapat dibedakan. Karena pada suku-bangsa Aceh umumnya beradat-istiadat Aceh, yang hampir rata-rata terdapat pada setiap komunitas.

Suku-bangsa Aceh bagian Barat ini, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Batas ini bukan merupakan batas perangkat adat. Sebab masyarakat yang mendiami Aceh Besar mempunyai sikap budaya dan adat-istiadat yang sama dengan masyarakat di Aceh Barat (suku Aceh bagian Barat). Bahagian Selatan berbatasan dengan Aceh Selatan yang ditandai oleh perangkat adat, yaitu antara adat Aceh dengan adat Aneuk Jamee.

Tanda-tanda pengenalan suatu komunitas disebut dengan legitimasi. Suku bangsa Aceh bagian Barat tidak mengenal legitimasi perangkat adat yang berlaku, misalnya pengakuan suatu komunitas berdasarkan anutan suatu adat tertentu. Tanda-tanda pengenalan pada suku-bangsa ini dapat dilihat, bahwa dalam suatu komunitas paling sedikit ada sebuah *menasah*, sebagai tempat bermusyawarah masyarakat desa, di samping sebagai tempat bersembahyang dan pengajian anak-anak.

Dalam komunitas kecil ini dapat pula dilihat adanya persatuan yang kokoh dalam menghadapi masalah-masalah pedesaan. Masalah pedesaan dapat berupa masalah individu. Masalah bersama misalnya dalam bentuk *gotong-royong gampong*, membersihkan kampung, membuat saluran pengairan dan lain-lain lagi. Masalah yang bersifat individu misalnya bila ada seseorang anak desa membuat ricuh atau berkelahi dengan anak desa lainnya, maka kedua pim-

pinan desa itu bersama-sama mencari jalan perdamaian.

Bentuk bangunan sebagai tempat tinggal dan bangunan untuk kepentingan umum, menunjukkan ciri-ciri atribut masyarakat Aceh. Rumah sebagai tempat tinggal, berbentuk memanjang, di atas panggung dan biasanya terdiri atas beberapa *serambi* (ruang). Atap terbuat dari daun rumbia yang sudah dianyam. Dibawah rumah sering disimpan *berandang padi* dan *kayu api*. Sedangkan pada bangunan untuk kepentingan umum seperti *menasah* tidak mempunyai *serambi*.

Semua bentuk bangunan-bangunan itu selalu melintang arah perjalanan mata hari. Mata hari bergerak dari arah Timur ke Barat, dan bangunan bentuk memanjang dari utara ke selatan. Bentuk seperti ini mempunyai makna tertentu dalam sistem berpikir masyarakat, misalnya mudah rezeki, tidak sering datang bahaya dan sebagainya. Begitu juga kuburan-kuburan memanjang dari utara ke selatan dan menghadap ke barat (kiblat).

## STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Masyarakat desa sebagai bentuk komunitas kecil, merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar lagi yaitu suku-bangsa Aceh bagian Barat. Di antara komunitas-komunitas ini tidak jelas komunitas mana yang dapat dianggap komunitas induk, baik dilihat dari segi budaya maupun dari segi sosial lainnya.

Apabila dilihat dari sudut asal mula suku-bangsa Aceh di bagian Barat, maka komunitas ini berinduk pada suku bangsa Aceh yang berada di Aceh Besar. Karena mereka berasal dari daerah Aceh Besar. Kemungkinan kedua mereka berinduk dari suku bangsa Aneuk Jamee atau Minangkabau, karena sebagian mereka berasal dari sana. Kemungkinan ini memerlukan penelitian khusus. Tetapi dilihat dari segi alat-alat atribut seperti atribut yang dipergunakan dalam perkawinan adalah akulturasi dari keduanya.

## PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL.

### Sejarah Pertumbuhan

Komunitas kecil masyarakat desa di Aceh disebut dengan *gampong*. Komunitas ini berstatus suatu *kegecikan* (desa). Sejarah terbentuknya komunitas *gampong* sebelum penjajahan Belanda

merupakan perluasan areal tempat tinggal. Perluasan ini ada hubungan erat dengan areal pertanian. Oleh karena itu perluasan areal tempat tinggal ini selalu menjadi patokan kepada luas tempat bercocok tanam sebagai mata pencaharian hidup masyarakat.

Pada zaman penjajahan Belanda *gampong* dibangun lagi secara administratif. Kalau dahulu mereka belum mengerti mengatur komunitas secara teratur, karena belum ada sistem administrasi, maka setelah Belanda datang, semua sudah diatur secara teratur. Sistem pemerintahan yang sudah teratur ini tidak mendapat pembinaan lagi setelah datang pemerintahan Jepang selama tiga setengah tahun.

Setelah Indonesia merdeka *gampong* dibangun kembali secara teratur. Pembangunan ini berkelanjutan terus, hingga dalam zaman pembangunan ini, tiap-tiap kampung sudah mempunyai balai desa yang dalam kegiatannya dipergunakan sebagai kantor desa.

#### Aparatur Pemerintahan.

Tiap-tiap *gampong* yang berstatus *kegecikan* diperintah oleh seorang kepala kampung yang disebut dengan *Geucik*. Gabungan beberapa *gampong* disebut dengan *mukim* yang dipimpin oleh seorang *kepala mukim*. Daerah kemukiman disini tidak dipandang sebagai komunitas kecil, karena status kemukiman sebagai koordinator, terhadap beberapa *gampong* yang berada dalam wilayah kekuasaannya.

Tiap-tiap *geucik* bertanggung jawab terhadap *gampongnya*. Tanggung jawab ini ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat ke luar. Tanggung jawab ke dalam menyangkut seluruh kesejahteraan hidup warga komunitasnya. Tanggung jawab ini sangat kompleks termasuk pertengkaran suami-istri, dan lain-lain masalah dalam *gampong*. Di sinilah letak kebijaksanaan seorang *geucik gampong*. Dalam memilih *geucik* selalu dilihat dari segi keturunan, pandai, dan kekayaannya. Rupanya unsur kekayaan di sini sangat menentukan juga, karena bila diangkat orang-orang yang tidak berkecukupan, ia tidak banyak mempunyai kesempatan untuk mengurus masalah-masalah yang sangat kompleks tadi. Apalagi *geucik* hingga sekarang belum ada perhatian pemerintah untuk disamakan sebagai pegawai negeri, artinya tidak mendapat gaji.

Tanggung jawab keluar seorang *geucik* sangat pula beraneka corak, termasuk hubungan antara *gampong* - nya dengan *gampong* lain. Masalah prestasi dapat dilihat dari segi keinginan bersaing dalam arti positif, seperti berlomba-lomba ingin membangun *menasah* yang lebih baik, jalan, dan irigasi, yang lebih teratur. Dari tanggung jawab ini timbullah suatu anggapan bahwa maju atau tidaknya suatu *gampong* sangat tergantung pada *geucik*- nya.

### Hubungan Vertikal

Tingkat pemerintahan *gampong* merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah. Di atas ini masih ada gabungan beberapa *gampong* yang disebut dengan *mukim* yang diperintah oleh seorang *kepala mukim*. Gabungan beberapa *kemukiman* menjadi kecamatan yang diperintah oleh seorang camat.

Hubungan vertikal antara aparat-aparat pemerintahan ini dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas mereka masing-masing. Seorang camat biasanya memberi perintah kepada *kepala mukim*. *Kepala mukim* memerintahkan pada *geucik*. Kadang-kadang dalam pelaksanaannya tidak jarang pula seorang camat langsung mengontrol *geucik* bersama-sama dengan *kepala mukim*. Bila ada gotong-royong *gampong*, *geucik* mempunyai aktivitas untuk mengontrol anggotanya.

### LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM KOMUNITAS KECIL.

Lembaga-lembaga sosial dalam bidang ekonomi yang paling menonjol adalah dalam bentuk gotong-royong. Kegiatan ini merupakan cara kerja sama antara sejumlah besar warga *gampong* untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan umum atau kepentingan seseorang warga *gampong*. Kegiatan ini termasuk tolong-menolong, dan kerja bakti.

Kegiatan dalam bentuk tolong-menolong hasilnya bukan ditujukan untuk kepentingan bersama, akan tetapi untuk kepentingan orang yang ditolong. Tentunya pekerjaan ini dilakukan secara berbalas-balasan antara sesama mereka. Kegiatan dalam bentuk kerja bakti, hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Lembaga-lembaga sosial tersebut diatas dipimpin oleh *geucik gampong*. Anggota-anggotanya adalah semua warga *gampong*.

Seorang *geucik* berperan mengumpulkan anak buah desanya sambil bekerja bersama-sama. Di sini tidak terlihat hubungan vertikal yang tegas antara pimpinan dengan anggotanya.

### BAGIAN III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

#### PELAPISAN SOSIAL MASA YANG LALU.

Dahulu sebelum Indonesia merdeka dasar pelapisan sosial pada suku-bangsa Aceh bagian Barat ini adalah sifat keaslian dan keturunan seseorang. Di dalam suatu *gampong* selalu ada orang-orang yang dianggap asli atau orang yang mula-mula membuka *gampong* itu. Orang-orang seperti ini mendapat kedudukan tertentu dalam masyarakat sebagai penduduk inti. Sedangkan penduduk pendatang seakan-akan sukar untuk mempunyai kedudukan tertentu. Penduduk pendatang ini disebut dengan *ureung tamong*. Maka lahirlah suatu semboyan bagi masyarakat ini "buya krung *teuddngdng*, *buya tamong meuraseuki*" (penduduk asli melihat saja, sedangkan pendatang mendapat rezeki). Semboyan ini mempunyai arti rasa khawatir bila orang-orang pendatang menggantikan status orang-orang asli.

Dasar keturunan merupakan dasar yang paling kuat untuk mempertahankan kedudukan dalam lapisan sosial. Seseorang yang mempunyai keturunan seperti *ulaibalang*, *teuku* (bangsawan), maka keturunannya mendapat tempat tertentu dalam pandangan masyarakat. Begitu juga jabatan-jabatan penting selalu dilimpahkan kepada keturunan *ulaibalang* oleh masyarakat. Kepada keturunan-keturunan ini sebagai suatu lapisan, selalu dipanggil dengan sebutan *ampon* kepada yang laki-laki, dan *cut* kepada yang perempuan. Keturunan ini dahulu jarang terjadi perkawinan dengan masyarakat biasa. Sedangkan kekuasaan sudah ada pada keturunan *ulaibalang*. Karena antara keturunan dan kekuasaan bersama-sama ada pada *ulaibalang*.

Struktur pelapisan sosial pada suku-bangsa bagian Barat dapat dilihat pada suatu komunitas *gampong*. Struktur ini mempunyai 4 lapisan yaitu lapisan bangsawan, ulama, hartawan, dan lapisan rakyat biasa. Lapisan bangsawan adalah lapisan *ulaibalang* dan keturunan-keturunannya. Lapisan ini menduduki tempat yang baik pada masa sebelum dan hingga zaman penjajahan Belanda. Kekuasaan-kekuasaan dalam pemerintahan sebagian besar berada ditangan golongan ini.

Lapisan ulama berasal dari rakyat biasa. Karena menguasai pengetahuan agama, maka seseorang termasuklah kepada lapisan ini. Dengan demikian seseorang akan mudah berubah status sosial. Lapisan ini menempati tempat kedua setelah lapisan bangsawan. Kalau lapisan bangsawan berperanan dibidang pemerintahan dan adat-istiadat, maka lapisan ulama berperanan dibidang agama.

Lapisan hartawan terdiri dari pengusaha-pengusaha seperti pengusaha kebun, peternak, pedagang, dan lain-lain. Pengusaha kebun seperti kebun cengkeh, karet timbul dengan pesatnya setelah Indonesia merdeka. Sejalan dengan timbulnya pengusaha-pengusaha, pesat pula pertumbuhan pedagang-pedagang. Mereka terdiri dari pedagang karet, cengkeh, beras, dan beberapa bidang sandang lainnya. Pedagang sandang dan pangan biasanya berusaha di pusat-pusat Kecamatan, atau pada *hari-hari pekan* (pasar).

Lapisan rakyat biasa kebanyakan mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lapisan ni kadang-kadang dengan mudah dapat mengalihkan derajatnya kedalam lapisan pengusaha. Hal ini sangat tergantung kepada keuletan bekerja.

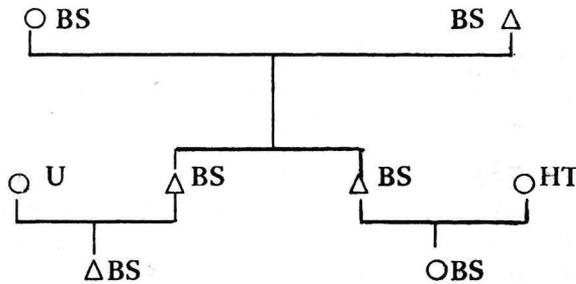
Lapisan bangsawan adalah lapisan pemegang kekuasaan pada zaman sebelum dan semasa penjajahan Belanda. Status bangsawan ini dapat diturunkan kepada keturunan, walaupun tidak memegang kekuasaan. Gelar-gelar yang dipakai pada lapisan ini dapat dilihat pada panggilan. Untuk laki-laki dipanggil dengan *ampon*, untuk perempuan dengan *cut* atau *cut nyak* bagi orang yang sudah kawin.

Lapisan ulama yang berperanan dibidang agama terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Lapisan ini tidak berdasarkan keturunan, maka seseorang akan mudah mencapai lapisan ini, asal saja sudah mempunyai pengetahuan agama yang cukup. Gelar yang dipakai juga terlihat dalam panggilan yaitu dipanggil dengan *teungku*.

Lapisan hartawan adalah orang-orang yang mempunyai harta benda yang melebihi dari orang-orang lain. Lapisan ini tidak mempunyai harta benda yang melebihi dari orang-orang lain. Lapisan ini tidak mempunyai gelar tertentu. Sedangkan lapisan rakyat biasa adalah orang-orang biasa. Dan lapisan ini tidak mempunyai gelar tertentu.

Hubungan kekerabatan yang terjadi antar lapisan karena perkawinan sering terjadi antara lapisan bangsawan dengan lapisan ulama. Hubungan ini biasanya laki-laki dari pihak bangsawan dan perempuan dari pihak ulama. Begitu juga hubungan perkawinan dengan lapisan hartawan. Kemudian kadang-kadang laki-laki di pihak ulama sering kawin dengan perempuan di pihak hartawan.

### HUBUNGAN PERKAWINAN



Keterangan :

- Δ = laki-laki.
- = perempuan
- BS = bangsawan
- HT = hartawan
- U = ulama

Di atas dapat kita lihat perkawinan antara laki-laki bangsawan dengan perempuan di pihak ulama ataupun hartawan. Akan tetapi bila seorang perempuan keturunan bangsawan kawin dengan laki-laki bukan bangsawan, maka anaknya tidak lagi mendapat gelar bangsawan.

Perkawinan antara seorang laki-laki dari lapisan ulama dengan perempuan lapisan hartawan, tidak menentukan anaknya itu bergelar ulama atau hartawan, dan begitu juga sebaliknya. Perkawinan antara seorang laki-laki bangsawan dengan seorang

perempuan berketurunan biasa jarang sekali terjadi. Lain halnya perkawinan dari seorang lapisan ulama atau hartawan dengan rakyat biasa sering terjadi.

Hubungan tetangga antar lapisan dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai komunitas kecil. Lapisan bangsawan seakan-akan mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada rakyat biasa. Pertolongan ini dapat berbentuk materil dan non-materil. Biasanya seorang bangsawan seperti pada lokasi penelitian mempunyai harta benda yang cukup, tentunya sebagian dari harta bendanya itu dapat dipinjamkan kepada warga desanya. Begitu juga lapisan ulama mempunyai hubungan yang baik dengan lapisan bangsawan dan rakyat biasa. Hubungan ini lebih-lebih terjadi dalam hubungan dengan keagamaan.

Hubungan pekerjaan dapat dilihat dalam bentuk-bentuk kerja sama, seperti dalam bentuk gotong-royong, kematian, pesta perkawinan dan lain-lain. Akan tetapi masih dapat pula kita lihat hubungan yang vertikal antara mereka. Lapisan bangsawan dan ulama biasanya sebagai orang yang memimpin kegiatan-kegiatan seperti diatas, sedangkan lapisan lain adalah lapisan tenaga pekerja inti.

Dalam masalah keagamaan lapisan ulama memegang peranan penting. Sedangkan lapisan lain merupakan pendukung maupun sebagai tenaga inti untuk melaksanakan pekerjaan itu. Andai kata orang-orang yang berpengetahuan keagamaan tidak hadir pada kegiatan tersebut, maka kegiatan itu mungkin tidak dapat dilakukan, misalnya dalam menyelesaikan penguburan.

Setelah Indonesia merdeka lapisan-lapisan sosial pada lokasi penelitian seperti di atas masih juga tampak, akan tetapi tidak kita jumpai lagi perbedaan-perbedaan yang tajam. Susunan orang-orang yang memerintah sudah berubah, sudah ada dari berbagai lapisan yang menduduki fungsi pemerintahan, mulai dari susunan pemerintahan yang paling bawah sampai kepada susunan pemerintahan yang tertinggi.

Dengan berkembang beberapa lembaga-lembaga pendidikan umum seperti SD, SLP, dan SLA, dan lembaga-lembaga pendidikan agama seperti MIN, MTSAIN, dan Aliyah, begitu juga dengan pesantren-pesantren semakin bertambah, maka semakin mendorong proses perubahan lapisan sosial.

Lapisan orang-orang biasa dapat meningkatkan status sosial ke dalam lapisan ulama atau menduduki fungsi pemerintahan di atas tadi, maupun pada ilmu pengetahuan pendidikan diluar daerahnya seperti ke Banda Aceh. Mereka sudah banyak menduduki tingkat perguruan tinggi.

Proses perubahan ini dilandasi pula oleh hubungan komunikasi semakin membaik. Jalan-jalan semakin baik yang selama ini dibangun baik atas swadaya masyarakat maupun atas inisiatif pemerintah. Jalan-jalan desa yang menghubungkan rumah-rumah dengan sekolah sudah lancar. Faktor ini akan memperlancar juga proses perubahan.

Dari proses perubahan sosial di atas, maka lahirlah lapisan-lapisan sosial baru. Pada dasarnya lapisan-lapisan sosial lama, masih tetap ada, tetapi sudah mengalami perubahan yang sangat tajam. Setelah mengalami perubahan-perubahan maka lapisan sosial yang dapat kita lihat di lokasi penelitian adalah :

- a. Lapisan bangsawan.
- b. Lapisan penguasa, yaitu penguasa pemerintahan dan pegawai negeri.
- c. Lapisan ulama
- d. Lapisan hartawan
- e. Lapisan rakyat biasa.

#### PELAPISAN SOSIAL MASA KINI.

Dasar pelapisan sosial masa kini, sama dengan dasar pelapisan sosial masa lalu. Pelapisan ini didasarkan kepada keaslian, keturunan, kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian. Akan tetapi dasar kekuasaan dengan kekayaan lebih kuat menciptakan pelapisan sosial, bila dibandingkan dengan dasar-dasar lain. Seseorang akan menilai orang lain dari lapisan mana. Di lokasi penelitian lapisan kekuasaan merupakan orang-orang pendatang. Lapisan ini hampir sama kedudukannya dalam status sosial.

Setelah Indonesia merdeka, pelapisan sosial pada suku-bangsa Aceh di bagian Barat, adalah seperti yang telah disebutkan tadi yaitu :

- a. Lapisan bangsawan yaitu yang dapat diturunkan kepada ke-

turunannya.

- b. Lapisan penguasa yaitu mereka yang mempunyai fungsi dalam pemerintahan. Lapisan ini tidak dapat diturunkan kepada keturunannya.
- c. Lapisan ulama adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang agama.
- d. Lapisan hartawan adalah orang-orang yang mempunyai harta benda yang melebihi dari orang lain.
- e. Lapisan rakyat biasa adalah orang-orang kebanyakan selain dari lapisan di atas tadi.

Pengaruh lapisan bangsawan hingga saat sekarang masih dominan dalam masyarakat Aceh bagian Barat. Pengaruh ini sangat terasa pada lokasi penelitian. Namun lapisan ini sudah tidak memegang peranan dalam fungsi pemerintahan secara resmi. Selain pada lokasi penelitian kadang-kadang kita jumpa pengaruh lapisan ini sudah agak lemah. Hal ini ditandai dengan sudah banyak terjadi perkawinan antara bangsawan dengan orang-orang biasa.

Lapisan pengusaha merupakan lapisan baru yang lahir setelah Indonesia merdeka. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai fungsi dalam pemerintahan. Dari segi anggapan masyarakat, lapisan ini mempunyai kedudukan yang mulia, mereka dapat pula menentukan kebijakan-kebijakan dalam komunitasnya. Ia dianggap oleh masyarakat sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintahnya.

Lapisan ulama masih tetap berperan dibidang keagamaan. Tampaknya lapisan ini sangat menentukan di dalam masyarakat. Ia seakan-akan sebagai penghubung antara manusia dengan tuhan. Kenyataan ini dapat dilihat pada saat-saat orang melepaskan nazar pada seseorang ulama, dengan harapan agar sembuh dari penyakit, mudah rezeki dan sebagainya. Kenyataan ini dapat kita lihat pada ulama-ulama yang dianggap *peuramat* oleh masyarakat.

Lapisan hartawan semakin mendapat tempat yang baik pula di samping lapisan-lapisan lain. Karena lapisan ini akan dengan mudah mengalihkan ke dalam lapisan lain seperti ke dalam lapisan penguasa. Mereka karena mampu menyekolahkan anak-anaknya, tentu dengan sendirinya, anaknya nanti akan menjadi seorang

penguasa, dengan menjabat sesuatu fungsi dalam pemerintahan.

Lapisan rakyat biasa merupakan lapisan mayoritas. Lapisan ini akan dengan mudah pula beralih ke dalam lapisan penguasa, ulama, dan hartawan. Karena ketiga lapisan tersebut bukan didasarkan kepada keturunan seperti pada lapisan bangsawan. Pengalihan ini menuntut kemampuan yang tinggi baik penguasaan pengetahuan maupun kekayaan, supaya menjadi orang hartawan.

Hubungan perkawinan antar lapisan pada zaman sekarang sudah sering terjadi. Lapisan bangsawan sudah banyak kawin dengan orang-orang dari lapisan ulama, penguasa, hartawan, dan rakyat biasa. Hubungan perkawinan ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan dari pihak bangsawan. Begitu juga antar lapisan yang lain.

Sebagai akibat hubungan perkawinan yang demikian, kemungkinan terjadi pelapisan yang tajam antar lapisan akan berkurang. Kenyataan ini sudah banyak terjadi pada orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan perkotaan seperti orang-orang yang berada di sekitar kota Meulaboh. Hal ini mungkin arus modernisasi dapat mempengaruhi pola berpikir mereka.

Hubungan tetangga yang terjadi dalam kehidupan suku Aceh bagian Barat pada dasarnya sama dengan hubungan tetangga pada masa yang lalu seperti yang sudah dijelaskan pada halaman terdahulu.

Hubungan dalam bidang pekerjaan pada dasarnya juga sama dengan hubungan yang telah digambarkan pada masa yang lalu. Hanya saja pada masa sekarang, pada mereka tampak merasa mempunyai tanggung jawab penuh atas suatu pekerjaan, misalnya dalam bentuk gotong-royong desa. Kalau dahulu aktivitas gotong-royong harus diturunkan dari pimpinan seperti dari lapisan bangsawan sebagai orang yang mempunyai fungsi dalam pemerintahan pada saat itu. Sekarang aktivitas gotong-royong itu tidak semata-mata harus diturunkan dari penguasa. Banyak aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan sendiri seperti membersihkan mesjid, membuat jalan, saluran air dan lain-lain.

## BAGIAN IV. PIMPINAN MASYARAKAT

### GAMBARAN UMUM

Pimpinan tradisional adalah pimpinan pada masa yang lalu. Pimpinan masa kini adalah pimpinan yang terdapat pada masa kini. Kedua macam pimpinan ini merupakan gabungan yang terdapat pada pimpinan-pimpinan masa kini. Kedua macam pimpinan ini dapat dilihat dari segi bentuk, sifat, peranan, dan pengaruhnya dalam suatu komunitas.

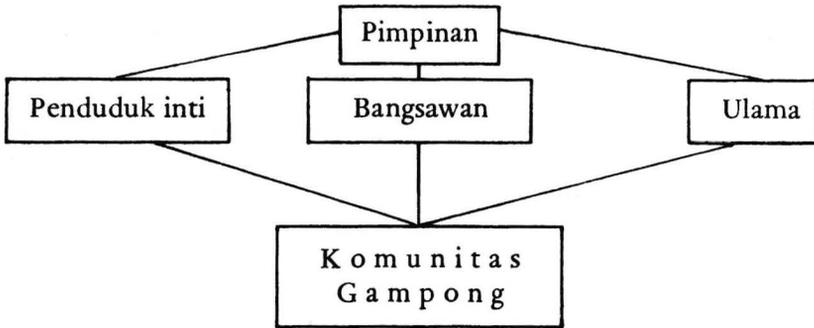
Pada suku-bangsa Aceh bagian Barat pimpinan tradisional ditemui dalam bentuk *pimpinan mencakup* yaitu tidak hanya dalam lapangan yang terbatas saja, tetapi sebagian besar dari lapangan kehidupan masyarakat. Pimpinan ini berasal dari kerabat yang berketurunan dari penduduk pertama dari sesuatu *gampong*, sebagai pembuka tanah hutan dahulu hingga menjadi sawah dan *gampong*. Disamping pimpinan berdasarkan keturunan dari penduduk pertama sebagai penduduk inti, pimpinan informal masih kita temui pula pengaruhnya dalam masyarakat yaitu dari lapisan bangsawan dan ulama.

Pimpinan mencakup ini dianggap oleh masyarakat mempunyai hak yang lebih dari orang lain dalam kehidupan. Kadang-kadang pemilihan *geucik* dan *kepala mukim* sering didasarkan kepada keturunan dari pimpinan ini. Maka seorang *geucik* atau *kepala mukim* di samping sebagai pimpinan dalam masyarakat, ditambah lagi dengan tugas sebagai wakil dari pemerintah. Oleh sebab itu ia sangat kompleks tugasnya, berperan menjadi pimpinan formal sebagai wakil pemerintah, dan berperan juga menjadi pimpinan informal sebagai pengemban liku-liku kehidupan masyarakat desanya.

### S t r u k t u r

Pimpinan formal maupun informal seperti diatas tadi sering menghadapi masalah yang sangat kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari pimpinan informal selalu menghadapi masalah-masalah tadi secara bersama-sama. Di sini tampak sesuatu masalah tidak menjadi tanggung jawab seseorang, akan tetapi secara bersama-

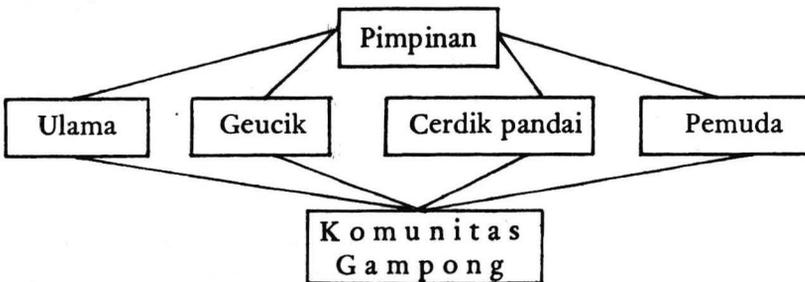
sama dihadapi. Struktur kerja sama pimpinan informal dalam suatu *komunitas gampong* yang terdapat pada lokasi penelitian adalah seperti dibawah ini :



Pada dewasa ini unsur pimpinan informal dan pimpinan formal dalam suatu *komunitas gampong* sudah tergabung ke dalam unsur *tuha peut*, <sup>+)</sup>  yaitu :

- Geucik* sebagai pimpinan formal
- Ulama sebagai pimpinan informal
- Pemuda sebagai pimpinan informal
- Cerdik pandai sebagai pimpinan informal, yang mewakili dari penduduk inti dan bangsawan.

Pola kepemimpinan *tuha peut* ini dapat seperti dibawah ini :



- <sup>+)</sup>  Ada variasi dalam struktur kepemimpinan dalam Komunitas lain di Aceh, lihat misalnya Teuku Syamsuddin (1971 : hlm. 238).

## PIMPINAN TRADISIONAL

### Pimpinan Formal

Yang dimaksud sebagai pimpinan formal disini adalah pimpinan yang secara resmi memangku jabatan dalam pemerintahan. Dalam komunitas *gampong* pimpinan yang formal adalah *geucik*. Dan gabungan beberapa komunitas *gampong* disebut dengan *mukim*. Dalam suatu *mukim* terdapat seorang pimpinan formal yang disebut *kepala mukim*. Kedua unsur pimpinan ini, tidak mempunyai gelar seperti gelar yang diperoleh oleh lapisan bangsawan. Sebagai panggilan kepada *geucik* disebut dengan pak *geucik*, dan kepada kepala mukim disebut dengan pak *mukim*.

Seorang *geucik* memimpin sebuah *gampong* (desa). Ia mengurus bidang-bidang sosial dalam kehidupan *gampong*. Bidang-bidang sosial ini mencakup urusan gotong-royong desa, upacara-upacara kematian dan termasuk baik antara sesama warga desa. Di sini *geucik* berfungsi sebagai koordinator atas warga desanya. Seorang kepala mukim juga berfungsi mengkoordinir beberapa kampung yang berada di bawah kekuasaannya. Seorang *geucik* tunduk kepada *kepala mukim* selaku koordinator.

Syarat-syarat menjadi pimpinan formal sebagai *geucik* dan *kepala mukim* adalah :

- a. Berketurunan seperti yang terdapat pada uraian diatas.
- b. Kejujuran
- c. Kepandaian
- d. Kekayaan.

Faktor-faktor yang dianggap mendukung kepemimpinan ini adalah faktor popularitas dan wewenang. Di antara dua faktor ini faktor wewenang sangat menentukan yang terujud ke dalam bentuk *charisma*. Faktor ini lahir dari syarat keturunan yang merupakan syarat penting dalam memilih seorang pimpinan. Faktor popularitas mempunyai sifat-sifat pemimpin yang disenangi dan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kedua faktor tersebut biasanya harus melekat pada seorang pimpinan, pada masyarakat Aceh bagian Barat ini.

Bila kita bandingkan antara kewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhi oleh pimpinan formal ini dengan hak-hak yang ia peroleh, maka sangat menyedihkan. Seorang *geucik* atau *kepala mukim*, tidak pernah mendapat gaji yang setimpal dengan pekerjaannya. Sedangkan kewajiban memimpin masyarakat terlalu komplek sifatnya. Bahkan hingga saat ini mereka tidak dihitung sebagai pegawai negeri.

Pengangkatan pimpinan ini tidak dilakukan dengan upacara adat. Cara pengangkatan dilakukan dengan cara musyawarah dalam komunitas tersebut. Begitu juga atribut-atribut pada tiap-tiap pimpinan itu tidak pernah lagi kita temui.

Hubungan antara unsur pimpinan formal dengan informal dapat dilihat pada bagian lain. Hubungan kedua unsur pimpinan ini dengan masyarakat sangat intim. Hal ini mungkin disebabkan atas dasar pengangkatan yang memenuhi syarat-syarat yaitu seorang yang berketurunan, jujur, dan pandai.

#### *Pimpinan informal*

Pimpinan informal bukanlah pimpinan fungsional di dalam masyarakat, sebagai yang memegang fungsi pemerintahan. Pimpinan ini terdiri dari ulama dan bangsawan. Pimpinan ulama digelar dengan *teungku* atau *ustaz*, mempunyai kepemimpinan dibidang agama. Pimpinan informal bangsawan diberi gelar dengan sebutan *ampon* atau *teuku* bagi laki-laki dan *cut* atau *cut nyak*, bagi perempuan. Gelar ini dapat diturunkan kepada keturunannya, kecuali gelar ulama. Pimpinan informal dari bangsawan ini bergerak dalam bidang adat-istiadat dan seluruh kegiatan sosial lainnya.

Ulama sebagai pimpinan informal, lokasi kepemimpinannya tidak saja dalam *komunitasnya*, tetapi dapat meluas ke dalam *komunitas-komunitas* lainnya. Semakin mendalam pengetahuan seorang ulama, semakin populer dalam masyarakat, dan semakin luas pula kepemimpinannya. Akan tetapi seorang bangsawan popularitasnya tidak berdasarkan kepada pengetahuan, ia populer karena keturunan, yang kemudian didukung oleh kejujuran, dan bijaksana. Daerah kepemimpinannya menjadi luas apabila seseorang bangsawan dapat memelihara kejujuran dan bijaksana.

Kedua unsur kepemimpinannya tadi tidak mempunyai syarat

yang terlalu berat, asal saja syarat-syarat utama yaitu keturunan bagi bangsawa, dan pengetahuan agama bagi ulama, sedangkan syarat-syarat pendukung lainnya akan datang dari masyarakat. Karena faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan seperti dengan faktor populatitas akan diberikan oleh mayarakat, karena dipandang mempunyai suatu sifat yang disenangi dan yang di-cita-citakan.

Dalam pola kepemimpinan informal hal-hal yang menyangkut dengan hak, dan kewajiban tidak jelas. Karena tidak jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Pimpinan informal, ulama dan bangsawan, tidak pernah diangkat secara resmi. Juga yang menyangkut dengan atribut-atribut tidak ada.

Hubungan antara pimpinan informal ini dengan pimpinan formal sama seperti hubungan di dalam pimpinan formal tersebut diatas, begitu pula hubungan dengan masyarakat.

#### PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan dalam komunitas *gampong* masa kini, merupakan kelanjutan dari masa lalu. Pimpinan masa kini masih kita temui unsur-unsur *tuha peut*, sebagai pimpinan yaitu :

- a. Geucik sebagai pimpinan formal.
- b. Ulama sebagai pimpinan informal.
- c. Pemuda sebagai pimpinan informal.
- d. Cerdik pandai sebagai pimpinan informal.

Semua unsur-unsur pimpinan di atas tidak mempunyai sesuatu gelar tertentu, tetapi mempunyai lapangan kepemimpinannya masing-masing. *Geucik* sebagai pemegang fungsi pemerintahan tingkat *gampong*, ulama berperan di bidang agama, pemuda dalam urusan-urusan kepemudaan, dan cerdik pandai sebagai tempat meminta pertimbangan-pertimbangan. Mereka ini masing-masing mempunyai wewenang dalam komunitasnya.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi unsur pimpinan ini, sama seperti pada pimpinan tradisional yaitu :

- a. Berketurunan (keturunan orang-orang baik)

- b. Jujur
- c. Pandai / berpendidikan.
- d. Kekayaan.

Syarat ini didukung pula oleh popularitas berupa sifat-sifat yang disenangi, dan yang dicita-citakan. Atribut-atribut tidak pernah kita temui. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban perlu penelitian khusus mengenal hal ini. Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya bersifat horizontal. Seorang pimpinan desa (*gampong*) merasa diri sederajat dengan pimpinan-pimpinan informal lainnya. Sifat horizontal ini dapat kita lihat pada saat-saat mereka menghadapi sesuatu permasalahan, mereka menghadapi secara bersama-sama. Sedangkan hubungan dengan masyarakat bersifat vertikal. Artinya segala sesuatu inisiatif selalu datang dari unsur pimpinan, dan unsur pimpinan akan mengajak warganya untuk melaksanakannya.

## BAGIAN V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

### MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Melalui Pendidikan baik formal maupun non-formal dapat menanam keyakinan sesuatu nilai atau sesuatu yang dianggap berguna, berharga dan agung. Untuk ini timbullah bermacam-macam lembaga pendidikan. Pada suku bangsa Aceh bagian Barat, sudah berdiri beberapa lembaga pendidikan umum mulai dari sekolah dasar sampai menengah atas, dan juga lembaga-lembaga pendidikan agama mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah. Begitu juga pada lokasi penelitian.

Lembaga-lembaga pendidikan tingkat menengah atas baik umum maupun agama, belum merata ada pada tiap-tiap Kecamatan. Hanya beberapa Kecamatan saja yang sudah ada. Disamping itu lembaga-lembaga pendidikan pesantren sudah tumbuh pula pada beberapa Kecamatan. Lembaga-lembaga ini dibina oleh ulama, dan masyarakat serta didirikan atas swadaya masyarakat.

Pengajaran pada lembaga-lembaga pendidikan umum dan agama sama halnya dengan ditempat-tempat lain di seluruh Indonesia, sesuai dengan garis-garis besar program pendidikan, yang

sudah dirumuskan oleh masing-masing departemen. Pengajaran pada lembaga-lembaga pesantren menitik beratkan kepada ajaran agama Islam yang berhubungan dengan Tauhid, Aqidah, dan lain-lain lagi yang dapat membina materi keagamaan.

Santri yang mengikuti pendidikan di pesantren-pesantren berdatangan dari berbagai daerah. Mula-mula para santri adalah para anggota yang ada dalam komunitasnya. Kemudian lama-kelamaan terus meluas. Biasanya semakin mashur suatu pesantren semakin melebar pula daerah jangkawannya. Para santri akan berdatangan dari berbagai daerah seperti dengan pesantren Budi di Kecamatan Jaya Lamno (pada lokasi penelitian), pesantren Darul Huda di Kecamatan Sama Tiga, dan banyak lagi pesantren-pesantren yang sedang berkembang.

#### *Melalui Sugesti Sosial.*

Sugesti sosial yang dapat mempertebal keyakinan seseorang, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melalui dongeng-dongeng, cerita rakyat, dan pepatah-pepatah. Dongeng-dongeng yang berkembang dalam suku-bangsa Aceh bagian Barat ini banyak sekali antara lain dongeng *Amat ramanyang*. Dongeng ini menceritakan kehidupan seorang anak miskin bersama dengan ibunya.

Pada suatu hari Amat tidak sanggup lagi mengadu nasibnya terus-menerus karena tidak berkecukupan, lalu ia minta izin pada ibunya untuk pergi merantau. Sang ibu yang sudah tua itu, mengizinkan kepergian anaknya itu. Kemudian lama-kelamaan Amat di perantauan, menjadi kaya raya serta beristeri seorang rupawan. Pada suatu hari ia ingin pulang ke negerinya (Aceh Besar) dengan mempergunakan kapal kepunyaannya sendiri, disertai pula isterinya.

Setelah ia sampai di Krung Raya Aceh Besar, ibunya yang sudah sangat tua lagi miskin itu datang menyenputnya kepinggir pantai dengan membawa nasi bungkus untuk dipersembahkan kepada anaknya yang baru pulang itu. Setelah tiba di situ, apa yang terjadi, Amat yang sudah kaya raya itu tidak mau mengakui lagi orang tua yang miskin itu sebagai ibunya. Dengan bermacam cara orang tua itu membujuk anaknya agar ia mengakui

sebagai ibu. Namupun demikian orang tua itu tidak berdaya lagi, dan putus asa, kemudian ia meminta doa kepada Allah (tuhan) agar anaknya jadi sesuatu bentuk yang bukan manusia. Maka dengan sekejap waktu saja Amat beserta dengan isteri dan kapalnya itu menjadi batu. Hingga sekarang batu itu menyerupai orang di Krung Raya.

Begitulah dongeng-dongeng yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Semua dongeng-dongeng itu akan berkisar kepada tujuan untuk menanam nilai-nilai tertentu, agar nilai-nilai itu tetap menjadi milik sosial.

Cerita-cerita banyak pula yang berkembang dikalangan suku bangsa Aceh bagian Barat seperti dengan hikayat *perang sabi*. Hikayat ini menceritakan bagaimana menanam nilai-nilai kepahlawanan melawan penjajahan Belanda. Hingga dahulu semasa penjajahan Belanda hikayat ini dilarang berkembang oleh orang-orang Belanda. Begitu juga dengan pepatah-pepatah seperti *Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut* (adat dengan hukum selalu bergandengan). *Adat bak po teumeureuhom, hukom bak Syah Kuala, Kanun bak putroe Phang, reusam ak bentara* (adat ada pada raja, hukum ada pada ulama, tatacara ada pada tuan putri, dan basa-basi ada pada panglima). Dan begitu juga lain-lain pepatah.

#### *Melalui Propaganda.*

Meyakinkan akan nilai-nilai bagi setiap orang dapat pula dilakukan melalui propaganda-propaganda dalam bentuk pidato-pidato. Cara ini amat sering terjadi pada suku bangsa Aceh bagian Barat. Para ulama, atau pejabat-pejabat setempat seperti *geucik* atau *kepala mukim* mengucapkan pidato-pidato dengan sesuatu thema nilai-nilai sosial untuk menanam nilai-nilai kesejahteraan sosial dan sebagainya.

#### *Melalui Kepercayaan dan Agama*

Sebagaimana pada uraian yang lalu sudah dikemukakan bahwa dalam suku bangsa Aceh bagian Barat berkembang dua aliran keagamaan yaitu aliran *kaum muda* dan aliran *kaum tua*. Kedua aliran ini merupakan jalur untuk mempertebal keyakinan pengendalian sosial. Karena kedua jalur ini bersama-sama memupuk akan

kesadaran sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara. Aliran *kaum muda* banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dan kemudian membinanya dengan sistem yang dianutnya. Aliran *kaum tua* membina keyakinan dengan mendirikan pesantren-pesantren. Kepada santri dapat ditanam sistem kepercayaan dan agama. Kepada masyarakat kadang-kadang dilakukan dakwah keliling.

## MEMBERI IMBALAN

### *Imbalan yang Konkrit*

Suku-bangsa Aceh bagian Barat sebagaimana juga dengan suku-bangsa yang lain, mengenal pula cara pengendalian sosial melalui pemberian imbalan kepada seseorang. Imbalan itu biasanya dalam bentuk nonmateril seperti penghargaan atau kedudukan sosial tertentu. Imbalan-imbalan yang nonmateril ini sering diberikan kepada seseorang yang jujur, menghargai norma-norma dalam masyarakat. Orang yang seperti ini ada kemungkinan untuk menduduki sesuatu fungsi dalam masyarakat seperti menjadi *geucik*, atau *kepala mukim*.

Apabila seseorang yang melanggar norma-norma sosial seperti berzina, mencuri, suka berkelahi, dan lain-lain, maka masyarakat menganggap sebagai musuh. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat kedudukan sosial yang penting. Bahkan masyarakat selalu menghina, dan disisihkan dalam komunitasnya.

### *Imbalan dalam Kepercayaan.*

Pemberian imbalan dalam kepercayaan banyak bersifat nonmateril. Seseorang yang bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, ia akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan oleh tuhan sesudah mati nanti. Bentuk imbalan ini merupakan sistem kepercayaan saja dalam arti bahwa yang memberikan imbalan adalah tuhan nanti sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Seseorang yang berbudi luhur, ia mendapat penghargaan dengan puji-pujian sebagai orang baik budi pekertinya.

### *Imbalan dalam Agama.*

Imbalan yang terdapat dalam agama sesuai pula dengan imbalan dalam sistem kepercayaan. Seseorang yang taat kepada agama, dianggap ia dekat dengan tuhan. Maka imbalan ini dapat juga dalam arti materil. Kepada seseorang yang sudah dianggap taat kepada agama, banyak anggota masyarakat memberikan ujud materil seperti uang, beras, dan sebagainya. Disini ada anggapan bahwa memberikan sesuatu kepada orang yang taat, rezekinya akan mudah.

## MENGHILANGKAN RASA MALU

### *Peranan Gunjingan*

Gunjingan sering juga dikatakan dengan gossip, biasa dilakukan dengan cara mengejek dan memperkatai seseorang oleh para warga masyarakat sewaktu mereka saling bertemu. Dalam kehidupan komunitas masyarakat suku bangsa Aceh bagian Barat gunjingan atau gossip merupakan salah satu alat pengendalian sosial. Seseorang yang melakukan perbuatan diluar nilai-nilai, norma-norma sosial seperti melakukan pencurian, perzinahan, perkelahan dan sebagainya, masyarakat akan menggunjingkan terhadap masalah itu.

Pnggunjingan biasa dilakukan di menasah-menasah, di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat permandian umum dan dapat pula di rumah-rumah pada saat-saat mereka kunjung-mengunjungi. Penggunjingan berkisar pada masalah-masalah yang sangat merisaukan kehidupan komunitas. Dengan demikian pengaruh gunjingan ini, akan mengurangi orang-orang untuk berbuat yang terlarang.

### *Peranan Kepercayaan dan Agama.*

Mengembangkan rasa malu melalui peranan kepercayaan erat hubungannya dengan peranan agama, maka dalam penjelasan ini tidak dipisahkan antara kedua peranannya. Seseorang yang melakukan perbuatan diluar nilai-nilai kepercayaan seperti kepada orang yang meminta-minta tidak diberikan sedekah, bahkan dihina, maka orang tersebut akan mendapat balasan dari tuhan. Orang yang tidak sering mengadakan *kenduri* (selamatan), maka tuhan jauh dari orang itu. Begitu juga dalam kepercayaan agama seperti

seseorang yang berjudi, akan bersoda dan uang judi itu tidak kekal sifatnya serta haram untuk dimakan. Kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas, sering diberikan nasihat-nasihat oleh orang-orang tua *gampong* agar mereka insaf dan tidak lagi melakukannya.

## MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

### *Kepercayaan dan Agama.*

Pengendalian sosial melalui pengembangan rasa takut erat sekali hubungannya antara kepercayaan dan agama. Kedua-duanya berjalan bergandengan dalam kehidupan masyarakat suku-bangsa Aceh bagian Barat. Pengendalian sosial melalui rasa takut dalam ujud kepercayaan dan agama dapat dilihat pada orang-orang yang bertingkah laku diluar norma-norma sosial seperti mencuri, berzinah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang dan lain-lain.

Kepada orang-orang yang berbuat di luar norma-norma sosial itu akan dapat sanksi di dunia, dia akan dikucilkan dari masyarakat, tidak mudah rezeki dan lain-lain. Sanksi di akhirat adalah balasan yang setimpal dari tuhan. Atau setelah meninggal rohnya akan jadi babi. Jadi babi disini dianggap orang yang sering membuat keonaran semasa hidupnya.

### *Hukum Adat*

Pengendalian sosial melalui hukum adat ini terjadi dalam segala bentuk kehidupan sosial. Seseorang yang berkelahi akan dikenakan dengan kewajiban membawa *buleukat kumeng* (nasi ketan) untuk berbaik kembali setelah berkelahi. Bagi orang berzinah akan dikenakan denda dengan *lapek malee* (uang penutup malu), biasanya dibebankan kepada laki-laki. Bagi anak-anak dibawah umur yang berkelahi yang menyebabkan *ro darah* (luka yang mengakibatkan keluar darah), maka orang tua anak tersebut didenda dengan memotong kambing disertai dengan nasi ketan kuning.

Pengaruh dari sanksi-sanksi adat ini sangat melembaga pada suku-bangsa Aceh bagian Barat. Oleh sebab itu orang tua anak selalu memberi nasihat kepada anak-anaknya agar jangan sampai terjadi hal yang demikian. Karena bila terjadi hal itu, tidak saja

bagi anak yang melaukannya yang mendapat sanksi, akan tetapi seluruh keluarga merasa malu sebagai sanksi sosial.

## BAGIAN VI. BEBERAPA ANALISA

Suku-bangsa Aceh bagian Barat Aceh, sebagian besar mendiami daerah Kecamatan Jaya Lamno, Samponit, Lhok Kruet, Lageun, Krung Sabee, Teunom, Samatiga, *Woyla*, Sungai Mas, Beutong, dan Seunagan. Di Kecamatan Johan Pahlawan, Kaway XVI, dan Kecamatan Kuala terdapat campuran antara suku-bangsa Aceh dan Aneuk Jamee, serta beberapa etnis lainnya.

Suku-bangsa Aceh bagian Barat yang mendiami daerah seperti diatas, merasa dirinya hidup dalam suatu komunitas yang lebih kecil yang disebut dengan *gampong*. Tiap *gampong* diperintah oleh seorang *geucik*. Maka *gampong* di sini sama dengan sebuah desa. Di dalam suatu *gampong* paling sedikit terdapat sebuah *menasah* (langgar). Di samping itu terdapat pula sejumlah pimpinan-pimpinan *gampong* yaitu *geucik*, *teungku*, cerdik pandai dan pemuda. Keempat unsur pimpinan itu disebut dengan *tuha peut*. Maka komunitas kecil pada suku-bangsa Aceh bagian Barat Aceh, adalah komunitas *gampong*.

Di dalam komunitas *gampong* kita temui lapisan-lapisan sosial. Pelapisan sosial masa yang lalu mendasarkan kepada penduduk inti, dan keturunan. Dari dasar pelapisan sosial ini, maka lahirlah lapisan bangsawan, ulama, hartawan dan rakyat biasa. Pelapisan sosial masa kini pada dasarnya sama dengan pelapisan sosial masa yang lalu. Hanya pada masa kini sudah timbul satu lagi lapisan penguasa, sebagai lapisan baru. Lapisan penguasa ini mempunyai fungsi dalam pemerintahan. Dahulu fungsi ini dijabat oleh lapisan bangsawan.

Pucuk pimpinan dalam sebuah komunitas *gampong* adalah seorang *geucik* sebagaimana telah dikemukakan diatas tadi. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ia dibantu oleh unsur pimpinan informal yang tergabung dalam *tuhapeut*. Orang-orang yang termasuk unsur tersebut adalah *teungku* (ulama), *geucik*, *cerdik pandai*, dan *pemuda*. Ke empat unsur pimpinan *gampong* ini mempunyai tugas menurut bidangnya masing-masing.

Unsur *teungku* (ulama) mempunyai tugas dibidang keagamaan. Unsur *geucik* mempunyai tugas mengenai urusan pemerintahan dan urusan lainnya. Unsur cerdik pandai sebagai tempat meminta pertimbangan mengenai masalah-masalah *gampong*. Dan unsur pemuda mengatur pengorganisasian kepemudaan. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa dalam suatu komunitas *gampong*, terdapat unsur pimpinan formal dan unsur pimpinan informal.

Tiap-tiap komunitas *gampong* mengenal sistem pengendalian sosial yang dapat mengatur para warg *gampong* dalam berbuat, beringkah laku yang sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang berlaku dalam komunitasnya.

Sistem pengendalian sosial dapat dilakukan dengan mempertabl keyakinan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama dan pesantren-pesantren. Melalui sugesti sosial dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita dan pepatah-pepatah. Melalui propaganda dengan pidato-pidato yang diucapkan oleh para pimpinan formal dan pimpinan informal. Dan begitu juga dengan melalui kepercayaan dan agama. Melalui yang terakhir ini merupakan sistem pengendalian sosial yang paling dominan, karena umumnya warga komunitas *gampong* semua menganut agama Islam yang ketat.

## BAB KETIGA

### KOMUNIKASI KECIL SUKU BANGSA ANEUK JAMEE

#### BAGIAN I. IDENTIFIKASI

#### LOKASI

##### *Letak dan keadaan alam*

Samadua adalah salah satu kecamatan di antara empat kecamatan dan beberapa perkampungan lainnya di pantai bagian barat propinsi Daerah Istimewa Aceh yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee (1,2). Kecamatan tersebut bersama dengan 17 kecamatan lainnya membentuk kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan bagian daripada propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kecamatan Samadua terhampar di atas kawasan seluas 170 km<sup>2</sup>, yang berbatasan ke sebelah utara dengan kecamatan Kluet Utara, ke sebelah selatan dengan lautan Hindia, ke sebelah timur dengan kecamatan Tapaktuan, dan kesebelah barat dengan kecamatan Sawang. Dengan demikian kecamatan ini terletak sekitar 10 km di sebelah barat kota Tapaktuan, ibukota kabupaten Aceh Selatan, atau sekitar 435 km jaraknya ke arah selatan dari kota Banda Aceh.

Seperti kecamatan—kecamatan lain yang terdapat di pantai barat Aceh, kecamatan Samadua secara administratif terpecah atas kemukiman, dan perkampungan. Dewasa ini kecamatan Samadua dibentuk oleh 4 kemukiman dan 27 kampung (kampung). Masing—masing kemukiman adalah kemukiman Kasiék Putih yang terdiri atas 7 kampung, kemukiman Suaq yang terdiri atas 8 kampung, kemukiman Pantón Lowéh yang terdiri atas 8 kampung, dan kemukiman Sedar yang terdiri atas 4 kampung.

Diantara ke 4 kemukiman diatas, 3 kemukiman yang didiami sepenuhnya oleh suku—bangsa Aneuk Jamee, sedangkan 1 kemukiman sisanya lagi didiami secara campuran antara penduduk suku—bangsa Aneuk Jamee. Ke 3 kemukiman yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee adalah kemukiman Kasiék Putih, kemukiman Pantai Lawéh, dan kemukiman Suaq. Sedangkan kemukiman Sedar didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee (kampung Alue Pi-

nanng), dan masyarakat Aceh (Gampong Dama tutong, Batee Tunggal, Blak Dalam). Dengan kata lain hanya 24 buah kampung dari 27 kampung yang membentuk kecamatan Samadua, yang berpenduduk Aneuk Jamee.

Bila dihubungkan dengan pengelompokan etnis, maka suku-bangsa Aneuk Jamee yang mendiami kecamatan Samadua itu berbatasan ke sebelah pedalaman atau utara dengan suku-bangsa Kluet yang mendiami bagian pedalaman kecamatan Kluet Utara, ke timur dengan suku-bangsa Aneuk Jamee juga yang mendiami kecamatan Tapaktuan, dan ke barat dengan suku-bangsa yang mendiami kawasan barat kecamatan yaitu penduduk kemukiman Sedar Samadua, demikian juga kecamatan Sawang.

Keseluruh areal pemukiman suku-bangsa Aneuk Jamee tidak terbentuk dari tanah dataran rendah saja, melainkan juga terdiri atas rawa-rawa, sungai atau alur, sawah, bukit dan pegunungan.

Bila diamati dari arah pantai, kampung-kampung yang dihuni oleh suku-bangsa Aneuk Jamee di kecamatan Samadua seolah-olah diapit secara melingkar oleh bukit dan gunung, yang merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan. Keadaan demikian menyebabkan dataran rendah berada dalam keadaan relatif sempit. Dataran rendah itu merupakan tempat pemukiman, persawahan, dan perkebunan (terutama palawija). Sedangkan sisanya adalah sungai dan rawa-rawa.

Dari sela-sela pegunungan Bukit Barisan mengalir alur-alur yang nantinya bersatu membentuk suatu sungai yaitu sungai Samadua. Sungai yang bermuara ke lautan Hindia itu mempunyai beberapa arti penting bagi kehidupan penduduk. Kecuali sebagai sumber pengairan sawah penduduk, ia juga dipergunakan sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian bagi penduduk kampung-kampung yang berada di sepanjang aliran sungai itu.

#### *Pola perkampungan.*

Seperti sudah dikemukakan ada 24 buah kampung diantara 27 buah kampung yang terdapat di kecamatan Samadua, yang dihuni oleh suku-bangsa Aneuk Jamee. Masing-masing kampung tersebut adalah Kampung Gadang, Kampung Ladang, Kampung Cacang, Kampung Pauh, Kampu-

ang Balai, Kampuang Aie Sialang Hulu, Kampuang Aie Sialang Hillie, Kampuang Manasah, Ujuang Kampuang. Di kemukiman Kasiek Putieh, Kampuang Suaq Hulu, Kampuang Payonan Gadang, Kampuang Sawang Bungo, Kampuang Jilatang, Ujuang Kampuang Suaq, Ujung Tanah, Kampuang Luar, Kampuang Lubuk Layua, Kampuang Tampang. Di kemukiman Suaq, Kampuang Dalam, Kampuang Gunung Ketek, Kampuang Tanjung, Kampuang Alue Simerah, Kampuang Ladang, kampuang Tengah, Kampuang Koto Batu, dan Kampuang Tokoh. Di kemukiman Panton Laweh dan Kampuang Alue Pinang di kemukiman Sedar.

Kampung-kampung tersebut terletak di atas hamparan dataran rendah yang diapit dan dilingkari oleh rangkaian bukit dan gunung, pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar dari kampung-kampung itu terletak di sepanjang sungai Samadua. Sedangkan sisanya terpecah-pecah tidak jauh dari kedua sisi sungai tersebut, seperti Kampuang Ladang dan Kampuang Payo misalnya. Mengingat keadaan demikian tidak heran apabila diketemukan beberapa kampung yang letaknya berderet pada suatu kawasan. Sungai, bukit, dan alur merupakan batas alam antara satu kampung dengan kampung yang lain.

Kampung-kampung tersebut pada mulanya dibangun oleh beberapa keluarga pembangun kampung. Perkembang-biakan cikal bakal pembangun kampung sejalan dengan perkembangan zaman menyebabkan anggota warga kampung kian bertambah pula. Berbarengan dengan pertambahan penduduk tentu saja rumah-rumah kian bertambah pula, karena timbulnya rumah tangga baru yang memisahkan diri dari rumah induk. Akibatnya timbullah pengelompokan rumah pada kawasan tertentu. Bahkan pada beberapa kampuang terlihat rumah-rumah penduduk saling bergandengan berderet sedemikian rupa seolah-olah hampir menyerupai rumah petak saja layaknya. Pemandangan seperti ini dapat dilihat pada Kampuang Cacang, Kampuang Ladang, Kampuang Gadang, dan Kampuang Tampang misalnya. Timbulnya rumah berderet saling bergandengan ini disebabkan kawasan pekarangan yang akan dijadikan tanah kapling perumahan kian bertambah sempit. Sebab, seseorang yang akan membangun rumah baru biasanya memperoleh tanah kapling dari pihak orang tuanya.

Bangunan perumahan penduduk mempunyai pola konstruksi yang aneka macam. Kebanyakan di antaranya mempunyai konstruksi bertiang rendah (1 – 2 meter di atas permukaan tanah). Sungguhpun bertiang rendah, tetapi tidak mengikuti model *rumoh Aceh* (rumah Aceh). Di samping itu terdapat juga rumah penduduk yang berlantai tanah dan berlantai dua. Kedua pola terakhir berbentuk semi permanen atau permanen. Kesemua bentuk perumahan itu berfungsi sebagai tempat tinggal. Hanya saja pada bentuk rumah berlantai dua sering dimanfaatkan lantai bawah sebagai tempat berusaha seperti berjualan dan menjahit.

Di tiap kampung diketemukan dua bangunan lain yaitu *manasah* dan *surau*, bahkan pada beberapa kampung tertentu terutama pusat kemukiman ditemukan juga mesjid. Bangunan *manasah* dan *surau* umumnya berbentuk persegi empat yang menghadap ke arah kiblat atau barat. Bangunan ini umumnya berlantai tanah dalam bentuk semi permanen atau permanen. Bila rumah adalah milik pribadi para warga kampung, maka kedua bangunan ini adalah milik perkampungan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari *manasah* adalah tempat kaum lelaki bersembahyang jamaah (kecuali Jumat), tempat anak-anak belajar mengaji, balai pertemuan kampung, tempat penyelenggaraan upacara adat dan keagaam (bila tidak ada mesjid) di dalam kampung, dan tempat tidur para pemuda. Sedangkan *surau* adalah tempat kaum ibu bersembahyang jamaah (terutama hari Jumat dan tarawih), dan anak perempuan mengaji.

Sebagian dari kampung-kampung yang didiami oleh suku-bangsa Aneuk Jamee dibelah oleh jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh dengan Tapaktuan dan Bakongan. Jalan raya itu merupakan urat nadi yang menghubungkan Samadua dengan kawasan lainnya baik di pantai barat Aceh maupun dengan pantai utara dan timur Aceh, sehingga memperlancar gerak mobilitas antara Samadua dengan kawasan lainnya. Sedangkan kampung-kampung lainnya terletak tidak berapa jauh pada kedua sisi jalan raya itu. Sarana yang menghubungkan antara kampung-kampung tersebut adalah jalan kabupaten atau jalan desa.

Di samping jalan desa masih ditemukan pula jalan setapak atau semacam *jurong-jurong* di dalam kampung. Jalan setapak itu

biasanya menghubungkan antara kawasan pemukiman dengan sawah atau kebun, dan kawasan pemukiman dengan tepian mandi di sungai.

## PENDUDUK

Seperti sudah dikemukakan bahwa hanya 24 buah kampung di dalam kecamatan Samadua yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee. Penduduk kecamatan tersebut pada tahun 1979 berjumlah 12.000 jiwa. Dari jumlah demikian hanya sekitar 11.397 jiwa saja mereka yang tergolong Aneuk Jamee. Ini berarti 5% dari jumlah penduduk seluruh kecamatan.

Boleh dikatakan bahwa hampir semua penduduk yang mendiami ke 24 buah kampung tersebut adalah suku—bangsa Aneuk Jamee. Para pendatang hanya terdapat di *kampung* Ujung Tanah. Mereka ini terdiri dari pegawai negeri dan ABRI. Dengan demikian tentu saja jumlahnya hanya terdiri atas beberapa keluarga saja.

Sebaliknya masih diketemukan sebahagian besar penduduk Aneuk Jamee yang sudah bermigrasi ke luar dari Samadua. Persoalan jumlah mereka yang bermigrasi amat sukar dihitung secara pasti. Tetapi berdasarkan pengamatan kasar barangkali ada sekitar 30% dari jumlah penduduk Aneuk Jamee yang mendiami daerah tersebut sekarang ini berada di luar Samadua.

Bila dihubungkan dengan arah mereka bermigrasi dapat di kelompokkan kepada dua katagori. Pertama, mereka yang bermigrasi ke kota—kota besar, seperti Jakarta, Medan, Banda Aceh, Meulaboh, Tapaktuan, dan Sinabang. Kedua mereka yang bermigrasi ke daerah—daerah pedesaan di pantai barat seperti Kluet Utara dan Selatan, Sibandeh, Sileukat, dan Babahrot. Mereka yang bermigrasi dalam kelompok pertama bekerja sebagai pegawai negeri (termasuk ABRI), bersekolah, berniaga, dan dalam lapangan jasa. Sedangkan mereka yang bermigrasi ke dalam kelompok kedua umumnya bergerak dalam bidang pertanian, tetapi ada juga yang bergerak dalam bidang jasa, dan pegawai negeri, serta berniaga. Migrasi dari kampung—kampung yang terdapat di Samadua itu tampaknya sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Gerak migrasi itu kelihatannya terus berlangsung hingga saat sekarang ini.

Amat sukar bagi kita untuk mengamati hubungan sosial yang berlangsung antara penduduk setempat dengan para pendatang. Hal ini disebabkan para pendatang yang berada dalam jumlah relatif kecil dan menetap hanya buat masa sementara karena tugas atau dinas mereka. Tetapi dari pengamatan sehari-hari memperlihatkan hubungan yang wajar antara penduduk dengan para pendatang. Sungguhpun para pendatang itu bekerja sebagai pegawai negeri, tetapi ia mempunyai suatu ikatan dengan *warga kampung* lainnya melalui ikatan keagamaan (Islam). Hal demikian dimanifestasikan dalam pelbagai kegiatan perkampungan dan upacara daur hidup, di mana setiap warga saling berpartisipasi.

Seperti halnya dengan migrasi, kita menemukan kesukaran untuk menetapkan perincian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Tetapi berdasarkan perkiraan kasar yang terdapat pada kantor camat dapat diberikan gambaran sebagai berikut ; Pada tahun 1979 ada sekitar 70% dari penduduk Aneuk Jamee yang berpendidikan Sekolah Dasar dan sederajat, 20% berpendidikan sekolah lanjutan dan sederajat, 5% berpendidikan perguruan tinggi, dan 5% masih buta huruf (latin).

## LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

### *Latar belakang sejarah*

Amat sukar bagi kita untuk melukiskan sejarah pemukiman dari suku-bangsa Aneuk Jamee di Samadua. Keadaan demikian erat kaitannya dengan langkanya sumber tertulis yang diperoleh. Tetapi berdasarkan tradisi lisan dan catatan yang diperoleh dapat disebutkan suku-bangsa Aneuk Jamee di Samadua berasal dari Rao dan Pariaman Sumatera Barat (2,230). Mereka ini tampaknya merupakan bagian gelombang migrasi dari Sumatera Barat lainnya yaitu dari Barat Minangkabau, Kerbong (Kampar), Pariaman Barat, Pasaman, dan Kampar Kuantan yang pindah ke pantai barat Aceh (3,217 – 247).

Apa motif utama dari migrasi tersebut dan kapan migrasi itu berlangsung secara tepat belum diperoleh suatu jawaban yang pasti. Tetapi berdasarkan tradisi lisan yang terdapat dalam Hikayat Pocut Muhammad agaknya dapat dipastikan bahwa sudah terdapat kolonis suku bangsa Minangkabau di pantai barat Aceh pada abad

ke 17 (4,79). Mereka digelari dengan sebutan *Aneuk Rawa*. Seberapa jauh arti kolonis itu terhadap kesultanan Aceh dapat diamati pada pertempuran yang berlangsung antara pihak Sultan (Pocut Muhammad) dengan mereka dalam rangka memaksa mereka tunduk di bawah sultan.

Kapan sebutan Aneuk Jamee itu melekat untuk diri mereka juga tidak ada jawaban yang tepat. Tetapi bila dilihat dari segi arti kata yang memperlihatkan identitas mereka jelas sebutan itu memperkuat pendapat bahwa mereka pendatang yang bermigrasi ke daerah Aceh (5,1).

Di Samadua, masyarakat Aneuk Jamee itu membentuk *kedatukan* yang diperintahi oleh seorang *datuk*. Ada empat *kedatukan* yang terdapat di Samadua. Ke empat *datuk* itu menguasai wilayah ketiga kemukiman yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee, yaitu kemukiman Kasik Putih, Suaq, dan Pantai Laweh. Ke empat *datuk* tersebut adalah *datuk Kasik Putih*, *Datuk Suaq*, *Datuk Pantan Laweh*, dan *Datuk Sawang*. Kesemua *datuk* ini memerintah pada kawasannya dan tunduk kepada Sultan Aceh. Jabatan tersebut dipegang oleh seorang *datuk* yang kadangkala menambah gelar *teuku* di muka nama *datuk*, sehingga gelarnya menjadi *teuku datuk*. Jabatan ini diwarisi secara turun—temurun.

Tiap *datuk* membawahi beberapa *kampung*. *Kampung* diperintahi oleh seorang *keucik*. Berbeda dengan jabatan *datuk*, jabatan *keucik* diangkat berdasarkan pemilihan. Tetapi tidak jarang bahwa jabatan tersebut terus—menerus berada dalam satu lingkaran keluarga. Keadaan demikian tentu erat kaitannya dengan pandangan para warga kampung terhadap yang bersangkutan.

Pada waktu masa penjajahan Belanda ke empat *kedatukan* itu disatukan ke dalam sebuah *landschaap*, Samadua dirubah menjadi kecamatan. Sedangkan keempat *kedatukan* itu dipecah atas 3 kemukiman, yaitu kemukiman Kasik Putih, Pantai Laweh, dan Suaq. Disamping itu Samadua diperluas lagi dengan memasukkan kemukiman Sedar ke dalam kecamatan itu. Kemukiman terakhir ini sebelumnya adalah bagian dari *Landschaap Lhok Paoh Zuid*. Jabatan kecamatan disebut camat dan jabatan kepala mukim disebut *imam mukim*. Sedangkan administrasi kampung tetap seperti biasa.

### *Sistem mata pencaharian.*

Suku—bangsa Aneuk Jamee mempunyai aneka macam mata pencaharian. Kebanyakan di antaranya hidup dalam bidang pertanian yaitu *basawah* atau *bapayo* (mengerjakan sawah atau paya), *bakabuan* (mengerjakan kebun baik palawija maupun tanaman keras), dan *baladang* (berladang padi atau tanaman muda digunung). Ketiga kegiatan pertanian ini sering dilakukan secara bersamaan oleh seseorang petani. Hal tersebut karena sawah yang mereka kerjakan berada dalam ukuran relatif sempit dan tatacara pengerjaannya yang relatif masih tradisional. Keadaan demikian disebabkan irigasi pengairan sawah yang belum baik.

Di samping kegiatan bidang pertanian terdapat pula sebagian penduduk yang *paie kalaut* (pergi ke laut). Mereka yang *paie ka laut* bekerja sebagai *manganyie* (mengail), *memukeh*, dan *bapayang* (memukat ikan di tengah laut). Kesumua pekerjaan ini dilakukan oleh penduduk yang mendiami pinggir pantai seperti di kampung Cacang dan Sawang.

Selanjutnya terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai *panggaleh* (penjaja barang dari satu kampung ke kampung lain atau pasar ke pasar lain), *baniago* (berniaga), pegawai negeri (termasuk ABRI), dan dalam lapangan jasa.

### *Sistim kekerabatan*

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua mengenal kelompok keluarga terkecil yang disebut *rumah tanggo* (rumah tangga). Dalam kehidupan sehari—hari, ayah adalah kepala rumah tangga. Kadangkala ditemukan juga rumah tangga yang dikepalai oleh ibu atau salah seorang anggota keluarga. Keadaan demikian disebabkan karena sang ayah sudah meninggal dunia ataupun dalam kasus perceraian.

Dalam hubungan dengan kegiatan mata pencaharian ayah dianggap lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Sedangkan ibu secara ideal lebih bertanggung jawab dalam hubungan pengasuhan anak, memasak dan membersihkan rumah. Namun, dalam kegiatan mata pencaharian tertentu seperti *basawah*, *bakabuan*, dan *baladang* terlihat bahwa masing—masing anggota rumah tangga saling berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya masing—masing.

Suku—bangsa Aneuk Jamee mengenal pula *ninik—mamak* dan *wali*. *Ninik—mamak* adalah saudara pada pihak ibu yang berada satu derajat di atasnya. Sedangkan *wali* adalah saudara pihak ayah yang berada satu derajat di atasnya. Kedua kelompok kerabat orang tua ini mempunyai pola hubungan tersendiri dalam hubungan kehidupan si anak. Dalam hubungan dengan upacara daur hidup para *ninik—mamak* memegang peranan penting terhadap kemenakannya. Bila ia melakukan aktifitas tersebut seperti perkawinan misalnya, ia bisa dikenakan denda apabila tanpa seizin atau tanpa persetujuan *ninik—mamak*. Sebaliknya bila mendapat persetujuan *ninik—mamak*, maka para *ninik—mamak* akan lebih bertanggung jawab dalam hubungan pelaksanaan upacara. Sebaliknya dalam hubungan pewarisan dan perwalian tampak pihak kerabat ayah yang lebih berkuasa.

Jadi bila ditilik pola hubungan yang berlangsung antara seseorang dengan kerabat ayah dan kerabat ibu memperlihatkan suatu pola hubungan yang mempertautkan antara hukum Islam dan adat Minangkabau yang *matrilinel*. Hubungan yang terjalin antara seseorang dengan kerabat pihak ayah dan kerabat pihak ibu memperlihatkan kadar tertentu. Bentuk hubungan demikian erat kaitannya pada prinsip menetap sesudah kawin yang *uxorilokal* dan hukum Islam yang memperbedakan hubungan seseorang antara kerabat pihak ayah dan pihak ibu.

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua juga mengenal *kindred* yang diungkapkan dengan sebutan *ampek kaum* (empat kaum). Yang dimaksud empat kaum ini adalah kesatuan saudara pihak ayah dan pihak ibu. Mereka ini akan lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara yang berkenaan daur hidup, yang dilakukan oleh seseorang.

### *Sistem Religi*

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua adalah pemeluk agama Islam. Sungguhpun pemeluk agama Islam, namun sebagian dari mereka masih mempercayai juga makhluk—makhluk gaib tertentu yang mempunyai tenaga gaib atau kekuatan sakti. Sikap demikian terlihat umpamanya kepercayaan pada hantu (makhluk halus yang bengis dan menakutkan), *burung tujuh* (yaitu makhluk halus yang sering mengganggu orang yang mau melahirkan anak), dan cerita *batu sumbang* dan *batu balayie* (batu yang dianggap penjel-

maan dari manusia karena durhaka) yang terdapat dipinggir laut Samadua.

Sungguhpun sudah terdapat organisasi Islam Muhammadiyah di Samadua, namun dalam segi-segi tertentu, terutama berkenaan dengan tradisi semacam itu belum bisa dikikis habis oleh organisasi itu terhadap pengikutnya.

### B a h a s a

Suku-bangsa Aneuk Jamee di Samadua mempergunakan bahasa Aneuk Jamee sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Boleh dikatakan bahasa yang diucapkan oleh masing-masing penduduk pada tiap perkampungan tidak memperlihatkan perbedaan dialek. Kecuali dengan bahasa Aneuk Jamee yang diucapkan oleh orang Aneuk Jamee yang mendiami kecamatan-kecamatan lain seperti Tapaktuan, Labuhan Haji Susoh, dan Kandang. Perbedaan dialek itu sebetulnya erat kaitannya dengan keadaan geografis dan pengaruh dari bahasa lain yang terdapat di daerah itu. Sedangkan di Samadua, penduduknya hampir semuanya adalah anggota suku-bangsa Aneuk Jamee. Sungguhpun terdapat juga beberapa perkampungan yang didiami oleh suku-bangsa Aceh, tetapi patut diketahui bahwa kediaman suku-bangsa Aceh itu terpisah dari kampung-kampung yang dihuni oleh suku-bangsa Aneuk Jamee.

## BAGIAN II. BENTUK KOMUNITAS

### CIRI-CIRI KOMUNITAS KECIL

Kesatuan hidup setempat atau komunitas kecil dalam suku-bangsa Aneuk Jamee disebut *Kampung* (desa). *Kampung* terhampar diatas suatu kawasan yang terdiri atas areal pemukiman, areal persawahan, dan areal kebun. Batas antara suatu *kampung* dengan *kampung* lain adalah bersifat alamiah seperti sungai, alur, jalan dan gunung.

Disamping areal-areal yang disebut diatas, masih diketemukan beberapa indikator lain dalam suatu *kampung*. Indikator tersebut ada dalam bentuk fisik dan dalam bentuk struktur pemerintahan. Indikator dalam bentuk fisik yaitu perumahan, *menasah*, dan surau. Perumahan dimaksudkan di sini adalah sejumlah rumah penduduk yang menjadi warga *kampung*. Tentang berapa jumlah

rumah penduduk yang pasti untuk dapat mengesahkan sebuah *kampung* tidak ada suatu ketentuan khusus. Tetapi berdasarkan pengamatan agaknya tiap *kampung* memiliki rumah tidak kurang dari 50 buah. *Menasah* adalah bangunan empat persegi sebagai tempat laki—laki bersembahyang jamaah (kecuali Jumat). Disamping itu *menasah* juga mempunyai beberapa fungsi lain yaitu sebagai *balai pertemuan*, tempat penyelenggaraan upacara adat, dan keagamaan. *Surau* adalah juga bangunan empat persegi sebagai tempat kaum ibu berkumpul dan bersembahyang jamaah (terutama pada hari Jumat dan tarawih bulan puasa).

### STRUKTUR KOMUNITAS KECIL.

Indikator dalam bentuk struktur pemerintahan adalah kelembagaan yang terdapat pada struktur pemerintahan *kampung*. Kelembagaan itu terdiri atas *keucik*, *tuangku sagi*, *tuangku manasah*, dan *ketua pemuda*. Tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dewasa ini ada pula lembaga *sosial desa* (LSD), dan *Tuha peut*. Kepala pemerintahan *kampung* adalah *keucik*. *Keucik* memegang pemerintahan dalam *komunitas kampung*. Ia kadang—kadang mengalami tugas yang sangat kompleks, mulai dari fungsi pemerintahan sampai kepada kegiatan—kegiatan sosial.

Disamping *kampung* sebagai komunitas yang terkecil terdapat lagi suatu organisasi perantara antara *kampung* dengan kecamatan. Organisasi tersebut dinamakan *kemukiman*. Dengan kata lain *kemukiman* itu merupakan kesatuan daripada beberapa *kampung*. Di Samadua ada 3 *kemukiman* yang mempersatukan sekitar 23 buah *kampung* yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee. Kepala pemerintahan tingkat *kemukiman* disebut *imam mukim*. Dalam pelaksanaan pemerintahan ia dibantu oleh *tuangku imam mesjid* yang memimpin sembahyang jamaah di mesjid.

Organisasi dalam bentuk *kemukiman* ini tampaknya sudah mulai berkurang peranannya dalam kehidupan masyarakat sehari—hari. Peranan *mukim* baru tampak pada kasus tertentu seperti pertenggaran yang berlangsung antar *kampung*. Demikian juga halnya dengan peranan *tuangku imam mesjid*. Kalau dahulu ia bertanggung-jawab dalam hubungan dengan pelaksanaan akad—nikah di samping memimpin sembahyang jamaah, tetapi sebagian peranannya yaitu dalam hubungan dengan upacara akad nikah telah diambil alih oleh

kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam hubungan dengan kemesjidan juga sudah menampakkan perubahan, dimana ada kecendrungan pada beberapa *kampung* tertentu untuk membangun mesjid sendiri tempat mereka bersembahyan Jumat, seperti di kampung Latang.

#### PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Seperti telah dikatakan bahwa kepala *kampung* di Samadua disebut dengan *keucik*. Sebutan jabatan *keucik* itu sudah berlangsung sejak jauh pada zaman yang lampau. Dengan timbulnya konsep desa sebutan bagi organisasi terkecil dari pemerintahan di Indonesia tampak kecendrungan untuk menggeneralisasikan desa dengan *kampung* dalam pengertian masyarakat Aneuk Jamee, walaupun konsepsi desa yang berkembang di Jawa barangkali agak berbeda dengan kenyataan *kampung* dalam suku—bangsa Aneuk Jamee.

*Kepala kampung* dalam bentuk *keucik* dipilih oleh masyarakat *kampung* untuk masa tertentu. Tentang lama masa pemilihan tidak ada ketegasan. Justru itu apabila seseorang *keucik* memperlihatkan integritas pribadi dan dedikasinya yang baik akan terus menerus dipilih kembali oleh para *warga kampung*, karena itu tidak jarang masa jabatan tersebut masih tetap ia pegang sampai hingga ia udzur bahkan sampai ia meninggal dunia.

Dalam menjalankan roda pemerintahan *kampung* ia dibantu oleh seperangkat staf kampung. Staf tersebut terdiri atas *tuangku sagi*, *tuangku manasah*, *ketua pemuda* dan *Lembaga Sosial Desa*.

*Tuangku sagi* adalah semacam wakil *tuangku imam mesjid* di dalam *kampung*. Dalam kehidupan sosial sehari—hari ia mengurus bidang keagamaan, yaitu memimpin sembahyang jamaah di manasah, mengurus hal—hal yang berkenaan dengan agama pada upacara kematian, memimpin upacara tahlil, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan upacara agama di *manasah*.

*Tuangku manasah* semacam pembantu dari *tuangku sagi*. Tetapi kadangkala kedua jabatan ini berada pada satu tangan. Dalam kegiatan keagamaan ia bertindak sebagai guru bagi anak—anak pada waktu belajar membaca Al Quran.

*Tuangku surau* adalah orang yang mengimami dan mengurus *surau*. Berbeda halnya dengan *tuangku sagi* dan *tuangku manasah*

yang umumnya kaum lelaki, sebaliknya *tuangku surau* adalah berasal dari kaum perempuan.

*Lembaga Sosial Desa* adalah semacam lembaga legislatif dan konsultasi *keucik*. Para anggotanya umumnya adalah para pemimpin informal kampung. Dalam kegiatan sosial sehari-hari mereka memberikan sumbangan pikiran kepada *keucik* dalam pelaksanaan pemerintahan *kampung*.

*Ketua pemuda* adalah pemimpin para pemuda di dalam *kampung*. Dalam kehidupan sosial sehari-hari ia memimpin para pemuda dalam hubungan mengawas keamanan, dan menggerakkan pemuda dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan kasar dan berat seperti pada upacara pesta dan sebagainya.

Kesemua jabatan itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling jalin-menjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan *kampung*. Masing-masing lembaga itu saling berhubungan secara horizontal, namun secara vertikal mereka tunduk kepada *keucik* sebagai pucuk pemerintahan *kampung*.

Sungguhpun pada tingkat *keucik kampung* adalah pemimpin atau kepala pemerintahan, namun secara vertikal ia tunduk kepada lembaga lain yang berada di atasnya yaitu *mukim*, camat dan seterusnya. Keadaan demikian erat kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menempatkan *keucik* atau kepala desa sebagai pejabat pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian *keucik* mempunyai fungsi ganda. Pada satu pihak ia merupakan pemimpin atau kepala kampung dan pada pihak lain ia merupakan wakil pemerintahan pusat.

Walaupun terdapat lembaga *mukim* yang menjembatani antara *keucik* dengan camat, tetapi tampaknya lembaga *mukim* ini sudah berkurang peranannya.

Berkurangnya peranan lembaga *mukim* ini barangkali erat kaitannya yang tidak menempatkan lembaga itu dalam struktur pemerintahan. Justeru itu sering diketemukan camat langsung berhubungan dengan *keucik* dalam meneruskan instruksi pemerintahan. Tambahan lagi dengan adanya pelbagai proyek desa yang hanya melibatkan pemerintahan kampung. Peranan *mukim* baru tampak apabila ada persengketaan antar kampung dalam kawasannya.

## LEMBAGA—LEMBAGA SOSIAL DALAM KOMUNITAS KECIL

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua mengenal beberapa lembaga sosial dalam bidang ekonomi, sosial, dan religi.

Lembaga sosial dalam bidang ekonomi yaitu *manyarayo*, dan *manyewo*. *Manyarayo* adalah suatu bentuk tolong—menolong atau bantu membantu antara seseorang dengan seseorang. Kegiatan ini tampak pada kegiatan pertanian, dan yang berhubungan dengan rumah tangga. Dalam hubungan dengan pertanian kegiatan *manyarayo* terlihat umpamanya pada kegiatan *menanam padi* (menanam padi di sawah), *manyiang rumpuk* (menyiang rumput), *mairiek padi* (mengirik padi). Dalam hubungan dengan rumah tangga kegiatan ini tampak pada kegiatan *maatok* (memperbaiki atap rumah yang terbuat dari daun rumbia), dan *mamaga* (memasang pagar) umpamanya. *Manyewo* adalah suatu bentuk hubungan pada kegiatan pertanian dan peternakan. Pada bentuk hubungan ini terjadi pola *patron—klient* antara pemilik dan penggarap atau pekerja. Tatacara pembagian hasil amat bergantung kepada bentuk dan sifat dari tanah yang digarap atau ternak yang dipakai.

Lembaga sosial lain yang ada pada kehidupan masyarakat adalah gotong—royong dan *manjanguk*. Kegiatan gotong royong adalah berlangsung pada pekerjaan—pekerjaan yang berat dan memerlukan tenaga kasar bagi kepentingan umum di dalam *kampung*. Kegiatan ini tampak pada pembuatan jalan *kampung*, pembuatan *panalob aie* (bendungan sawah), dan sebagainya.

*Manjanguk* yaitu pergi takziah kepada seseorang yang mendapat musibah. Pada kasus ini seseorang yang mendapat musibah akan diziarahi oleh para warga kampung. Mereka yang berziarah itu memberi pertolongan dalam bentuk tenaga maupun uang atau sedekah kepada orang bersangkutan.

### BAGIAN III. SISTEM PELAPISAN SOSIAL

#### PELAPISAN SOSIAL MASA YANG LALU

##### *Pelapisan sosial resmi*

Pada masa sebelum kemerdekaan suku—bangsa Aneuk Jamee mengenal pelapisan sosial yang berdasarkan kepada keturunan dan kekuasaan. Pada waktu itu terdapat 2 lapisan yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa. Kaum bangsawan terdiri dari para *datuk* yang

menjabat ke empat *datuk* dan *Zelfbestuurder* Samadua. Sedangkan rakyat biasa adalah mereka yang bukan tergolong kedalam kelompok pertama.

Perbedaan ke dua lapisan itu dinyatakan dalam hubungan hak dan kewajiban sebagaimana di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Para bangsawan memakai gelar *teuku datuk* di muka namanya. Disamping mewarisi tahta jabatan *datuk*, mereka juga mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam hubungan mahar perkawinan, dan pakaian serta tata upacara peralatan sewaktu mengadakan upacara yang berhubungan dengan daur hidup.

Perbedaan seperti ini sudah mulai menghilang setelah zaman kemerdekaan. Namun demikian mereka yang tergolong kedalam kaum bangsawan ini masih mempunyai anggapan bahwa diri mereka agak terpendang bila dibandingkan dengan rakyat biasa. Hal tersebut barangkali erat kaitannya dengan faktor sejarah, di mana kedudukan yang mereka miliki sejak zaman lampau menyebabkan mereka bisa meraih kedudukan tertentu pula setelah zaman kemerdekaan. Sebab, disamping kekayaan yang dimiliki, mereka telah menyekolahkan anak mereka. Dengan demikian anak-anak mereka akan mendapat kedudukan penting kembali setelah zaman kemerdekaan.

Keadaan demikian terlihat pada masa permulaan kemerdekaan, dimana para bangsawan masih terus menduduki jabatan tertentu (mukim dan camat) dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Hanya saja jabatan itu tidak diwariskan secara turun-temurun seperti pada zaman sebelum kemerdekaan.

#### *Pelapisan sosial samar.*

Masyarakat Aneuk Jamee di Samadua mengenal pelapisan sosial samar dewasa ini. Pelapisan sosial samar adalah suatu bentuk pelapisan sosial yang belum begitu jelas tentang konsepsi perbedaannya, atau dengan kata lain pelapisannya belum begitu mapan (6, 174-177).

Bentuk pelapisan sosial samar ini tampaknya muncul setelah zaman kemerdekaan, yaitu berbarengan dengan menghilangnya pelapisan sosial resmi di atas. Dalam kehidupan sosial sehari-hari hanya tampak pada sebutan sebutan tertentu yang menunjukkan identitas seseorang seperti *pegawai* (pegawai) bagi kalangan pegawai ne-

geri, *patani* (petani) bagi kalangan yang hidup dari pertanian, dan *urang barado* (orang berada) bagi kalangan yang mempunyai status sosial—ekonomi yang tinggi. Karena belum jelas konsep perbedaannya, maka masalah hak dan kewajiban antara masing—masing golongan itu belum begitu jelas.

#### PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Pelapisan sosial masa kini pada suku—bangsa Aneuk Jamee terdiri atas lapisan *datuk* (bangsawan), *tuangku* (ulama), *pegawai*, *petani*, dan *urang barado* (orang berada). Lapisan bangsawan merupakan lapisan yang mendasarkan kepada keturunan, dan dapat diturunkan kepada keturunannya. Lapisan pegawai dan petani mendasarkan kepada mata pencaharian hidup. Sedangkan lapisan orang berada mendasarkan kepada kekayaannya.

Lapisan bangsawan hingga saat sekarang masih tampak dalam kehidupan suku—bangsa Aneuk Jamee. Lapisan ini terlihat dalam panggilan sehari—hari dengan sebutan *datuk*. Lapisan *tuangku* merupakan lapisan orang—orang yang mempunyai pengetahuan dibidang agama. Lapisan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Karena lapisan ini bergerak dalam bidang agama seperti dalam bidang ibadah, kematian dan lain—lain lagi. Lapisan pegawai merupakan lapisan yang minoritas. Mereka ini terdiri dari orang—orang yang mempunyai fungsi didalam pemerintahan. Lapisan petani merupakan lapisan yang mayoritas dalam suku—bangsa Aneuk Jamee. Dan lapisan orang berada tampaknya semakin mendapat tempat yang baik dalam kehidupan sehari—hari, karena mereka dapat meningkatkan status sosial melalui pendidikan, sebab bagi mereka lebih mampu dari pada orang biasa.

Hubungan antar lapisan berjalan lancar. Hubungan ini dapat terjadi melalui perkawinan, hubungan tetangga, dan hubungan dalam pekerjaan. Suatu perkawinan sekarang tidak lagi dilihat dari lapisan mana calon suami—isteri, tetapi yang lebih diperhatikan adalah kesesuaian antara suami—isteri itu. Hubungan tetangga antara lapisan berjalan pula dengan baik.

Ada suatu prinsip bahwa famili yang setia adalah orang—orang yang terdekat (tetangga) bila dibandingkan dengan famili yang jauh. Karena bila ada sesuatu masalah orang yang paling dekatlah yang dapat diajak berbicara terlebih dahulu. Hubungan dalam pekerjaan se-

ring pula terjadi seperti pada saat—saat melakukan suatu pekerjaan bersama—sama. Mereka merasa mempunyai tanggung jawab yang sama misalnya dalam kegiatan gotong—royong, tolong—menolong antara sesama mereka dan lain—lain kegiatan sosial.

#### BAGIAN IV. PIMPINAN MASYARAKAT

##### GAMBARAN UMUM

Pimpinan dalam suatu masyarakat dapat merupakan suatu kedudukan sosial tetapi dapat juga proses sosial. Sebagai suatu kedudukan sosial pimpinan merupakan suatu kompleks dari hak—hak dan kewajiban yang dapat dimiliki seseorang. Sebagai suatu proses sosial pimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau badan—badan untuk menyebabkan aktivitas warga masyarakat atau kesatuan sosial khusus dalam masyarakat dalam peristiwa sosial (7,192).

Agak sukar kita membedakan antara pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini dalam komunitas kecil suku—bangsa Aneuk Jamee atau *Kampung* di Samadua. Sebab, kedua corak pimpinan tersebut sudah saling tumpang—tindih dalam struktur pimpinan *kampung*. Perkembangan sejarah yang dialami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua sejak masa lalu hingga saat sekarang tampaknya tidak membawa perubahan berarti dalam struktur pimpinan *kampung*. Perubahan struktur pemerintahan hanya berlangsung pada tingkat atas yaitu camat dan seterusnya. Karena itu pimpinan masyarakat pada tingkat *kampung* terus dilestarikan hingga saat ini.

Dalam hubungan diatas, maka tidak akan dibahas pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini secara terpisah. Karena apabila kita membicarakan pimpinan tradisional dalam struktur pemerintahan *kampung* berarti kita sudah membicarakan pula pimpinan masa kini dalam suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua. Justru itu akan dibahas pimpinan formal dan pimpinan informal saja berikut ini.

##### PIMPINAN TRADISIONAL

###### *Pimpinan Formal.*

Tiap *kampung* dalam suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua mengenal struktur pimpinan yang terdiri atas *keucik*, *tuangku sagi*, *tuangku manasah*, *tuangku surau*, dan *ketua pemuda*. Mereka ini se-

mua dianggap sebagai pimpinan formal di dalam kampungnya.

Bila dihubungkan dengan bentuk pimpinan, maka bentuk pimpinan dalam suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua dapat dikategorikan atas 2 bentuk, yaitu pimpinan mencakup dan pimpinan terbatas. Pimpinan yang tergolong dalam bentuk pimpinan mencakup adalah *keucik*. Sebagai kepala *kampung*, *keucik* mempunyai kekuasaan kepada seluruh bidang kehidupan kampung. Sedangkan pimpinan yang tergolong dalam bentuk pimpinan terbatas adalah *tuangku sagi*, *tuangku manasah*, *tuangku surau*, dan *ketua pemuda*. Sebagai aparat pemerintahan *kampung*, mereka merupakan pimpinan dengan kekuasaan terbatas pada bidang tertentu saja, sebagai contoh umpamanya *tuangku sagi* memimpin urusan keagamaan dan ketua pemuda memimpin urusan pemuda.

Bila dibandingkan ruang lingkup kepemimpinan antara *keucik* dengan pimpinan lainnya yang terdapat di dalam *kampung* tampak pada kita bahwa *keuciklah* yang memiliki kekuasaan yang mencakup pada seluruh bidang kehidupan *kampung*. Mengingat demikian tentu saja ruang lingkup pengaruh *keucik* menjangkau seluruh bidang kehidupan *kampung*, sedangkan ruang lingkup kekuasaan pimpinan lain hanya terbatas pada bidang tertentu saja.

Sebenarnya masih terdapat 2 pimpinan lain di samping yang telah disebutkan di atas yang mempengaruhi kehidupan *kampung*. Kedua pimpinan tersebut adalah dalam bentuk *tuangku imam masjid*, dan *keujruan sawah*. Beda antara kedua bentuk pimpinan ini dengan yang telah disebutkan di atas terletak pada luas kawasan pengaruh mereka. Bila pimpinan—pimpinan di atas ruang lingkup pengaruhnya hanya terbatas pada tingkat *kampung*, sedangkan kedua pimpinan terakhir mempunyai ruang lingkup pengaruh terhadap beberapa buah *kampung*. *Tuangku imam masjid* adalah pimpinan yang memimpin upacara sembahyang jamaah didalam kemesjidannya. Di samping itu, ia juga sering sebagai petugas pelaksanaan upacara akad nikah. *Keujruan sawah* adalah pimpinan yang bertanggung jawab mulai dari pembuatan bendungan sawah, pembagian air sawah, dan penentuan jadwal turun ke sawah. Dalam kegiatan kehidupan sosial *kampung*, kedua pimpinan terakhir saling bekerja sama dengan *keucik*.

Ada beberapa persyaratan yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa meraih kedudukan *keucik*, *tuangku sagi*, *tuangku mana-*

*sah*, *tuangku surau*, *ketua pemuda*, *tuangku imam masjid*, maupun *keujruan sawah* di Samadua. Persyaratan itu tentu amat tergantung dengan jenis kepemimpinan yang bersangkutan.

Untuk menjadi *keucik* ada beberapa syarat yang diperlukan. Di antaranya boleh disebutkan berasal dari kaum lelaki, senioritas (terutama berasal dari mereka yang keturunan pembangun desa), senioritas umur (paling tidak sudah kawin), berpendidikan sekedarnya (minimal tahu tulis baca), *berhartā* (paling tidak mencukupi kebutuhan hidup), tidak terlibat dalam kejahatan kriminal, berperangai baik, dan mendapat pengesahan dari pemerintah yaitu camat.

Untuk menjadi *tuangku sagi* dan *tuangku manasah* terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan. Diantaranya boleh dikatakan sebagai berikut ; berasal dari kaum lelaki, mengetahui paling kurang tentang dasar pengetahuan agama Islam, fasih membaca kitab suci Al Quran, pandai membaca doa selamat atau tahlil pada waktu upacara kematian, dan sebaliknya sudah berkeluarga.

Untuk menjadi *tuangku surau* terdapat beberapa syarat yang diperlukan. Diantaranya boleh dikatakan sebagai berikut ; berasal dari kaum ibu, mengetahui tentang dasar—dasar pengetahuan tentang Islam, dan fasih membaca kitab suci Al Quran.

Untuk menjadi *ketua pemuda* terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan. Diantaranya adalah sebagai berikut ; berasal dari pemuda yang berusia di bawah 40 tahun, berwibawa dalam arti disegani oleh para pemuda, dan berperangai yang baik.

Untuk menjadi *tuangku imam masjid* mempunyai persyaratan yang hampir sama seperti dimiliki oleh seseorang yang bakal menjadi *tuangku sagi* atau *tuangku manasah*. Perbedaannya hanya terletak pada kualitas kealiman dan senioritas saja. Seseorang yang bakal menjadi *tuangku imam masjid* diharapkan mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan lebih tinggi daripada *tuangku sagi* dan *tuangku manasah*, demikian juga halnya dengan senioritas umur, dimana para imam masjid diharapkan berusia agak tua (sekitar umur 40 keatas).

Untuk menjadi *keujruan sawah* diperlukan beberapa persyaratan. Diantaranya boleh dikatakan sebagai berikut ; bekerja sebagai petani sawah (paling tidak petani pemilik), mempunyai pengetahuan tentang tata peredaran musim, dan senioritas (paling tidak sudah berkeluarga).

### *Pimpinan informal*

Pimpinan informal yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukanlah pimpinan fungsional, karena itu ia tidak mempunyai jabatan tertentu yang diatur secara tersendiri. Namun demikian ia mempunyai pengaruh tertentu dalam kehidupan masyarakat, walaupun ia tidak memiliki wewenang seperti yang dimiliki oleh pimpinan formal.

Pada setiap kampung yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua ditemukan pimpinan informal tersebut. Mereka umumnya terdiri atas guru sekolah, ulama, dan hartawan serta cendekiawan yang terdapat di dalam *kampung*. Dengan kedudukan yang ia miliki itu, ia mempunyai pengaruh tertentu di dalam kehidupan sosial *kampung*. Mengingat demikian mereka sering menduduki jabatan tertentu di dalam kepanitiaan bila ada sesuatu kegiatan perkampungan. Di samping itu, mereka sering direkrut (ditarik) oleh *keucik* ke dalam badan *tuha peuet* atau *Lembaga Sosial Desa*. Kedua lembaga ini adalah semacam lembaga konsultatif, yang senantiasa memberikan petunjuk atau konsultasi kepada *keucik* dalam menyelenggarakan pemerintahan *kampung*.

Pimpinan sosial masa kini tidak dicantumkan lagi disini, karena pimpinan masa kini pada masyarakat Aneuk Jamee adalah lanjutan dari masa lalu (sama).

## BAGIAN V. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua mengenal sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial di sini dimaksudkan sebagai suatu sistem pengendalian yang ada dalam komunitas agar setiap orang berpikir dan bertindak—laku sesuai dengan nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam komunitas. Dengan adanya pengendalian ini diharapkan setiap warga, di samping menghayati nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam komunitas, juga berbuat, bertindak—laku sesuai dengan nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan tersebut.

Ada beberapa cara yang ditempuh untuk mewujudkan sistem pengendalian sosial di dalam suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua. Diantaranya adalah mempertebal keyakinan, memberi imba-

lan, mengembangkan rasa malu, dan mengembangkan rasa takut. Kesemua cara itu berjalan secara terintegrasi saling jalin menjalin dalam kehidupan sosial sehari—hari.

#### MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Suku Aneuk Jamee di Samadua adalah pemeluk agama Islam. Justeru itu pengendalian sosial dengan cara mempertebal keyakinan senantiasa dihubungkan dengan keyakinan agama yang mereka peluk yaitu Islam. Dalam kehidupan sosial sehari—hari ada beberapa cara yang ditempuh bagi tujuan pengendalian sosial. Di antaranya boleh dikatakan sebagai berikut ; melalui media pendidikan, sugesti sosial, propaganda, dan kepercayaan.

Pendidikan sebagai sarana mempertebal keyakinan biasanya dilakukan melalui lembaga masjid, manasah, surau, dan sekolah, yang terdapat pada setiap *kampung*. Para *tuangku imam masjid*, *tuangku sagi*, *tuangku manasah*, dan guru memegang peranan penting untuk mempengaruhi anak—anak, pemuda—pemudi, maupun orang tua supaya berpikir dan bertindak—laku sesuai dengan nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang dikehendaki oleh Islam. Cara yang ditempuh yaitu melalui ceramah agama, khutbah, pelajaran agama ( di sekolah ), dan melalui ceritera—ceritera baik ceritera yang digali di dalam agama maupun ceritera legende yang berkembang di dalam masyarakat, yaitu ceritera *batu balyie* (batu berlayar) dan ceritera *batu sumbang* (batu sumbang). Kedua ceritera itu mengkisahkan anak durhaka yang sudah berubah menjelma menjadi batu.

Untuk mengukuhkan ceritera tersebut seolah—olah benar terjadi, suku bangsa Aneuk Jamee di Samadua mempercayai batu yang menyerupai orang dan kapal yang terdapat di pinggir pantai Samadua adalah merupakan penjelmaan dari tokoh yang terdapat dalam ceritera.

Ceritera yang diungkapkan baik melalui ceritera—ceritera yang bersumber dari agama Islam mau pun ceritera legenda setempat merupakan sarana mempertebal keyakinan lewat sugesti sosial. Ceritera tersebut diteruskan dari mulut ke mulut oleh tukang ceritera. Mereka ini terdiri dari guru sekolah, tuangku masjid, *tuangku manasah*, *tuangku surau* maupun para orang tua kepada anak—anakannya. Batu—batu yang dianggap sebagai tokoh jelmaan itu se-

olah—olah bukti hidup akan kebenaran ceritera. Keadaan demikian pada gilirannya mempengaruhi terhadap orang lain, terutama anak-anak untuk berpikir dan bertingkah—laku sesuai dengan nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Propaganda sebagai sarana mempertebal keyakinan biasanya dilakukan melalui media khutbah, ceramah agama, pidato pada upacara perkawinan dan kematian, yang dilakukan secara rutin dalam kehidupan sosial *kampung*.

Pada setiap kesempatan ini si pembicara atau mubaligh memberikan tuntunan pengajaran etika atau akhlak sesuai dengan nilai—nilai, norma—norma, aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan sosial yang bersumberkan ajaran Islam.

Bila diperhatikan kesemua sarana yang dipergunakan di atas tampak bahwa kepercayaan kepada agama Islam adalah merupakan inti daripada usaha mempertebal keyakinan bagi pengendalian sosial. Mengingat demikian maka hampir semua tema baik menyangkut pendidikan, hikayat, dan propaganda semuanya berkisar tentang etika yang diharapkan oleh agama Islam.

#### MEMBERI IMBALAN.

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua mengenal juga suatu cara pengendalian sosial dengan jalan memberi imbalan kepada seseorang. Imbalan yang diberikan bisa saja dalam bentuk penghargaan maupun hukuman dalam bentuk benda atau materil.

Imbalan dalam bentuk penghargaan biasanya diberikan kepada seseorang yang berpikir dan bertingkah—laku sesuai dengan nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Bagi mereka yang berpikir dan bertingkah—laku demikian akan mudah meraih kedudukan tertentu dalam masyarakat seperti menjadi *keucik*, *tuangku manasah* dan sebagainya. Integritas pribadi yang dimiliki rupanya menimbulkan rasa hormat masyarakat pada dirinya.

Imbalan dalam bentuk hukuman biasanya diberikan bagi seseorang yang bertingkah—laku menyimpang atau *deviant* dari konsep ideal masyarakat. Tindakan menyimpang itu terdiri dari pelbagai macam bentuk. Ada dalam bentuk sikap, gerak—gerak, tutur kata, tingkah laku dan perbuatan. Aneka macam tindakan menyimpang itu ten-

tu berpengaruh pula terhadap kadar hukuman atau sanksi yang diperoleh oleh orang yang melakukan tindakan menyimpang itu dari masyarakat. Keadaan demikian dapat diperbandingkan misalnya pada kasus seseorang *warga kampung* yang kurang berpartisipasi dalam kehidupan sosial di dalam kampung dengan kasus seseorang yang menantang *keucik* di muka umum. Pada kasus pertama barangkali orang yang bersangkutan akan dikucilkan oleh masyarakatnya, sedangkan pada kasus kedua orang bersangkutan wajib mengisi *batie sirih* (sirih satu cerana) di muka majelis adat.

Bentuk sanksi yang dikenakan pada seseorang yang melanggar atau menyimpang dari konsep ideal masyarakat pada umumnya terdiri dari *nasi kunyit* (pulut kuning), *batie sirih*, dan *kambing*. *Batie sirih* terdapat pada setiap kasus tindakan menyimpang baik dalam kadar yang rendah maupun pada kadar yang tinggi, sedangkan *kambing* hanya dikenakan pada kasus—kasus yang berat seperti orang bertengkar di dalam bangunan suci yaitu mesjid, manasah, dan surau umpamanya. Sanksi yang dikenakan pada orang bersangkutan itu harus diberikan kepada *keucik* dan *tuangku sagi*.

Upacara penyerahan biasanya berlangsung di mesjid, manasah, surau, ataupun di rumah *keucik*. Imbalan yang diberikan itu lalu kamakan secara bersama—sama oleh seluruh masyarakat *kampung*.

Suatu bentuk lain dari pemberian sanksi adalah pengucilan. Pengucilan biasanya dilakukan kepada seseorang warga yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan sosial di dalam kampung. Orang yang demikian biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat *kampung*, yaitu dengan cara tidak mendatangi rumahnya pada saat ia menyelenggarakan upacara yang berhubungan daur hitup. Tindakan balasan yang diberikan oleh warga kampungnya tentu akan berpengaruh terhadap orang bersangkutan.

## MENGEMBANGKAN RASA MALU

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua juga mengenal suatu cara pengendalian sosial dengan mengembangkan rasa malu kepada seseorang. Rasa malu tersebut merupakan rintangan bagi orang bersangkutan untuk berbuat dan bertingkah—laku di luar konsep ideal masyarakat yaitu nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Karena nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku bersumber pada ajaran Islam, maka konsep ideal mereka juga berkaitan dengan Islam.

Sarana yang lazim dipakai untuk mengembangkan rasa malu adalah gossip atau pergunjangan. Gossip ini dilakukan terhadap seseorang warga kampung maupun pimpinan kampung yang berbuat dan bertingkah—laku di luar nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Diantaranya adalah perbuatan *sumbang* yaitu seseorang lelaki dewasa yang bertandang di rumah seseorang perempuan yang bukan muhrimnya, dan seseorang pimpinan *kampung* yang mempunyai tingkah laku tidak senonoh dan sebagainya. Pada kasus—kasus demikian orang bersangkutan akan dipergunjingkan oleh para warga *kampung*.

Gunjangan atau gossip itu dilakukan dengan memperkatakan atau mengejek tingkah laku orang bersangkutan oleh para warga *kampung* pada waktu mereka saling bertemu. Tempat mereka bertemu memperkatakan orang bersangkutan berlangsung di mana saja baik di rumah, di kedai, di masjid, di *manasah*, dan di surau. Dengan demikian berita itu akan berkembang luas dalam masyarakat *kampung*. Keadaan demikian tentu membawa pengaruh terhadap diri orang bersangkutan, sehingga menimbulkan rasa malu pada dirinya.

### MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua juga mengenal suatu cara pengendalian sosial dengan jalan mengembangkan rasa takut. Rasa takut itu dapat bersifat lahiriah maupun batiniah. Konsekwensinya orang bersangkutan akan enggan bertingkah—laku yang berada di luar nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Seperti halnya dengan sarana pengendalian yang lain, dalam mengembangkan rasa takut ini senantiasa mereka hubungkan dengan agama Islam dan adat istiadat setempat.

Betapa hubungan antara konsepsi kepercayaan agama Islam dengan sarana pengendalian sosial dengan jalan mengembangkan rasa takut ini terlihat pada pelbagai tindakan—tindakan yang menyimpang. Tindakan—tindakan tersebut antara lain *mancilok*

(mencuri), *bamukah* (berzinah), *manipu* (menipu) dan sebagainya. Adanya konsepsi yang menyebutkan bahwa orang bersangkutan akan masuk ke neraka pada hari kemudian tentu akan berpengaruh terhadap alam pikiran masyarakat yang bakal berbuat demikian. Tambahan lagi orang bersangkutan dipercai akan mendapat azab kubur sewaktu sudah meninggal. Bahkan pada tingkat tertentu orang yang bersangkutan akan menjelma menjadi dalam bentuk babi atau kera setelah ditanam di dalam kubur.

Di samping menghubungkan dengan ajaran Islam, mengembangkan rasa takut itu bisa juga digunakan dengan melalui *dando* (denda) terhadap orang yang melakukan tindakan menyimpang seperti sudah disebutkan di muka. Denda itu umumnya berbentuk *batie sirih*, *nasi pulut kuning*, dan *kambing*. Kadar denda amat tergantung dengan jenis tindakan yang ia lakukan.

#### BAGIAN VI. BEBERAPA ANALISA

Kesatuan hidup setempat atau komunitas terkecil pada suku-bangsa Aneuk Jamee di Samadua disebut *kampung* (kampung). Tiap kampung terbentuk dari kawasan pemukiman, kawasan persawahan, dan kebun. Sungguhpun demikian tidak berarti bahwa sesuatu teritorial yang mempunyai ciri—ciri di atas sudah dapat dikatakan sebagai sebuah *kampung*. Sebab masih terdapat beberapa syarat lain lagi untuk memperkuat sesuatu teritorial sebagai sebuah *kampung*. Syarat—syarat yang lain yaitu adanya *keucik*, *tuangku sagi*, *tuangku manasah* (atau mesjid), dan *surau*.

Bila dihubungkan secara geografis, kampung—kampung yang didiami oleh suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua pada dasarnya adalah kampung yang agraris, yang mendasarkan penghidupannya pada kehidupan bercocok—tanam.

Sungguhpun terdapat sebagian penduduk yang bekerja pada beberapa sektor lain di luar sektor pertanian, namun boleh dikatakan hampir semua mereka mengerjakan juga kegiatan pertanian baik bersifat sambilan ataupun utama.

Dengan kata lain, mereka belum bisa melepaskan sepenuhnya bidang pertanian di dalam kehidupannya.

Bila dihubungkan dengan arus komunikasi terutama transportasi, kampung—kampung yang dihuni oleh suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua tidak dapat dikatakan terisolir di Aceh Selatan

atau pantai barat Aceh. Karena itu gerak mobilitas dari kampung-kampung tersebut ke kawasan lain baik di pantai barat maupun ke bagian Aceh lainnya berjalan lancar.

Kampung-kampung tersebut pada dasarnya terbentuk dari proses perkembang-biakan para cacak-bakal pembangun kampung. Mereka ini merupakan inti dari warga kampung. Tetapi karena alasan pekerjaan atau perkawinan diketemukan juga sebagian kecil penduduk yang berasal dari luar di daerah itu. Mereka kebanyakan berasal dari kelompok etnis Aceh.

Di beberapa kampung yang dahulu kala didiami oleh kaum bangsawan masih diketemukan sebagian kecil golongan ini, yang merupakan sisa warisan masa lampau. Kecuali pada nama gelar sebutan sehari-hari saja, boleh dikatakan tidak ada perbedaan yang tegas mengenai hak dan kewajiban antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa lagi. Justeru itu boleh dikatakan tidak diketemukan pelapisan sosial resmi di Samadua.

Pucuk pimpinan *kampung* adalah *keucik*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan *kampung* sehari-hari pada dirinya melekat dua fungsi. Di satu pihak ia merupakan pimpinan pucuk yang kekuasaannya mencakup seluruh bidang kehidupan *kampung*, di pihak lain ia merupakan tangga paling bawah dari birokrasi pemerintahan. Kedudukan demikian tentu berpengaruh pada pengangkatan seorang *keucik*. Karena itu dalam pemilihan *keucik* senantiasa harus tertampung dua aspirasi yaitu warga *kampung* di satu pihak dan camat di pihak lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, *keucik* dibantu oleh seperangkat pembantu, yang mempunyai kekuasaan terbatas pada bidang kehidupan tertentu. Para pembantu tersebut terdiri dari *tuangku sagi*, *tuangku manasah*, *tuangku surau*, *ketua pemuda*, *tuangku imam masjid*, dan *keujuruan sawah*. Kesemua staf tersebut bersama-sama dengan *keucik* digolongkan kedalam pimpinan formal.

Disamping pimpinan formal masih diketemukan pimpinan informal pada setiap kampung. Pimpinan informal dalam suku Aneuk Jamee di Samadua adalah pimpinan yang tidak menduduki salah satu jabatan yang telah disebutkan di atas, tetapi mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat kampung. Mereka terdiri atas

pendekawian kampung, guru sekolah atau pegawai negeri, dan *urang barada* (orang kaya). Mereka sering direkrut di dalam kepantiaan kampung atau ke dalam lembaga *Tuha Peuet*.

Hubungan—hubungan sosial yang berlangsung antara warga kampung berlaku dalam suasana intim dan akrab. Keintiman dan keakraban itu dijalin oleh faktor ikatan kekerabatan, mata pencaharian, kultural dan keagamaan yang sama. Tambahan lagi kawasan pemukiman yang relatif sempit dan jumlah *warga kampung* yang relatif kecil memungkinkan kontak yang berlangsung antara para warga kampung dalam frekwensi yang tinggi. Kesemua itu menampakkan diri dalam pelbagai aktifitas sosial baik pada kegiatan tingkat perkampungan, dalam mata pencaharian hidup, dan yang berhubungan dengan upacara daur hidup yang diselenggarakan oleh seseorang secara individual.

Suku—bangsa Aneuk Jamee di Samadua mengenal sistem pengendalian sosial yang mengatur setiap warga *kampung* dalam berpikir, berbuat, dan bertingkah laku seperti yang diharapkan oleh nilai—nilai, norma—norma, dan aturan—aturan yang berlaku dalam lingkungan kulturalnya sangat diwarnai oleh kondisi sosial-kultural dan keagamaan (Islam). Sarana dalam mewujudkan pengendalian sosial adalah dengan cara mempertebal, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu, dan mengembangkan rasa takut. Kesemua sarana ini terjalin secara terintegrasi dalam kehidupan sosial sehari—hari. Jumlah penduduk yang relatif kecil, dan intensitas pergaulan yang tinggi mempengaruhi kepada efektivitas daripada pengendalian sosial.

**BAB. KE EMPAT**  
**KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KLUET**  
**BAGIAN I. IDENTIFIKASI**

**L O K A S I**

*Letak dan keadaan geografis*

Suku—bangsa Kluet mendiami kawasan lembah pada bagian pedalaman krieng Kluet beserta anak sungai krueng Kluet yaitu krueng Meungkap, krueng Simpali dan krueng Meunggamat. Krueng Kluet yang berpuccuk di gunung Leuser dan bermuara ke lautan Hindia itu sekarang merupakan batas alam antara 2 kecamatan, yaitu kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan, kabupaten Aceh Selatan. Mengingat suku Kluet mendiami kedua sisi lembah sungai itu sudah barang tentu secara administratif mereka terpecah dua yaitu kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan.

Bila digabungkan keseluruhannya, maka secara administratif suku Kluet mendiami 4 kemukiman dari 10 kemukiman yang membentuk kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan. Keempat kemukiman dimaksud adalah kemukiman Meunggamat dan Sejahtera di Kluet Utara, dan kemukiman Makmur dan Perdamaian di Kluet Selatan. Kemungkinan Meunggamat terdiri dari 13 buah kampung, kemukiman Sejahtera terdiri dari 8 buah kampung, kemudian Makmur terdiri dari 4 buah kampung, dan kemukiman Perdamaian terdiri dari 3 buah kampung.

Adapun 6 kemukiman yang sisanya lagi didiami oleh suku—bangsa Aceh dan Aneuk Jamee. Kemukiman—kemukiman tersebut bila dihubungkan dengan pengelompokan etnis—berada pada bagian timur, barat, dan selatan kawasan pemukiman suku bangsa Kluet. Sedangkan sisi bagian utaranya adalah kawasan kabupaten Aceh Tenggara yang didiami oleh masyarakat Alas. Dengan demikian suku Kluet itu mendiami suatu kawasan yang diapit oleh penduduk dari suku—bangsa Aceh dan Aneuk Jamee di bagian pesisir, dan masyarakat Alas di bagian pedalamannya.

Kawasan pemukiman suku Kluet yang berada dipedalaman membawa pengaruh terhadap arus transportasi. Jalan raya yang menghubungkan kota Banda Aceh dengan Bakongan tidak melintasi kawasan pemukiman mereka. Sarana yang menghubungkan ke

empat kemukiman itu dengan jalan raya yang melintasi bagian pesisir kedua kecamatan adalah melalui sungai atau jalan desa yaitu sepanjang 20 km. Dengan demikian lokasi mereka terletak 50 km jaraknya ke selatan kota Tapaktuan, ibukota kabupaten Aceh Selatan, atau hampir 500 km jaraknya ke selatan kota Banda Aceh.

Ke empat kemukiman yang didiami oleh suku—bangsa Kluet terhampar di atas areal seluas 250 km<sup>2</sup> dari luas kedua kecamatan yang berjumlah 600 km<sup>2</sup>.

Kawasan seluas 250 km<sup>2</sup> tersebut bukan terdiri dari lembah atau dataran rendah semata—mata, tetapi juga meliputi rawa, sungai, bukit dan pegunungan.

Tanah lembah yang terdapat di sepanjang sungai dibentuk oleh proses sedimentasi. Karena itu amat baik untuk tempat bercocok tanam.

#### *Pola perkampungan.*

Dewasa ini ada 28 buah kampung yang dihuni oleh suku Kluet. Kampung—kampung terletak sepanjang lembah krueng Kluet beserta anak sungainya.

Bila diperincikan secara lebih jauh, maka kampung—kampung yang didiami oleh suku—bangsa Kluet di kedua kecamatan adalah sebagai berikut : Ruak, Alur Mas, Limau Purut, Krueng Batu, Krueng Kluet, Pulo Kameng, kampuang Paya, dan kampung Tinggi di kemukiman Sejahtera. Koto, Simpang Tiga, Lawe Malang, Si Urairai, Jambo, Papan, Pulo Air, Malaka, Meursah, Simpang Dua, Alur Keujruen, kampung Indarung, dan kampung Padang di kemukiman Meunggamat. Kampung Sapik, Durian Kawan, dan kampung Alai di kemukiman Perdamaian. Kampung Sawah, Paya Dapur, Lawe Buluh Didi, Lawe Sawah, dan Pucuk Lembang di kemukiman Makmur. Kampung—kampung tersebut saling bergandengan sesamanya. Kadangkala antara beberapa deretan kampung dipisahkan oleh bukit atau sungai dengan deretan kampung yang lain. Bukit atau sungai tersebut merupakan batas alam antara satu kampung dengan kampung yang lain. Kecuali sungai kadangkala di temukan pula alur sebagai batasnya.

Terbentuknya perkampungan tampaknya erat kaitannya dengan cikal—bakal pembentuk atau pendiri kampung. Perkembang-

biakan cakar—bakal pendiri kampung sejalan dengan perkembangan zaman menyebabkan keanggotaan warga kampung kian bertambah pula. Bersamaan dengan pertambahan penduduk itu, maka rumah pendudukpun bertambah pula karena timbulnya rumah tangga baru. Mengingat demikian tidak heran apabila rumah penduduk hampir mengelompok pada kawasan tertentu di dalam kampung. Keadaan demikian kelihatan umpamanya di kampung Koto, Malaka, Durian kawan dan sebagainya. Sedangkan kawasan di luar tempat pemukiman yang terdapat di dalam kampung merupakan areal persawahan dan perkebunan.

Bangunan perumahan penduduk mempunyai pola konstruksi yang aneka macam. Kebanyakan di antaranya mempunyai konstruksi bertiang rendah (1—2 meter di atas tanah). Meskipun bertiang rendah, tetapi tidak menyerupai model *rumoh Aceh* (rumah Aceh). Selain bertiang rendah ditemukan juga rumah yang semi permanen atau permanen di atas tanah serta kedai dua tingkat. Kesemua model rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat berdiam oleh para penghuni. Hanya saja ada rumah tipe kedai sering juga dimanfaatkan lantai bagian bawah sebagai tempat berjualan atau menjahit.

Hampir setiap rumah mempunyai *brandang* (tong tempat padi). Tong tempat padi itu dibangun empat persegi bertiang kayu. Tong tersebut umumnya terdapat di dekat rumah. Kegunaannya adalah sebagai wadah tempat menyimpan padi setelah musim menuai.

Di samping rumah penduduk yang merupakan milik pribadi masih ditemukan beberapa bangunan lain yang merupakan milik perkampungan pada setiap kampung. Bangunan—bangunan tersebut adalah *meursah* (meunasah), *deyah* (surau kaum ibu), *rangkang* (tempat tidur pemuda), dan *mesjid* (terutama pada kampung tempat kedudukan mukim).

*Meursah* umumnya dibangun dalam bentuk semi permanen. Ia biasanya terletak ditengah—tengah perkampungan. Dalam kehidupan kampung sehari—hari *meursah* mempunyai beberapa fungsi. Fungsi—fungsi tersebut antara lain sebagai tempat pelajar mengaji atau membaca Al—Quran, tempat bersembahyang jamaah (kecu-ali hari Jumat), tempat penyelenggaraan upacara hari besar Islam

dan adat, balai pertemuan kampung, dan tempat tidur sebagian pemuda kampung apabila kampung tersebut tidak mempunyai *rangkang*.

*Deyah* umumnya dibangun dalam bentuk semi permanen. Seperti halnya dengan *meursah*, *deyah* juga umumnya terletak di tengah perkampungan. Dalam kegiatan perkampungan sehari-hari *deyah* merupakan tempat kaum ibu bersembahyang Jumat dan taraweh. Bila pemimpin *meursah* disebut dengan *teungku meursah*, maka pemimpin *deyah* disebut dengan *teungku deyah*. Hanya saja jenis kelamin yang berbeda, dimana *teungku meursah* adalah laki-laki, sebaliknya *teungku deyah* adalah perempuan.

*Rangkang* umumnya dibangun dalam pola konstruksi bertiang. Bedanya dengan rumah hanya terletak pada dapur. Bila rumah mempunyai dapur sebaliknya *rangkang* tidak mempunyai dapur. *Rangkang* umumnya terletak di dekat *meursah* atau mesjid. Dalam kegiatan kampung sehari-hari, *rangkang* adalah tempat para pemuda berkumpul dan tidur.

Semua kampung yang berderet pada kedua sisi sungai krueng Kluet terdapat jalan desa. Jalan desa ini merupakan urat nadi dalam menghubungkan kawasan itu dengan jalan raya lintas Banda Aceh — Bakongan yang melintasi bagian pesisir kedua kecamatan. Jalan desa itu terbentuk dari tanah liat, karena itu ia akan berlumpur tatkala musim penghujan. Kecuali jalan desa masih terdapat jalan setapak yang menghubungkan antara kampung dengan sawah, ladang, kebun, dan sungai. Di samping itu terdapat pula jalan pintas melalui sungai antara satu kampung dengan kampung lain yang berada saling bersebelahan sungai seperti antara Ruak dengan Lawe sawah. Dalam kasus seperti ini, penduduk mempergunakan transportasi dengan *bungki* (sampan) sebagai alat penyebrang.

Sungai yang melintasi ini hampir semua perkampungan itu mempunyai beberapa arti penting bagi kehidupan desa. Dalam kehidupan sehari-hari sungai tersebut berfungsi sebagai sumber pengairan sawah (irigasi gunung Pudong, irigasi gunung Digersang), sumber penangkapan ikan, dan tempat mandi serta mencuci pakaian.

## P E N D U D U K

Seperti sudah dikatakan bahwa penduduk yang mendiami

kedua kecamatan terdiri atas 3 suku bangsa, yaitu Aceh, Klue, dan Aneuk Jamee. Penduduk kedua kecamatan pada tahun 1979 berjumlah  $\pm$  29.705 jiwa. Sedangkan pada tahun yang sama jumlah penduduk pada keempat kemukiman yang dihuni oleh suku—bangsa Kluet adalah berjumlah 13.495 jiwa. Ini berarti 45.50 % dari jumlah penduduk kedua kecamatan.

Penduduk yang berjumlah 13.495 jiwa itu bukanlah terdiri dari orang Kluet saja. Tetapi termasuk juga ke dalamnya sebagian kecil para pendatang yang bermigrasi ke daerah itu. Amat sukar menetapkan jumlah yang pasti para pendatang itu. Namun berdasarkan pengamatan tidak kurang sekitar 1000 orang adalah para pendatang dari suku—bangsa Aneuk Jamee dan Aceh. Bila ditinjau dari segi lamanya datang, para pendatang itu dapat dikategorikan sebagai berikut. Para pendatang yang pindah ke tempat itu sejak tahun 1970 — an yang lalu dan para pendatang yang pindah menetap sebelum tahun 1970—an. Para pendatang yang tergolong dalam kelompok pertama umumnya adalah guru—guru sekolah. Mereka ini berada dalam jumlah kecil. Para pendatang yang tergolong dalam kelompok kedua umumnya adalah petani. Kebanyakan mereka berasal dari kecamatan Samadua Aceh Selatan. Mereka datang menetap ke tempat tersebut untuk membuka sawah, dan berkebun nilam. Para pendatang ini kebanyakan menetap pada kawasan tertentu, yang pada gilirannya membentuk suatu perkampungan pula. Keadaan demikian dapat disaksikan pada kampung Simpang dua dan kampung Koto Indarung di Meunggamat umpamanya.

Di samping terdapat pendatang yang bermigrasi ke daerah Kluet, sebaliknya terdapat pula sebagian penduduk Kluet yang sudah bermigrasi ke luar kawasan pemukiman mereka. Jumlah penduduk Kluet yang bermigrasi ini amat sukar ditetapkan dengan pasti. Tetapi berdasarkan pengamatan dapat diperkirakan sekitar 10% dari jumlah masyarakat Kluet yang mendiami ke empat kemukiman itu. Bila diperhatikan kepada arah mereka bermigrasi dapat dikategorikan kepada dua kelompok. Pertama kelompok yang pindah ke kota dan kedua mereka yang pindah ke daerah pedesaan di luar kawasan itu. Mereka yang pindah ke kota umumnya para pegawai negeri dan anak sekolah. Mereka ini misalnya menetap di kota Tapak Tuan, Banda Aceh dan Jakarta. Mereka

yang pindah ke daerah pedesaan umumnya pindah ke kemukiman-kemukiman lain di dalam kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan, serta ke ibukota kedua kecamatan.

Mereka yang pindah ini umumnya berlangsung karena proses kawin-mawin. Tetapi ada juga di antaranya yang pindah karena mengalihkan pekerjaannya dari bertani menjadi berniaga.

Hubungan—hubungan sosial yang berlangsung dalam interaksi sosial antara para pendatang dengan masyarakat Kluet dapat ditelaah dari pelbagai segi. Di antaranya yaitu dari segi pandangan, hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan pengaruh pendatang terhadap mereka.

Masalah pandangan penduduk asli atau masyarakat Kluet terhadap pendatang amat tergantung kepada status pribadi pendatang dengan status orang yang memandangnya. Bagi mereka yang pindah ke situ sebagai guru tentu saja dipandang terhormat oleh masyarakat setempat. Sedangkan bagi mereka yang pindah ke situ sebagai petani mendapat penghargaan yang sama seperti mereka juga. Kecuali si petani pendatang yang berhasil meraih kekayaan dalam bentuk sawah atau kebun yang luas, rumah yang besar, dan alat—alat elektronik serta kendaraan bermotor. Dalam kasus demikian si petani bersangkutan akan mendapat tempat terhormat oleh masyarakat. Sebaliknya bagi penduduk asli yang merupakan keturunan bangsawan, masih merasa dirinya lebih terhormat di dalam masyarakatnya.

Dalam segi perkawinan juga memperlihatkan hubungan yang wajar antara suku—bangsa Kluet dengan para pendatang. Keadaan demikian dapat difahami apabila diamati pada latarbelakang keagamaan (Islam) antara para pendatang dengan suku—bangsa Kluet. Mengingat hal itu maka lumrah berlangsungnya perkawinan antara pendatang dengan penduduk asli. Hanya saja bagi kalangan bangsawan, di mana menunjukkan preferensi untuk kawin dalam endogami keluarga (dalam batas—batas hukum Islam). Ini dapat dimengerti bila dihubungkan dengan kecendrungan untuk mempertahankan keaslian.

Dalam segi pekerjaan juga memperlihatkan hubungan yang wajar antara pendatang dengan penduduk asli. Bagi pendatang yang bekerja sebagai guru tentu mempunyai obyek pekerjaan yang

terpisah dengan sebagian besar penduduk setempat. Sedangkan bagi mereka yang bekerja sebagai petani kebun atau sawah tentu saja mempunyai obyek pekerjaan yang sama dengan penduduk setempat. Pada kasus yang kedua terjadi hubungan kerjasama dengan penduduk setempat dalam kegiatan—kegiatan pertanian.

Dalam segi partisipasi sosial pendatang dalam kehidupan sosial desa juga memperlihatkan suatu partisipasi yang wajar sekiranya tidak dikatakan besar. Partisipasi sosial para pendatang itu dinyatakan dalam kegiatan kerja—bakti perkampungan dan pada upacara daur hidup. Pada setiap kerja bakti kampung, seperti membuat jalan, perbaikan *meursah* atau *mesjid*, para pendatang ikut serta bersama—sama dengan para warga kampung lainnya. Demikian juga pada setiap upacara daur hidup yang diselenggarakan oleh seseorang kepala keluarga di dalam kampung, para pendatang ikut ambil bagian baik memenuhi undangan, memberi sumbangan dalam bentuk uang ataupun tenaga.

Bila diamati dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial yang berlangsung antara para pendatang dengan suku—bangsa Kluet dijalin oleh faktor latar belakang keagamaan dan rasa keterikatan sebagai warga kampung. Sungguh pun ada dua pola mata pencaharian para pendatang, tetapi dengan latar belakang keagamaan dan rasa keterikatan sebagai warga kampung menyebabkan hubungan mereka terjalin secara erat.

Interaksi sosial yang berlangsung antara para pendatang dengan suku—bangsa Kluet itu tentu dalam batas—batas tertentu berpengaruh dalam kehidupan sosial mereka sehari—hari. Keadaan demikian amat tampak dalam penggunaan bahasa sehari—hari. Di daerah—daerah yang banyak didatangi oleh para pendatang terlihat pengaruh penyerapan bahasa pendatang kepada bahasa Kluet setempat. Hal demikian tampak pada bahasa Kluet yang diucapkan oleh orang di kampung Krueng Lluet yang banyak bercampur dengan bahasa Aceh, dan bahasa Kluet yang diucapkan di Meunggamat yang banyak menyerap kata—kata dari bahasa Aneuk Jamee. Daya penyerapan ini tentu amat tergantung kepada tingkat intensitas pergaulan yang berlangsung antara penduduk setempat dengan pendatang.

## LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

### *Latar belakang sejarah*

Amat sukar bagi kita untuk melukiskan secara utuh latar belakang sejarah suku bangsa Kluet. Keadaan demikian erat kaitannya dengan langkanya sumber tertulis yang diperoleh. Menurut tradisi lisan yang berkembang di sana menyebutkan bahwa suku—bangsa Kluet pada mulanya adalah serumpun dengan suku—bangsa Alas dan Karo. Kemudian kawasan itu dianekasi oleh kerajaan Aceh Darussalam. Suntal Aceh Darussalam menempatkan dan menabalkan seorang *keujruen* sebagai wakilnya di daerah itu. Seberapa jauh pernyataan ini benar dapat diamati pada kenyataan bahwa semua pribadi dalam suku—bangsa Kluet senantiasa menghayati dirinya sebagai tergolong kedalam salah satu *marga*. Marga tersebut adalah sebagai berikut *Selian, Sebayang, Munthe, Pelis, Bencawan, dan Pinem*. Hanya saja nama *marga* tersebut tidak ditulis dibelakang nama seperti yang diketemukan pada suku—bangsa Karo atau Batak.

Ada dua mitos yang berkembang di sana, yang ikut mendukung pendapat bahwa suku—bangsa Kluet itu berasal dari Batak dan *keujruen* itu berasal dari Aceh. Kedua mitos tersebut adalah mitos Raja Anggang dan mitos Teuku Kilat Faja (malem Samot). Raja Anggang merupakan penguasa masyarakat Kluet sebelum datang Teuku Kilat Faja dari Aceh. Kedua mitos ini sebenarnya menggambarkan bagaimana proses penaklukan kawasan itu oleh Teuku Kilat Faja.

Dalam perkembangan berikutnya para turunan Teuku Kilat Faja muncul sebagai *keujruen* yang menguasai seluruh kawasan kecamatan Kluet Utara, Kluet Selatan, dan Bakongan dewasa ini. Keturunannya merasa dirinya sebagai termasuk ke dalam marga Pinem. Sedangkan keturunan dari Raja Anggang merasa dirinya termasuk ke dalam marga Selian. Dalam perkembangan berikutnya keturunannya mewarisi jabatan *Teuku Imam balai* (setingkat dengan *ule-balangcut*). Keturunan Teuku Kilat Faja mendiami daerah bagian barat *krueng* Kluet. Sedangkan keturunan Raja Anggang mendiami daerah bagian timur *krueng* Kluet dengan kedudukan di Durian Kawan dan Paya Dapur. Sedangkan keturunan Teuku Kilat Faja berdiam di daerah sekitar Pulo Kameng. Dalam proses berikutnya terjadi perkawinan antara keluarga keturunan Teuku Kilat Faja dengan keluarga keturunan Raja Anggang. Ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk mengekalkan hubungan mereka.

Ceritera mitos tersebut masih dipercaya sebagai suatu yang sekral oleh sebagian masyarakat Kluet. Merka masih mempercayai tempat-tempat tertentu sebagai tempat berlangsungnya seluruh kejadian di dalam kedua mitos. Tempat-tempat dimaksud antara lain gunung *Kalang Baloh*, gunung *Timu*, dan gunung *Teureubang*. Bahkan mereka masih mempercayai apabila berbunyi *taga* (guruh) saling bersahutan antara di gunung *Timu* dengan gunung *Kalang Baloh* merupakan pertanda ada salah seorang anggota keluarga *Raja Anggang* yang meninggal dunia.

Gelombang migrasi yang berlangsung terus-menerus dari orang Aceh yang berasal dari Aceh Besar dan Pidie, serta orang Aneuk Jamee dari daerah Minangkabau ke kawasan pesisir Kluet tentu berpengaruh terhadap susunan atau komposisi penduduk di daerah itu. Mereka diperkirakan datang sejak abad ke 17, yaitu masa pemerintahan Sultan di Aceh. Seperti halnya dengan orang Kluet, para pendatang dari orang Aceh dan Aneuk Jamee membentuk komunitas kecil dalam bentuk *gampong* (kampung). Dalam perkembangan berikut, beberapa buah *gampong* digabungkan di dalam sebuah daerah administratif *ulee balang* yang diperintah oleh seorang *uleebalangcut* (jabatannya berada setingkat di bawah camat atau hampir mirip dengan mukim). Para *uleebalangcut* yang terdapat dikawasan kecamatan Kluet Utara, Kluet Selatan, dan Bakongan termasuk juga *teuku imam balai* — tunduk kepada *keujruen* Keluet sebagai penguasa tertinggi di daerah itu.

Struktur pemerintahan yang demikian terus berlangsung hingga sampai dengan penjajahan Belanda dan Jepang. Para keturunan *Teuku Kilat Faja* secara terus menerus memegang jabatan *keujruen* Kluet. Sedangkan para keturunan *Raja Anggang* hanya memegang jabatan *teuku Imam balai* saja. Tatkala zaman kemerdekaan, wilayah kekeujruen Kluet dipecah-pecah atas 3 kecamatan, yaitu kecamatan Kluet Utara, Kluet Selatan, dan Bakongan. Masing-masing Kecamatan itu diperintah oleh seorang camat. Sedangkan wilayah keulebalangan dan imam balai dirubah menjadi kemukiman. Seterusnya jabatan *ulecalang cut* dan *teuku imam balai* ditukar sebutannya menjadi *mukim*. Sungguh pun sudah terjadi beberapa perubahan dalam struktur pemerintahan di kawasan Kluet, namun kenyataannya para *mukim* yang menjadi kepala *kemumiman* dikawasan pemukiman

orang Kluet tampaknya hingga saat sekarang masih dijabat oleh para keturunan Teuku Kilat Faja dan Raja Anggang.

#### *Sistem mata pencaharian*

Mata pencaharian pokok suku-bangsa Kluet adalah bercocok tanam. Mereka hidup sebagai *meusawa* (bersawah), *merumo* (berladang), dan *merumpus* (berkebun).

Tatacara pengolahan sawah kelihatannya masih agak sederhana, karena itu pengolahan sawah masih berlangsung setahun sekali. Pengairan sawah tampaknya amat tergantung kepada air sungai Krueng Kluet dan alur-alur yang terdapat disekitar kawasan persawahan mereka.

Kegiatan *merumo* dilakukan pada kawasan perbukitan yang terdapat disekitar kampung mereka. Tatacara *merumo* yaitu dengan jalan menebang dan membakar pokok kayu yang terdapat pada areal yang akan dijadikan perladangan. Hampir sama seperti sawah, ladang tersebut ditanami dengan tanaman padi. Kadangkala disela tanaman padi ditanam juga pelbagai tanaman muda.

Kegiatan *merumpus* dilakukan pada kawasan yang terdapat dipinggir sungai, dan bukit. Kebun tersebut ditanami dengan pelbagai jenis tanaman. Mulai dari tanaman muda yang diperlukan bagi kehidupan sehari-hari hingga ketanaman ekspor yaitu kopi dan nilam.

#### *Sistem kekerabatan*

Suku-bangsa Kluet mengenal rumah tangga sebagai kelompok keluarga terkecil. Dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga disebut dengan *jabu*. Ayah bertindak sebagai kepala rumah tangga. Tetapi kadangkala diketemukan juga ibu atau seseorang anggota keluarga yang lain sebagai kepala rumah tangga. Hal demikian terjadi karena perceraian atau pun si ayah sudah meninggal dunia.

Dalam kegiatan mata pencaharian yaitu *meusawa*, *merumo*, dan *merumpus*, semua anggota keluarga rumah tangga ikut mengambil bagian sesuai dengan kemampuannya. Keadaan demikian tercermin pada kegiatan-kegiatan seperti *nyayor* (membajak), *nyuani* (menanam), *remuah* (menyiang), dan *merahni* (menuai).

Di samping rumah tangga suku-bangsa Kluet mengenal

*kindred*. Yang dimaksud dengan *kindred* yaitu suatu kesatuan kekerabatan yang melingkari individu, seperti saudara sekandung, sepupunya baik dari pihak ayah maupun ibu, kemenakan dan saudara isterinya (2,110 – 111). Dalam kegiatan sosial sehari-hari terutama dengan upacara daur hidup mereka saling bantu-membantu.

*Kindred* yang dihayati dalam suku Kluet tersebut barangkali erat kaitannya dengan prinsip menetap sesudah kawin dan prinsip hukum (terutama perwalian). Suku Kluet mengenal prinsip menetap *uxorilokal*, karena itu seseorang yang baru kawin umumnya menetap di rumah penganten isteri. Keadaan demikian tentu berpengaruh kepada pergaulan si anak yang lahir dari perkawinan itu, di mana ia akan lebih dekat dengan kerabat ibunya. Tetapi dalam segi hukum (Islam), terutama perwalian ia lebih dekat kepada kerabat ayah. Dalam kehidupan sehari-hari kerabat pihak ayah disebut *pawalian* dan kerabat pihak ibu disebut *pamamoan*. Seberapa jauh hubungan kerjasama antara *pawalian* dan *pamamoan* terjalin dapat dihayati pada ungkapan yang berkembang *pamamoan patoh tiwon*, *pawalian tandok hutang* (famili pihak ibu sibuk bersusah payah dalam menyelenggarakan pesta, sedangkan famili pihak ayah yang bertanggung jawab bil terjadi ketekoran).

### *Sistem Religi*

Suku-bangsa Kluet pada umumnya memeluk agama Islam. Sungguhpun memeluk agama Islam, namun mereka sebagian masih mempercayai tokoh-tokoh dan tempat-tempat tertentu yang keramat atau mempunyai kekuatan sakti. Keadaan demikian tercermin pada keyakinan mereka akan kesaktian tokoh Teuku Kilat Faja dan Raja Anggang. Bahkan lokasi-lokasi yang disebutkan di dalam tradisi lisanitu seperti gunung Kalang Baoh, gunung Timu dan bunyi guruh (taga) dianggap sebagai sesuatu yang sakral.

Walaupun organisasi Muhammadiyah sudah mulai berkembang di daerah Kluet, tetapi organisasi ini tampaknya belum berhasil merubah cara kehidupan beragama suku-bangsa Kluet seperti apa yang dikehendaki oleh dasar dan tujuan organisasi pembaharuan itu. Mengingat demikian tidak heran apabila tatacara peribadatan mereka masih berorientasi kepada madzhab Syafii.

## B a h a s a

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, orang Kluet mempergunakan bahasa Kluet sebagai bahasa pengantar. Bahasa Kluet yang diucapkan oleh orang Kluet yang mendiami ke empat kemukiman itu memperlihatkan beberapa variasi antara satu tempat dengan intensitas pergaulan penduduk setempat dengan para pendatang dari luar yaitu orang Aceh dan Aneuk Jamee. Pergaulan atau interaksi yang berlangsung antara penduduk Kluet dengan para pendatang itu rupanya berpengaruh kepada bahasa yang mereka pergunakan. Hal demikian tampak pada beberapa kata bahasa Aceh dan Aneuk Jamee yang terserap kedalam bahasa Kluet.

Bila diamati dengan seksama ada 3 dialek bahasa Kluet yang diucapkan oleh suku Kluet. Ketiga dialek itu adalah dialek Paya Dapur, Meunggamat, dan Krueng Kluet. Diantara ketiga dialek tersebut tampaknya dialek Paya Dapur lah yang masih lestari. Mereka yang mempergunakan dialek ini adalah para penduduk yang mendiami kemukiman Perdamaian dan Makmur. Mereka yang berbicara dalam dialek Meunggamat adalah penduduk kemukiman Meunggamat. Bahasa yang mereka pakai sudah menyerap beberapa buah kata-kata dari bahasa Aceh dan Aneuk Jamee. Dialek yang ketiga adalah dialek Krueng Kluet. Mereka yang berbicara dalam dialek ini adalah terutama penduduk kampung Krueng Kluet dan beberapa kampung lain yang terdapat di kemukiman Sejahtera. Bahasa Kluet dalam dialek ketiga ini sangat dipengaruhi oleh bahasa Aceh.

## BAGIAN II BENTUK KOMUNITAS

### CIRI-CIRI KOMUNITAS KECIL

Kesatuan hidup setempat terkecil yang terdapat dalam suku-bangsa Kluet adalah *kampung*. tersebut terhampar di atas suatu kawasan, yang terdiri atas areal pemukiman, areal persawahan, dan kebun. Batas antara kampung dengan kampung yang lain bersifat alamiah, yaitu dalam bentuk sungai, alur atau gunung.

Disamping areal pemukiman, areal persawahan, dan areal perkebunan atau perladangan masih terdapat beberapa indikator lain yang mengesahkan sesuatu kawasan untuk disebut sebagai kampung. Indikator tersebut ada dalam bentuk fisik dan ada dalam bentuk struktur pemerintahan atau kelembagaan.

Indikator dalam bentuk fisik yaitu *perumahan*, *meursah*, *deyah*, dan *rangkang*. *Perumahan* yang dimaksudkan disini adalah perumahan penduduk. Tiap kampung dibentuk oleh sejumlah perumahan penduduk. Tentang berapa jumlah rumah penduduk untuk mengesahkan sebuah kampung tidak ada ketentuan yang pasti. Tetapi dari kenyataan sehari-hari tampaknya tiap kampung mempunyai jumlah rumah tidak kurang dari 50 buah. *Meursah* adalah tempat kaum lelaki bersembahyang jamaah (kecuali Jumat), tempat anak-anak mengaji, dan tempat musyawarah desa atau kampung. *Deyah* adalah surau atau langgar tempat kaum ibu bersembahyang jamaah pada hari Jumat dan taraweh pada bulan puasa. *Rangkang* yaitu tempat tidur para pemuda. Ketiga bangunan umumnya milik perkampungan dalam bentuk *meursah*, *deyah* dan *rangkang* tersebut umumnya terdapat di tengah kampung.

Indikator dalam bentuk struktur pemerintahan dan kelembagaan tampak pada struktur pemerintahan kampung dan lembaga-lembaga yang terdapat pada tiap perkampungan.

Tiap perkampungan dikepalai oleh seorang *keucik* (kepala kampung). Dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, ia dibantu oleh seperangkat pejabat yang terdiri atas *teungku mereusah* (atau teungku imam bila di kampung tersebut terdapat mesjid), *indung mudo* (ketua pemuda), *ketua anak bujang* (ketua pemuda), dan *petuo anak beru* (ketua kaum ibu). Masing-masing pejabat tersebut adalah pembantu *keucik* yang berfungsi menanganinya dalam bidang tertentu yang menyangkut kegiatan kampung.

## STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Di atas sudah diuraikan tentang ciri-ciri sebuah komunitas kecil dalam suku-bangsa Kluet yaitu kampung. Dewasa ini ada sejumlah 28 buah kampung yang terdapat di daerah pemukiman orang Kluet. Kampung-kampung tersebut seperti yang terdapat pada suku-bangsa Aceh adalah bagian dari komunitas yang lebih besar yaitu *kemukiman*. Dengan kata lain *kemukiman* adalah gabungan dari beberapa kampung. Seperti telah dikatakan dimuka bahwa ada 4 *kemukiman* yang terdapat di daerah Kluet. Sedangkan *kemukiman* adalah bagian dari kecamatan. Tiap *kemukiman* terdapat seorang *imam mukim* yang merupakan kepala *kemukiman*.

Kecuali aspek pemerintahan (*mukim*), terdapat juga aspek keagamaan yang merupakan pemersatu antara satu kampung dengan kampung lain di dalam wadah *kemukiman*. Keadaan demikian diwujudkan dalam bentuk mesjid yang merupakan tempat penduduk bersembahyang Jumat. Di samping bertindak sebagai imam pada waktu sembahyang jumat, imam mesjid umumnya bertindak sebagai qadhi pada setiap upacara nikah dalam setiap kampung yang berada di bawah kemesjidannya. Tetapi pada akhir-akhir ini sudah terdapat kecenderungan pada kampung tertentu untuk membangun sebuah mesjid bagi mereka. Keadaan demikian erat kaitannya dengan masalah penambahan penduduk dan letak lokasi kampung bersangkutan agak berjauhan dengan ibukota *kemukiman* tempat mesjid didirikan. Di *kemukiman* Sejahtera terdapat 3 mesjid yaitu Krueng Kluet, Alur Mas, dan Pulo kameng. Di Meunggamat terdapat 2 mesjid yaitu di Koto dan Simpang dua. Demikian juga di mukim Makmur terdapat 2 mesjid yaitu di Paya Dapur dan Lawe Sawah.

#### PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

Seperti telah disebutkan bahwa kepala pemerintahan pada tingkat perkampungan adalah *keucik*. Sebutan jabatan *keucik* ini sudah berlangsung sejak sebelum zaman penjajahan. Dengan timbulnya konsep desa setelah zaman kemerdekaan tampak kecenderungan untuk menggeneralisasikan sebutan desa dengan kampung dalam pengertian orang Kluet, walaupun konsepsi desa menurut yang berkembang di Jawa barangkali tidak sama dengan kampung pada masyarakat Kluet.

Sebagai kepala kampung, *keucik* dipilih oleh masyarakat perkampungan. Berapa lama masa jabatannya tidak tegas. Bila ia menunjukkan dedikasi yang baik masa jabatannya akan diperpanjang terus menerus oleh para pemilihnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan ia dibantu oleh suatu staf yang terdiri atas *teungku meursah* (atau teungku imam mesjid bila di kampung bersangkutan terdapat mesjid), *Lembaga Sosial Desa* (LSD), *keujruen blang*, *petua anak beru*, *indung mudo*, dan *ketua anak bujang*.

*Teungku meursah* adalah orang yang bertanggung jawab da-

dalam pelaksanaan pengajian dan sekaligus menjadi *imam meursah*. Ia dipilih atas kualifikasi mengerti pengetahuan keagamaan. Kecuali itu ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara kematian, memimpin upacara selamatan dan tahlil, dan mendampingi keucik dalam menyelesaikan sengketa.

*Keujruen blang* adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan bersawah. Kepemimpinannya tampak pada pembuatan irigasi atau bendungan sawah, pembagian air sawah, menentukan jadwal turun kesawah dan mendamaikan persengketaan yang berlangsung di dalam kawasan persawahan.

*Lembaga Sosial Desa* (LSD) adalah semacam lembaga legislatif dan konsultatif keucik. Para anggotanya terdiri atas pemimpin informal kampung. Mereka itu sering menjabat salah satu jabatan yang terdapat di dalam perkampungan, sehingga para anggotanya yang itu-itu juga.

*Petua anak beru* adalah pemimpin kaum ibu. Ia dipilih dari salah seorang kaum ibu yang sudah agak tua, dan cukup mengetahui tentang seluk-beluk adat. Karena itu *petua anak beru* tidak harus berasal dari isteri keucik. Tugasnya adalah memimpin kaum ibu pada setiap ada pesta yang menyangkut dengan upacara daur hidup.

*Indung mudo* adalah ketua pemuda. Ia dipilih dari salah seorang pemuda yang berwibawa di dalam kampung. Tugasnya adalah menggerakkan para pemuda pada setiap upacara yang menyangkut dengan upacara daur hidup, dari penjaga keamanan kampung.

*Ketua anak bujang* adalah ketua pemudi. Ia dipilih dari salah seorang pemudi yang berwibawa. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, ia menggerakkan pemudi sewaktu pelaksanaan upacara daur hidup yang terdapat di dalam kampung.

Kesemua aparat itu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling jalin-jemalin dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. *Keucik* — sebagai pucuk pemerintahan mendistribusikan wewenang yang dimiliki pada setiap lembaga sesuai dengan bidangnya.

Hubungan yang berlangsung antara masing-masing aparat ter-

sebut saling bekerjasama atau horizontal. Oleh karena itu masing-masing lembaga tidak bisa memberi komando pada lembaga yang lain. Namun secara vertikal kesemuanya tunduk kepada keucik sebagai kepala pemerintahan kampung.

Bila di satu pihak *keucik* merupakan pemimpin kampung, sebaliknya dipihak lain sebagai aparat pemerintahan, ia tunduk pula kepada birokrasi yang vertikal di atasnya yaitu *mukim* dan camat. Keadaan demikian erat kaitannya dengan sistim pemerintahan yang paling bawah. *Mukim* sebagai lembaga pemerintah yang berada di atas *keucik* tampaknya sudah agak berkurang peranannya dibandingkan dengan pada masa sebelum kemerdekaan. Dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari *keucik* langsung berhubungan dengan camat. Peranan *mukim* baru tampak apabila terjadi sengketa antara suatu kampung dengan kampung yang lain yang berada dalam kawasannya.

#### LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL DALAM KOMUNITAS KECIL.

Suku-bangsa Kluet mengenal beberapa lembaga sosial dalam bidang ekonomi, sosial, dan religi. Lembaga sosial yang terdapat dalam bidang ekonomi adalah *nyarayo* dan *nyewo*.

*Nyarayo* adalah suatu bentuk tolong-menolong atau bantu membantu antara beberapa orang petani (sawah, ladang, atau kebun). *Nyarayo* ini berlangsung apabila seseorang petani membutuhkan bantuan tenaga dari temannya. Sebagai imbalan ia akan menyumbangkan tenaga apabila teman yang membantunya memerlukan bantuan pula. Kegiatan *nyarayo* itu berlangsung pada kegiatan seperti *remuah* (menyiang rumput) *ngerik* (Merik padi), dan *Petaroh* (mengangkut). *Nyewo* yaitu disebutkan dengan sewa. Kegiatan ini berlangsung pada kegiatan bersawah atau berkebun. Dalam kegiatan itu petani yang tak mempunyai tanah menyewa tanah orang lain untuk digarap. Petani penggarap disebut *menyewo*, sedangkan petani pemilik disebut *panyewo*. Tatacara pembagian hasil umumnya yaitu 1 : 10.

Lembaga sosial yang terdapat dalam bidang kemasyarakatan yaitu *alongan*, *sukut*, dan *tukam*. *Alongan* yaitu suatu bentuk tolong-menolong atau bantu-membantu dalam upacara nikah, *turun belawe* (turun bayi ke air), *nendok wari* (duduk pakat), *ngilonge* (melihat bayi), dan sunat rasul. Pada waktu seseorang melakukan

upacara tersebut, maka para jiran dan kerabatnya ikut bekerjasama dalam bentuk menyumbang tenaga, benda dan pikiran. *Sukut* adalah panitia inti dalam setiap upacara yang disebutkan diatas. Mereka ini merupakan semacam panitia inti yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upacara. *Tukam* yaitu suatu bentuk tolong-menolong atau membantu pada upacara kematian atau musibah. Pada upacara ini, para penduduk memberi pertolongan dalam bentuk tenaga seperti mengetam kayu untuk keranda dan menggali kubur.

### BAGIAN III SISTEM PELAPISAN SOSIAL

#### PELAPISAN SOSIAL MASA YANG LALU

##### *Pelapisan sosial resmi*

Pada masa sebelum kemerdekaan masyarakat Kluet mengenal pembagian pelapisan sosial yang didasarkan kepada keturunan dan kekuasaan. Pada waktu itu dikenal ada 3 lapisan yaitu lapisan atas yang terdiri dari *keujruen* dan kerabat dekatnya, lapisan menengah yang terdiri dari *tuangku imam balai* dan kerabatnya, dan *rakyat biasa*.

Perbedaan ketiga lapisan itu dinyatakan juga dalam pelbagai wujud kehidupan sosial. Dalam hubungan dengan sebutan terdapat perbedaan, yaitu *teuku keujruen* untuk sebutan *keujruen*, *teuku imam balai* untuk *ulubalang* yang memerintah di Payadapur dan *teuku imam* untuk *ulubalang* yang memerintah di Meunggamat. Di samping itu terdapat juga perbedaan baik dalam segi mas kawin dan bentuk serta sifat upacara yang terdapat pada masing-masing tingkatan.

Perbedaan seperti itu sudah mulai menghilang setelah zaman kemerdekaan. Namun demikian mereka yang tergolong dalam kaum bangsawan ini masih beranggapan bahwa diri mereka lebih tinggi dari rakyat biasa. Hal tersebut erat kaitannya dengan faktor sejarah, sehingga mereka dari golongan inilah yang berasal menduduki kedudukan terbaik di dalam masyarakatnya lewat fasilitas dan kesempatan yang dimilikinya. Dari kedudukan yang dimilikinya mereka berhasil meraih kekayaan, menjalin hubungan kekerabatan sesama mereka, dan menyekolahkan anaknya. Mengingat demikian tidak heran apabila jabatan *mukim* (bahkan juga camat

pada waktu mula kemerdekaan) hingga sampai saat sekarang masih tetap berada dalam lingkaran kaum bangsawan.

#### *Pelapisan sosial samar*

Masyarakat Kluet mengenal suatu pelapisan samar dewasa ini. Pelapisan sosial samar ini adalah pelapisan sosial yang belum begitu jelas tentang konsepsi perbedaannya, atau dengan kata lain pelapisannya belum begitu mapan.

Dalam kehidupan sehari-hari hanya terdapat sebutan tertentu yang menunjukkan identitas mereka. Sebutan-sebutan tersebut antara lain *kak meusawah* bagi mereka yang bekerja sebagai petani sawah, *kak merumpos* bagi mereka yang berkebun, *kak pegawai* bagi pegawai negeri, dan *kak lot* bagi orang kaya.

Pengelompokan sosial berdasarkan *kak meusawah*, *kak meumpos* tadi lebih menunjukkan kepada okupasi daripada masing-masing penduduk. Sedangkan dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari di dalam perkampungan tidak memperlihatkan suatu perbedaan hak dan kewajiban secara tegas atau tajam, seperti yang diperlihatkan oleh golongan bangsawan dengan rakyat biasa pada zaman sebelum kemerdekaan.

### PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Setelah zaman Kemerdekaan Indonesia pelapisan sosial pada suku bangsa Kluet tidak lagi setajam seperti pelapisan sosial pada masa sebelum Kemerdekaan, kendatipun masih kita temui dalam kehidupan sosial sehari-hari. Perbedaan pemakaian atribut-atribut tidak lagi kita jumpai, hanya perbedaan masih dikenal dari segi sebutan saja. Kepada lapisan bangsawan dengan sebutan *teuku*, lapisan-lapisan penguasa dengan sebutan *bapak*, lapisan ulama dengan sebutan *teungku* dan lapisan hartawan dengan sebutan *urang berado*.

Pelapisan sosial masa kini dapat dibagi kedalam lapisan bangsawan, lapisan ulama, lapisan penguasa, lapisan hartawan dan lapisan orang biasa. Lapisan bangsawan adalah keturunan *teuku imam balai* (bangsawan) dari daerah Payadapur, dan keturunan *teuku imam* (bangsawan) dari daerah Meunggamat. Bangsawan

yang berasal dari kedua daerah ini dalam sebutan sehari-hari dipanggil dengan *teuku*.

Lapisan penguasa adalah mereka yang menjabat fungsi pemerintahan seperti, mukim, geucik, camat dan sebagainya. Di samping menjabat fungsi pemerintahan mereka mempunyai pengaruh pula dalam kehidupan komunitas kampung.

Lapisan ulama adalah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan dan diakui oleh masyarakat sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar baik dalam komunitas kecil maupun dalam komunitas yang lebih besar. Lapisan hartawan adalah orang-orang kaya. Mereka mempunyai kemampuan yang lebih dari segi kekayaan seperti memiliki tanah yang luas/kerbau yang banyak, bila dibandingkan dengan orang biasa. Lapisan orang biasa adalah mereka yang tidak termasuk kedalam lapisan yang tersebut diatas tadi.

#### BAGIAN IV PIMPINAN MASYARAKAT

##### GAMBARAN UMUM

Pimpinan dalam suatu masyarakat dapat merupakan suatu kedudukan sosial tetapi juga suatu proses sosial. Sebagai suatu kedudukan sosial pimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki seseorang. Sebagai suatu proses sosial pimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan untuk menyebabkan aktivitas warga masyarakat atau kesatuan sosial khusus dalam masyarakat dalam peristiwa sosial (3, 192).

Agak sukar bagi kita untuk membedakan antara pimpinan tradisional dengan pimpinan masa kini dalam suku-bangsa Kluet. Sebab kedua corak pemimpin tersebut sudah tumpang tindih dalam struktur pimpinan yang terdapat pada komunitas kecil (kampung) di dalam suku-bangsa Kluet. Perkembangan sejarah yang dilalui oleh suku-bangsa Kluet sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga ke zaman kemerdekaan tampaknya tidak membawa perubahan yang berarti dalam struktur pemerintahan pada tingkat kampung. Perubahan hanya berlangsung pada tingkat *ulebalang* atau *teuku imam balai* dan *keujruen* saja. Karena itu pimpinan

masyarakat pada tingkat kampung masih bertahan bahkan dikhukulkan terus hingga dewasa ini. Mengingat kaburnya batasan antara pimpinan tradisional dengan pimpinan masa kini yang terdapat di lapangan, maka pembahasan di bawah tidak akan diklasifikasikan berdasarkan pimpinan tradisional dengan pimpinan masa kini, melainkan antara pemimpin formal dan pimpinan informal saja. Karena apabila kita membicarakan pimpinan tradisional dalam suku-bangsa Kluet berarti kita sudah membicarakan pimpinan masa kini pula.

## PIMPINAN TRADISIONAL

### *Pimpinan formal*

Tiap kampung pada suku-bangsa Kluet mengenal struktur pimpinan yang terdiri atas *keucik*, *teungku meursah* (teungku imam mesjid bila di kampung itu terdapat mesjid), *indung mudo*, *petua anak beru*, *ketua anak bujang*, dan *keujruen blang*. Mereka ini dianggap sebagai pemimpin formal dalam kampungnya.

Bila dihubungkan dengan bentuk pimpinan, maka bentuk pimpinan yang terdapat dalam suku-bangsa Kluet dapat dikategorikan atas 2 bentuk, yaitu pimpinan mencakup dan pimpinan terbatas. Pimpinan yang tergolong dalam bentuk pimpinan mencakup adalah *keucik*. Sebagai kepala kampung *keucik* mempunyai kekuasaan dalam seluruh bidang kehidupan kampung. Pimpinan yang tergolong ke dalam bentuk pimpinan terbatas adalah *teungku meursah*, *indung mudo*, *petua anak beru*, *ketua anak bujang*, dan *keujruen blang*. Sebagai aparat pemerintahan kampung ia merupakan pemimpin dengan kekuasaan terbatas pada bidang yang ditanganinya. Sebagai contoh, *teungku meursah* adalah pimpinan yang terbatas hanya pada bidang keagamaan saja, dan *keujruen blang* adalah pimpinan yang terbatas hanya pada bidang urusan persawahan saja.

Bila dibandingkan ruang lingkup kepemimpinan antara *keucik* dengan pimpinan lainnya yang terdapat di dalam kampung tampak pada kita bahwa *keucik*lah yang memiliki kekuasaan yang mencakup pada seluruh bidang kehidupan kampung. Mengingat demikian tentu saja ruang lingkup pengaruh *keucik* menjangkau seluruh bidang kehidupan kampung, sedangkan ruang lingkup pengaruh pimpinan yang lain hanya terbatas pada bidang kehidupan

tertentu saja.

Suku-bangsa Kluet mengenal pelbagai persyaratan atau sifat yang diperlukan oleh seseorang untuk masa bisa muncul sebagai pimpinan masyarakat baik dalam bentuk *keucik*, *teungku meursah*, *indung mudo*, *petua anak beru*, maupun *keujruen blang*. Persyaratan tersebut amat tergantung dengan jenis pimpinan dimaksud.

Suku-bangsa Kluet mengenal beberapa persyaratan untuk menjadi *keucik*. Diantaranya adalah laki-laki, senior bertempat tinggal (terutama mereka yang asal membangun desa), senioritas umur (paling tidak sudah berkeluarga), berpendidikan sekedarnya (minimal tahu tulis baca), berharta (paling tidak mencukupi kebutuhan hidup), tidak terlihat dalam kejahatan kriminal, dan terakhir mendapat pengesahan dari pemerintah atau camat setempat.

Suku-bangsa Kluet mengenal pula beberapa persyaratan untuk menjadi *teungku meursah*. Diantaranya adalah laki-laki, mengetahui tentang dasar-dasar pengetahuan tentang agama Islam, kesalehan dan ketaatan dalam beribadat, pandai membaca Al Qur'an dan mengajarnya, pandai membaca doa selamat pada waktu tahlil, dan sebaiknya sudah berkeluarga.

Suku-bangsa Kluet mengenal beberapa persyaratan untuk menjadi *indung mudo*. Berusia relatif muda (di bawah 40 tahun), berwibawa, dalam arti disegani oleh para pemuda.

Suku-bangsa Kluet mengenal pula beberapa persyaratan untuk menjadi *petua anak beru*. Di antaranya berasal dari kaum ibu, cukup mengerti tentang adat-istiadat yang berkenaan upacara daur hidup, senior dalam umur (dalam artian sudah bersuami), berwibawa, dalam artian disegani oleh kaum ibu.

Suku-bangsa Kluet mengenal beberapa persyaratan untuk menjadi *keujruen blang*. Diantaranya adalah, cukup mengerti tentang peredaran musim dan tatacara turun ke sawah, bekerja sebagai petani sawah, senior, paling kurang sudah berkeluarga.

#### *Pimpinan informal*

Pimpinan informal yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukanlah pimpinan fungsional, karena itu ia tidak mempunyai ja-

batan tertentu yang diatur secara tersendiri. Namun demikian ia mempunyai pengaruh tertentu dalam kehidupan masyarakat, walaupun ia tidak memiliki wewenang seperti yang dimiliki oleh pimpinan formal.

Setiap kampung yang didiami oleh suku-bangsa Kluet ditemukan pimpinan informal tersebut. Ia umumnya berasal dari guru sekolah SD ataupun orang yang alim dalam ilmu agama, tetapi tidak menduduki sesuatu jabatan pada perangkat kampung. Dengan kualitas kemampuan yang ia miliki ia dianggap cendekia oleh masyarakatnya. Justeru itu ia senantiasa tampil dalam kegiatan kampung seperti dalam pelbagai panitia tingkat kampung. Kecuali sering duduk pada panitia tingkat kampung, ia sering juga direkrut ke dalam *Lembaga Sosial Desa* (LSD) ataupun lembaga *Tuha Peut*. Kedua lembaga ini merupakan semacam lembaga konsultatif yang senantiasa memberikan nasihat kepada kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

## BAGIAN V SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Suku-bangsa Kluet mengenal sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial di sini dimaksudkan sebagai suatu sistem pengendalian yang ada dalam suatu komunitas agar setiap warga dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas. Dengan adanya pengendalian ini diharapkan setiap warga, di samping menghayati nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan, juga berbuat, bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan tersebut. Sebagai pemeluk agama Islam, maka nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Kluet amat diwarnai oleh Islam.

Ada beberapa cara yang ditempuh untuk mewujudkan sistem pengendalian sosial di dalam suku-bangsa Kluet. Di antaranya adalah dengan mempertebal keyakinan, memberi imbalan, mengembangkan rasa malu, dan mengembangkan rasa takut. Kesemua cara itu berjalan secara jalin-menjalin dalam kehidupan sosial sehari-hari.

## MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Suku-bangsa Kluet menggunakan beberapa cara dalam mempertebal keyakinan penduduk bagi tujuan pengendalian sosial. Di antaranya adalah lewat media pendidikan, sugesti sosial, propaganda, dan kepercayaan.

Pendidikan sebagai sarana mempertebal keyakinan biasanya dilakukan melalui lembaga *meursah* yang terdapat pada setiap kampung. Di *meursah* anak-anak diajarkan oleh *teungku meursah* bagaimana ia seharusnya bersikap, berbicara, dan bertingkah laku terhadap orang tua dan *teungku meursah*. Pelajaran etika atau akhlak ini diajarkan selaras dengan tuntutan agama Islam. Sebenarnya *meursah* (demikian juga *deyah*) sering juga dimanfaatkan sebagai wadah tempat ceramah agama yang diselenggarakan secara rutin oleh masyarakat kampung. Ceramah agama juga merupakan salah satu media bagi pengajaran pelajaran etika atau akhlak terhadap orang dewasa.

Sugesti sosial sebagai sarana mempertebal keyakinan dilakukan dengan pelbagai cara. Kebanyakan adalah melalui ceritera atau hikayat-hikayat yang berkembang di dalam masyarakat. Ceritera dan hikayat tersebut antara lain, ceritera Teuku Kilat Faja, ceritera Raja Anggang, Hikayat Malem Diwa dan lain-lain. Kesemua hikayat itu mengandung nilai-nilai keagamaan, akhlak, sejarah dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku para individu yang menghayati ceritera atau hikayat itu.

Propaganda sebagai sarana mempertebal keyakinan biasanya dilakukan melalui media khutbah, pidato pada upacara perkawinan dan kematian, dan ceramah agama yang dilakukan secara rutin. Pada setiap kesempatan itu si pembicara atau mubaligh senantiasa memberikan pengajaran etika atau akhlak sesuai dengan tuntunan yang diharapkan oleh agama Islam.

Bila diamati dari sarana yang dipergunakan dalam mempertebal keyakinan di atas tampak pada kita bahwa kepercayaan kepada agama (Islam) merupakan inti dari pada usaha mempertebal keyakinan bagi pengendalian sosial. Hampir semua tema baik menyangkut pendidikan, hikayat, dan propaganda semuanya berkisar tentang etika yang diharapkan oleh agama Islam.

## MEMBERI IMBALAN

Masyarakat Kluet mengenal suatu cara pengendalian sosial dengan jalan memberi imbalan kepada seseorang. Imbalan yang diberikan bisa saja dalam bentuk penghargaan dan hukuman dalam bentuk benda atau materil.

Imbalan dalam bentuk penghargaan biasanya diberikan kepada seseorang yang bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat banyak. Mereka yang bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan cita-cita masyarakat itu mudah sekali meraih kedudukan pimpinan di dalam masyarakat. Hal demikian tercermin pada kualifikasi seseorang menjadi pemimpin seperti *keucik*, *indung mudo* dan sebagainya. Tentu saja di samping persyaratan sikap dan tingkah laku tadi masih diperlukan beberapa persyaratan lain seperti yang sudah disebutkan pada bagian terdahulu.

Imbalan dalam bentuk hukuman biasanya diberikan bagi seseorang yang bertingkah laku menyimpang atau *deviant* dari konsep idel masyarakat dan menyalahi adat. Bagi seseorang (terutama pemimpin) yang melakukan tindakan menyimpang ini seperti mencuri atau berzina biasanya akan segera berkurang penghargaan masyarakat kepadanya. Konsekwensinya ia terpaksa meletakkan jabatannya akibat tidak ada perasaan percaya masyarakat lagi kepadanya. Bagi seseorang yang menyalahi adat yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan atau tingkah laku yang melanggar akan mendapat ganjaran sepadan dengan tindakan menyimpang yang dilakukannya. Tindakan menyimpang yang dianggap melanggar adat diantaranya adalah berkelahi di atas *meursah*, *deyah* dan *mesjid*, mengganggu tunangan orang, melepaskan ternak ke dalam sawah yang ditanami dengan tanaman padi dan sebagainya. Imbalan hukuman yang diberikan adalah dalam pelbagai macam bentuk. Tetapi umumnya dalam bentuk *nakan kuning* (pulut kuning), *kambing*, dan *kerboo* (kerbau). Upacara penyerahan atau pemberian imbalan tersebut senantiasa harus dihadiri oleh pimpinan masyarakat kampung, yaitu *keucik* dan *teungku meursah* (atau teungku imam mesjid). Maksud dari imbalan tersebut adalah menyadarkan orang yang bersangkutan akan kesalahan yang ia lakukan, di samping untuk merukunkan kembali per-

tikaian antara kedua belah pihak yang saling bersengketa.

Salah satu bentuk sanksi lain yang diberikan kepada orang *deviant* yaitu pengucilan. Pengucilan ini biasanya dilakukan kepada seseorang warga kampung yang tidak mau berpartisipasi kepada segala kegiatan perkampungan. Cara yang dilakukan oleh pimpinan kampung untuk mengucilkan orang yang bersangkutan yaitu dengan tidak mendatangi rumahnya pada waktu ia melakukan kegiatan yang berkenaan dengan daur hidup. Bila tindakan itu berlangsung tentu saja upacara daur hidup yang diselenggarakan oleh orang yang bersangkutan akan mengalami kesulitan. Tindakan demikian merupakan suatu tindakan yang efektif bagi mengendalikan orang yang mencoba *deviant* terhadap masyarakat kampung.

#### MENGEMBANGKAN RASA MALU

Suku-bangsa Kluet mengenal suatu cara pengendalian sosial dengan mengembangkan rasa malu kepada seseorang. Rasa malu tersebut merupakan rintangan bagi orang bersangkutan untuk berbuat dan bertingkah laku diluar nilai-nilai, norma-norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat kampungnya. Sarana yang lazim dipakai untuk mengembangkan rasa malu itu adalah gossip atau pergunjangan.

Gossip atau pergunjangan ini biasanya dilakukan terhadap seseorang warga kampung yang berbuat atau bertingkah laku di luar nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan masyarakat kampung. Diantaranya seperti berzina, seorang laki-laki dewasa yang bertandang di rumah seorang gadis atau janda yang bukan muhrimnya, dan seseorang yang tidak mengadakan selamatan atau kenduri terhadap upacara daur hidup yang dilakukannya dan sebagainya. Bagi diri orang yang bersangkutan akan mengalami nasib akan dipergunjingkan oleh para tetangga warga kampungnya.

Gunjing atau gossip itu biasanya dilakukan dengan cara mengejek dan memperkata orang yang bersangkutan oleh para warga kampung sewaktu mereka saling bertemu. Tempat mereka bertemu untuk memperkata orang bersangkutan bisa saja di tempat umum seperti *meursah*, mesjid, *deyah*, pasar dan tempat permandian umum, dan bisa pula di rumah tetangga sewaktu mereka saling berkunjung. Luas areal kampung yang relatif sempit dan

jumlah penduduk yang relatif sedikit sehingga hal yang dipergunjingkan itu dalam tempo sekejap sudah menyebar ke seluruh kampung. Keadaan demikian tentu membawa pengaruh terhadap orang yang dipergunjingkan itu sehingga mengakibatkan ia tidak berani lagi melakukan tindakan atau perbuatan tingkah laku yang berada di luar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

### MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Orang Kluet mengenal juga suatu cara pengendalian sosial dengan jalan mengembangkan rasa takut. Rasa takut itu dapat bersifat lahiriah maupun batiniah. Konsekwensinya seseorang tidak berani berbuat dan bertingkah laku diluar nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat kampungnya.

Dalam mengembangkan rasa takut, masyarakat senantiasa mengkaitkan dengan kepercayaan (agama Islam) dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Kluet. Hal demikian tampak pada seseorang yang melakukan perbuatan dan tingkah-laku yang berada diluar norma-norma, dan aturan-aturan lingkungan sosialnya. Tindakan-tindakan tersebut antara lain mencuri, berzina, durhaka kepada orang tua, membunuh dan sebagainya. Adanya suatu konsepsi dalam Islam yang menyebutkan orang demikian akan masuk ke neraka setelah meninggal dan azab kubur yang bakal diterima sewaktu berada dalam liang lahat, tentu membawa pengaruh terhadap diri orang yang bersangkutan. Kecuali hukuman-hukuman yang bakal diperoleh di dalam masyarakat bahwa orang yang bertingkah tidak baik selama hayatnya akan menjelema menjadi babi atau kerbau sewaktu ia ditanam ke dalam kubur.

Di samping dikaitkan dengan kepercayaan (Islam), suku-bangsa Kluet juga mengkaitkan perbuatan dan tingkah laku seseorang yang berada diluar nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya dengan sanksi-sanksi tertentu yang telah dilembagakan oleh masyarakatnya. Sanksi-sanksi tersebut adalah antara lain bagi sepasang remaja yang *kawin letun* (kawin lari) akan dikenakan denda seekor kambing tatkala ia kembali ke kampungnya. Bagi sepasang pemuda-pemudi yang berzina dulu baru kawin akan dikenakan denda satu ekor kambing juga,

sedangkan bagi seseorang yang telah berkeluarga berzina dengan orang lain tetapi tidak bisa nikah akan didenda. Daging kambing akan dimasak di rumah *keucik* atau di *meursah* dan untuk dimakan secara bersama oleh masyarakat kampung. Selain dari hukuman dalam bentuk denda terdapat juga hukuman yang lain yaitu dalam bentuk pengucilan seperti yang sudah disebutkan pada bagian yang lalu.

## BAGIAN VI BEBERAPA ANALISA

Kesatuan hidup setempat atau komunitas terkecil pada suku-bangsa Kluet disebut kampung. Tiap kampung terbentuk oleh kawasan pemukiman, kawasan persawahan, dan kawasan perkebunan (termasuk ladang). Sungguhpun demikian tidak berarti bahwa setiap teritorial yang sudah mempunyai syarat di atas dapat terus dinyatakan sebagai sebuah kampung. Sebab masih terdapat beberapa syarat lagi untuk memperkuat sesuatu teritorial sebagai sebuah kampung. Syarat-syarat yang lain yaitu adanya *keucik*, *teungku meursah* (atau mesjid), dan *deyah*.

Bila dihubungkan secara geografis, kampung-kampung dari suku-bangsa Kluet adalah kampung-kampung yang agraris yang mendasarkan mata pencahariannya kepada pertanian (sawah, kebun, dan ladang). Selanjutnya bila dihubungkan dengan komunikasi atau transportasi dapat digolongkan kepada kampung pedalaman yang hubungan fisiknya relatif terisolir.

Kampung-kampung tersebut terbentuk melalui proses berkembang-biakkan para cikal-bakal pembangun kampung. Mereka ini merupakan penduduk inti dari suatu kampung. Tetapi karena alasan pekerjaan atau perkawinan diketemukan sebagian kecil para pendatang yang bermigrasi atau menetap pada sesuatu kampung. Mereka umumnya beraal dari kelompok etnis Aceh dan Aneuk Jamee.

Pada beberapa kampung tertentu diketemukan sebagian kecil golongan bangsawan. Mereka ini merupakan sisa dari warisan masa lampau. Kecuali pada nama gelar sebutan sehari-hari, boleh dikatakan tidak ada perbedaan yang tegas dan tajam antara golongan bangsawan dan rakyat biasa di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Justru itu tidak ada peraturan yang mengatur perbedaan hak dan

kewajiban antar golongan bangsawan dengan rakyat biasa.

Pucuk pimpinan kampung adalah *keucik*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sehari-hari pada dirinya melekat dua fungsi. Di satu pihak ia merupakan pimpinan pucuk yang kekuasaannya mencakup seluruh bidang kehidupan kampung. Di Di pihak lain ia merupakan tangga paling bawah dari birokrasi pemerintah pusat. Dengan kata lain ia merupakan wakil pemerintah pusat dalam menyampaikan pesan kepada rakyat. Kedudukan demikian tentu berpengaruh terhadap pengangkatan seseorang *keucik*. Karena itu dalam pemilihan kepala kampung atau *keucik* harus tertampung aspirasi warga kampung dan pemerintah (ca-mat).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, *keucik* dibantu oleh seperangkat pembantu. Mereka terdiri atas *teungku meursah* (atau tengku imam mesjid), *keujruen blang*, *petua anak beru*, dan *indung mudo*. Mereka ini mempunyai kekuasaan terbatas pada bidang yang diurusnya.

Di samping pimpinan formal yang sudah disebutkan di atas masih ditemukan juga pimpinan informal pada setiap kampung. Pimpinan informal di dalam suku-bangsa Kluet adalah pimpinan yang tidak menduduki salah satu jabatan di atas, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial kampung. Mereka terdiri dari cendekiawan kampung, dan guru sekolah. Para pimpinan informal ini umumnya direkrut ke dalam *Lembaga Sosial Desa* dan lembaga *Tuha Peut* yang merupakan semacam badan penasehat atau konsultan *keucik*.

Hubungan sosial yang berlangsung antara para warga kampung berlangsung dalam suasana intim dan akrab. Keakraban itu dijalin oleh faktor ikatan kekerabatan, mata pencaharian yang sama, kultural dan keagamaan (Islam) yang sama. Tambahan lagi kawasan pemukiman yang relatif terisolir dan terbatas ( $\pm 2$  km<sup>2</sup>) dan penduduk yang relatif kecil jumlahnya pada tiap perkampungan ( $\pm 482$  jiwa) sehingga memungkinkan intensitas kontak komunikasi yang tinggi sesama anggota warga kampung. Keseua itu menampakkan diri dalam pelbagai aktivitas sosial baik pada kegiatan tingkat perkampungan, dalam mata pencaharian hidup, dan yang berhubungan dengan upacara daur hidup yang diselenggarakan secara individual.

Suku-bangsa Kluet mengenal sistem pengendalian sosial yang mengatur setiap warga kampung dalam berpikir berbuat, dan bertindak laku seperti yang diharapkan oleh nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam komunitasnya. Nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kampung sangat diwarnai oleh kondisi sosial-kultural dan keagamaan (Islam). Sarana dalam mewujudkan pengendalian sosial yaitu dengan cara mempertebal keyakinan, memberi imalan, mengembangkan rasa malu, dan mengembangkan rasa takut. Kesemua sarana itu terjalin sedemikian rupa secara terintegrasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jumlah penduduk yang relatif kecil, intensitas pergaulan yang tinggi dan kawasan yang agak terisolir tentu turut berpengaruh kepada efektivitas dari pada pengendalian sosial.

---

## DAFTAR INDEKS

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Amat ramanyang       | Gampong               |
| Ateung               | Gende-gende           |
| Assalamualaikum      | Gotong-royong gampong |
| Ampon                | Geucik                |
| Aneuk rawa           | Geucik gampong        |
| Amepek kaum          | Hari pekan            |
| Alongan              | Imam mukim            |
| Balee                | Ijtihad               |
| Bot bijeh            | Indung mudo           |
| Berandang padi       | Kampuang              |
| Basawah, Bapayo      | Kemukiman             |
| Bakabun              | Keumunjong            |
| Bapayang             | Keumeukoh             |
| Baladang             | Kaum tua              |
| Burung tujuh         | Kaum muda             |
| Batu sumbang         | Kaum kafir            |
| Batu balayie         | Keucik                |
| Balai pertemuan      | Kuala Krung           |
| Bate sirih           | Kenduri blang         |
| Bamukah              | Kenduri padee         |
| Berandang            | Komunitas gampong     |
| Bungki               | Kayu api              |
| Bencawan             | Kegeucikan            |
| Bapak                | Kepala mukim          |
| Ceumeulho            | Keuramat              |
| Cut                  | Kenduri               |
| Cut nyak             | Kedatukan             |
| Charisma             | Kindred               |
| Cerdik pandai        | Kepala Kampuang       |
| Dayah                | Keucik kampuang       |
| Dayah Budi           | Ketua pemuda          |
| Daerah Istimewa Aceh | Keujrun sawah, blang  |
| Datuk                | Kambing               |
| Dando                | Kalang baleh          |
| Deyah                | Kampung               |
| Ketua anak bujang    | Meurahni              |
| Kak meusawah         | Nash                  |

Kak merumpos  
 Kak peugawai  
 Kak lot  
 Kerboo  
 Kawin letun  
 Lanun  
 Lapek malee  
 Landschap  
 Lembaga sosial desa  
 Menasah  
 Meuseuraya  
 Me'u blang  
 Mekaoui  
 Mangan yei  
 Mamukek  
 Matrilineal  
 Manasah  
 Manyarayo  
 Manyewo  
 Mananam padi  
 Manyiang rumpuk  
 Mairiek padi  
 Maatok  
 Mamaga  
 Manyangguk  
 Mancilok  
 Manipu  
 Meursah  
 Mesjid  
 Munthe  
 Mukim  
 Meusawa  
 Meurumo  
 Merumpus  
 Ro darah  
 Rumoh tanggo  
 Rumoh Aceh  
 Rangkang

Ninik mamak  
 Nasi kunyit  
 Nyayor  
 Nyerani  
 Nyarayo  
 Nyewo  
 Ngerik  
 Nendok wari  
 Ngilonge  
 Padang ban  
 Pasir karam  
 Peunulang  
 Pimpinan mencakup  
 Pak mukim  
 Pak geucik  
 Perang sabi  
 Pemuda  
 Paie kalaut  
 Pangaleh  
 Patron clean  
 Panalop air  
 Pagawai  
 Patani  
 Pelis  
 Pinem  
 Pawalian  
 Pamamowah  
 Pamawowan patok tiwon  
 Pawalian tandok hutang  
 Perumahan  
 Petuo anak beru  
 Petaroh  
 Panyewo  
 Rumoh  
 Ureung meudagang  
 Ureung tamong  
 Ulaibalang  
 Uxorilokal

Remuah  
 Recong  
 Silek  
 Saboh bhom  
 Seumula  
 Serambi Mekkah  
 Seurambi  
 Surau  
 Sumbang  
 Selian  
 Sebayang  
 Sukut  
 Tron u blang  
 Teungku  
 Tulak bala  
 Tuha peut  
 Teuku  
 Teuku datuk  
 Tuangku sangi  
 Tuangku manasah  
 Tuangku imam mesjid  
 Tuangku surau  
 Tuangku  
 Teungku deyah  
 Teungku imam balai  
 Tiju  
 Taga  
 Teungku meursah  
 Tukang  
 Turun beulawe  
 Teuku keujrun  
 Teuku imam

Urang barado  
 Ulaibalang cut  
 Wali  
 Warga kampung  
 Warga kampuang  
 Zelf bestuurder

## CATATAN KAKI

## I. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA ACEH

1. Siegel, James, *The Rope of God*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969.
2. Adnan Abdullah, *Perantauan, Perubahan Status Sosial Ekonomi, dan Tingkat Fertilitas : Suatu Study di Pidie, Aceh*, Laporan Penelitian, Stensilan, Banda Aceh, 1978.
3. H. M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.
4. Taufik Abdullah, *Aspek Reformasi Islam di Indonesia*, Leknas, Jakarta, 1976.

## II. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA ANEUK JAMEE

1. M. Isa Sulaiman, *Adat dan Upacara Perkawinan di daerah Adat Aneuk Jamee*, Pusat Dokumentasi Aceh (PDIA), Banda Aceh, 1978.
2. Van Langen, KFH, *Atjeh's Westkust*, EJ Brill, Leiden, 1888.
3. Van Langen, Ibid
4. M. Isa Sulaiman, Opcit.
5. Van Langen, Ibid
6. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
7. Koentjaraningrat, Ibid.

## III. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KLUET

1. Van Langen, KFA, *Atjeh's Westkust*, EJ Brill, Leiden, 1888.
2. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
3. Koentjaraningrat, Ibid.

Abdullah Taufik  
1976

: *Aspek Reformasi Islam di Indonesia*,  
Léknaś, Jakarta.

Van Langen, KFH  
1888.

: *Atjeh's Westkust*, EJ Brill, Leiden.

## Lampiran I

## DAFTAR INFORMAN

## I. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA ACEH

- A. Gani Ibrahim : Lahir di Kecamatan Jaya Lamno  
Umur 52 tahun, tempat tinggal di  
Lamno  
Pekerjaan tani  
Pendidikan tingkat SD
- Nyak Haji : Lahir di Kecamatan Jaya Lamno  
Umur 51 tahun, tempat tinggal  
Pekerjaan Tani  
Pendidikan tingkat SD
- T. Cut Rahman : Lahir di Kecamatan Jaya Lamno  
Umur 52 tahun, tempat tinggal di  
Lamno  
Pekerjaan Dagang dan Tani  
Pendidikan tingkat SLP
- Tgk. Makam : Lahir di Kecamatan Jaya Lamno  
Umur 65 tahun, tempat tinggal di  
Lamno  
Pekerjaan tani  
Pendidikan Pesantren
- Tgk. Mehammad Amin : Lahir di Kecamatan Jaya Lamno  
Umur 62 tahun, tempat tinggal di  
Lamno  
Pekerjaan Kepala Mukim  
Pendidikan Pesantren

## II. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA ANEUK JAMEE

- Abu Yazid : Lahir di Kecamatan Samadua, Umur-  
50 tahun, tempat tinggal Kampung  
Gadang Kasik Putih, Pekerjaan Da-  
gang, Kepala Kampung, Pendidikan  
tingkat SD.
- Keucik Kamaruddin : Lahir di Kecamatan Samadua, Umur-  
60 tahun, tempat tinggal Kampung

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah Adnan  
1975 : *Interaksi Sosial Antara Orang Jawa dan Orang Aceh di Saree*, Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, Darusalam.
- .....  
1978 : *Perantauan, Perubahan Status Sosial Ekonomi, dan Tingkat Fertilitas : Suatu Study di Pidie, Aceh*, Laporan penelitian, Stensilan, Banda Aceh.
- Pemerintah Daerah  
Istimewa Aceh  
1960 : *Aceh Membangun*
- Zainuddin H. M  
1961 : *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan.
- Bachtiar Harsya W.  
1964 : *Negeri Taram, Masyarakat Desa Minangkabau*, Koentjaraningrat (Ed), Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kreemer, J.  
1978 : *Masalah Rodi, Penghasilan Kepala-kepala Daerah Kenegaraan dan Hukum Tanah di Aceh*, Alih Bahasa Aboe Bakar, PDIA, Banda Aceh.
- Koentjaraningrat  
1977 : *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Siegel, James  
1969 : *The Rope of God*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
- Husin T. A. Hasan  
1980 : *Sistem Gotong-royong Dalam Masyarakat Gayo di Aceh Tengah*, Laporan Penelitian, Penerbit PDIA, Banda Aceh.
- Syamsuddin T. et-al  
1978 : *Adat-istiadat Daerah, di Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Kanwil Dep. P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh.

Baro.

Pekerjaan Kepala Kampung  
Pendidikan Pesantren

Kamaruddin Kawi : Lahir di Kecamatan Samadua, Umur-  
58 tahun, Tempat tinggal Kasik Pu-  
tih. Pekerjaan Guru, Imam Mesjid  
Pendidikan tingkat SLP.

Sisiatar haitami : Lahir di Kecamatan Samadua, Umur-  
55 tahun, Tempat tinggal Samadua  
Pekerjaan Pegawai  
Pendidikan tingkat SLP

### III. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KLUET

Angkasah : Lahir di Durian Kewan, Umur 41 ta-  
hun, tempat tinggal di Kemukiman  
Perdamaian, Pekerjaan Pegawai, Pen-  
didikan tingkat SD.

Hasan Husein : Lahir di Kemukiman Perdamaian,  
Umur 48 tahun, Tempat tinggal di  
Kemukiman Perdamaian  
Pekerjaan Guru  
Pendidikan SPG

M. D a l i : Lahir di Menggamat  
Umur 39 tahun, Tempat tinggal  
Menggamat  
Pekerjaan Pegawai, Ketua Pemuda  
Pendidikan SMA

Teuku Yahya : Lahir di Koto, Menggamat  
Umur 45 tahun, Tempat tinggal  
Menggamat  
Pekerjaan Keucik Kampung Kuto  
Pendidikan Tingkat SD

T. Imam Titah : Lahir di Kuto  
Umur 60 tahun,  
Tempat tinggal di Kuto  
Pekerjaan Tani  
Pendidikan tingkat SD

**PERPUSTAKAAN**  
**DIREKTORAT SEJARAH &**  
**NILAI TRADISIONAL**

Baro.

Pekerjaan Kepala Kampung  
Pendidikan Pesantren

- Kamaruddin Kawi : Lahir di Kecamatan Samadua, Umur-58 tahun, Tempat tinggal Kasik Putih. Pekerjaan Guru, Imam Mesjid Pendidikan tingkat SLP.
- Sisiatar haitami : Lahir di Kecamatan Samadua, Umur-55 tahun, Tempat tinggal Samadua Pekerjaan Pegawai Pendidikan tingkat SLP

### III. KOMUNITAS KECIL SUKU BANGSA KLUET

- Angkasah : Lahir di Durian Kewan, Umur 41 tahun, tempat tinggal di Kemukiman Perdamaian, Pekerjaan Pegawai, Pendidikan tingkat SD.
- Hasan Husein : Lahir di Kemukiman Perdamaian, Umur 48 tahun, Tempat tinggal di Kemukiman Perdamaian Pekerjaan Guru Pendidikan SPG
- M. D a l i : Lahir di Menggamat Umur 39 tahun, Tempat tinggal Menggamat Pekerjaan Pegawai, Ketua Pemuda Pendidikan SMA
- Teuku Yahya : Lahir di Koto, Menggamat Umur 45 tahun, Tempat tinggal Menggamat Pekerjaan Keucik Kampung Kuto Pendidikan Tingkat SD
- T. Imam Titah : Lahir di Kuto Umur 60 tahun, Tempat tinggal di Kuto Pekerjaan Tani Pendidikan tingkat SD

**T. Meurah Pasah Adat · Lahir di Menggamat  
Umur 58 tahun,  
Tempat tinggal di Menggamat  
Pekerjaan Tani  
Pendidikan SGB (tidak tamat)**

**T. Meurah Pasah Adat : Lahir di Menggamat  
Umur 58 tahun,  
Tempat tinggal di Menggamat  
Pekerjaan Tani  
Pendidikan SGB (tidak tamat)**

MAJLIS PERSEKUTUAN  
KEMENTERIAN KESIHATAN  
REJISTER PERSEKUTUAN

Perpustakaan  
Jember

3